

DISERTASI

PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN INDUSTRI TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DI PROVINSI JAWA TIMUR



SAMBARI HALIM RADIANTO

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2008**

**PENGARUH PERTUMBUHAN SEKTOR PERTANIAN DAN
INDUSTRI TERHADAP KEBERHASILAN PEMBANGUNAN
DAERAH DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
DI PROVINSI JAWA TIMUR**

DISERTASI

**Untuk memperoleh Gelar Doktor
Dalam Program Studi Ilmu Ekonomi
Pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga
Telah dipertahankan di hadapan
Panitia Ujian Doktor Terbuka
Pada hari : Rabu
Tanggal : 22 Oktober 2008
Pukul 10.⁰⁰ WIB**

Oleh :

**SAMBARI HALIM RADIANTO
NIM. 090315280 D**

LEMBAR PENGESAHAN

DISERTASI INI TELAH DISETUJUI
PADA TANGGAL, 13 OKTOBER 2008

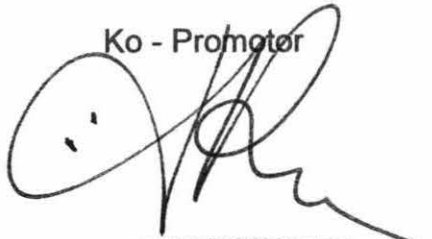
Oleh :

Promotor

A stylized, handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the bottom.

Prof. Dr. H. Effendie, SE
NIP. 130 531 816

Ko - Promotor

A stylized, handwritten signature in black ink, featuring a large circular loop on the left and a series of connected loops on the right.

Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs Ec. ME
NIP. 130 935 811

Menyetujui
Ketua Program Studi Ilmu Ekonomi
Program Pascasarjana Universitas Airlangga

A stylized, handwritten signature in black ink, identical to the one above the first promoter's name.

Prof. Dr. H. Effendie, SE
NIP. 130 531 816

Disertasi ini telah di uji pada ujian Doktor Tahap I (Tertutup)

Tanggal 10 September 2008

Panitia Penguji Disertasi

Ketua : Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, S.E.

Anggota : 1. Prof. Dr. H. Effendie, S.E.
2. Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs.Ec, ME.
3. Prof. Dr. Murdijanto Purbangkoro, S.E., S.U.
4. Dr. Hj. Sri Kusreni, Dra.Ec., M.E.
5. Dr. Soekarnoto, S.E.
6. Dr. Solimun, Ir., M.S.

Ditetapkan dengan
Surat Keputusan Rektor Universitas Airlangga Surabaya

Nomor : 8431/J03/PP/2008
Tanggal : 15 September 2008

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur alhamdulillah dipanjatkan kehadiran Allah SWT, atas rahmat dan hidayahNya yang telah diberikan kepada penulis, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Penulis sangat bersyukur dapat menyelesaikan Studi pada Program Doktor di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya. Penyelesaian tugas akademik untuk mendapatkan gelar Doktor Ilmu Ekonomi dengan konsentrasi pada Studi Pembangunan dengan menyelesaikan sebuah disertasi yang berjudul “ **Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Industri Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur** ”.

Disertasi ini tidak bisa diselesaikan dan terwujud tanpa peranan, bantuan, dorongan, dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama Promotor, Ko-Promotor dan para Dosen. Oleh sebab itu sangat tepat jika dalam naskah disertasi ini, penulis menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

Prof. Dr. H. Effendie, SE sebagai promotor, Prof. Dr. Djoko Mursinto, Drs Ec, ME sebagai Ko-Promotor dan Prof. Dr. H. Imam syakir, SE (almarhum) mantan promotor penulisan disertasi ini. Promotor dan Ko-Promotor adalah Guru Besar yang selalu meluangkan waktunya untuk memberi kesempatan kepada penulis dengan penuh keikhlasan, perhatian dan bimbingan serta motivasi yang begitu besar, agar bimbingannya cepat menyelesaikan disertasinya.

Pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Rektor Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. H. Fasich, Apt dan Prof. Dr. Med. H. Puruhito, dr., Sp. BTKV, mantan Rektor Universitas Airlangga Surabaya, atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada penulis untuk mengikuti Program Doktor Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Penulis juga menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Direktur

Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, Prof. Dr. Hj. Sri Hayati, SH, MS., Wakil Direktur I, Prof. Dr. H. Eddy Raharjo, dr.Sp. Ank.lc., dan Prof. H. Tjiptohadi Sawarjuwono, Drs., Ak., M.Ec., PhD., selaku Wakil Direktur II, serta Prof. Dr. H. Muhammad Amin, dr., Sp. P(K), mantan Direktur Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya beserta para Asisten Direktur dan Staf yang telah memberikan kesempatan dan kelancaran untuk mengikuti Program Doktor Studi Ilmu Ekonomi pada Program Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya.

Prof. Dr. H. Effendie, SE, Guru Besar Ilmu Ekonomi sebagai Ketua Program Studi Pendidikan Doktor bidang Ilmu Ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, dan Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE, mantan Ketua Program Pendidikan Doktor bidang ilmu ekonomi Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang penuh kesabaran dan tidak henti-hentinya untuk mengingatkan dan memberi motivasi agar Studi di Program Doktor ini segera dapat diselesaikan.

Para Dosen Penanggung Jawab Mata Kuliah (PJMK) dan Dosen Pengajar Mata Kuliah Penunjang Disertasi (MKPD) Program Studi Ilmu Ekonomi Program Doktor di Pascasarjana, masing-masing : Prof. Dr. H. Effendie, SE., Prof. Dr. H. Imam Syakir, SE (almarhum)., Prof. Dr. H. Suroso Imam Zadjuli, SE., Prof. Budiman Christiananta, Drs. Ec., MA., Ph.D., Prof. Dr. H. Soedjono Abipraja, SE., Prof. V. Henky Supit, SE., Ak., Prof. Dr. IBM. Santika, SE., Prof. Dr. Mardijanto Purbangkoro, SE, SU., Prof. Dr. H. Umar Nimran, MA., Prof. Dr. Sri Edi Swasono., Prof. Dr. HJ. Djumilah Zain, SE., Prof. Dr. H. Harry Susanto, SE, SU., Prof. Dr. Maimunah, SE., Prof. Dr. H. Amiruddin Umar (alm)., Prof. Dr. Sarmanu, drh, MS., Prof. Dr. Arsono., Prof. Dr. H. Muslich Anshori, SE, MSc, Ak., Dr. Soekarnoto, SE., Dr. Hj. Sri Kusreni, Dra Ec., M.E., Dr. Solimun, Ir, M.S., Dr. Agus Suman, DEA., Dr. Mudzakkir, SH., M.Hum.

Para Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga Surabaya, terutama yang mengajar di Pascasarjana bidang Studi Ilmu Ekonomi yang telah dengan sabar dan profesional meletakkan dasar-dasar teori yang menjadi bekal dalam tulisan disertasi ini.

Rektor Universitas Muhammadiyah Gresik, Drs. Irwani Zawawi, M.Kes, dan Mantan Rektor, Drs. Suyoto, MSi (Bupati Bojonegoro), yang selalu memberi dorongan agar Studi di Program Doktor ini segera dapat diselesaikan.

Rekan-rekan seangkatan pada program Doktor di Pascasarjana Universitas Airlangga Surabaya, yang sering melakukan diskusi dan saling mengingatkan serta memberikan dorongan agar kita terpacu untuk menyelesaikan disertasi ini.

Selanjutnya saya menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada Bapak Syaib dan Ibu Hj Wartiyem (almarhum dan almarhumah) yang tercinta dengan penuh kasih sayang telah membesarkan, mendidik, memberikan makna dalam kehidupan ini. Semoga arwah beliau berdua diterima di sisiNya sesuai dengan amal ibadahnya dan kedua mertua serta saudara-saudara yang telah memberikan dorongan agar disertasi segera dapat diselesaikan.

Istriku tercinta Hj. Maria Ulfah yang selalu memberikan dorongan agar saya melanjutkan Studi pada Program Doktor di Pascasarjana, dan anak-anakku (Citra Bagus Pratama, Thoriq Majiddanor, Jihaan Farahiyah, Taufiqul Najwan) yang sangat saya cintai yang telah membantu mengetik mulai dari awal sampai disertasi ini dapat diselesaikan.

Kepada semua pihak yang tidak dapat saya sebut satu per satu dalam kesempatan ini, yang telah banyak memberikan dukungan dan dorongan serta memberi semangat, sehingga disertasi ini dapat diselesaikan. Saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya. Mohon maaf manakala terdapat kesalahan selama ini baik sesama rekan dan terutama kepada Promotor, Ko-Promotor dan para Dosen. Dengan iringan do'a Semoga Allah SWT memberikan balasan yang berlimpah kepada Promotor, Ko-Promotor dan para Dosen. Amin.

RINGKASAN

Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Industri Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur

Ukuran-ukuran pembangunan dari masa-kemasa telah mengalami pergeseran dan perubahan-perubahan sejalan dengan berkembangnya teori-teori dan model-model dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Ketika paradigma pembangunan masih berpusat pada pembangunan ekonomi, maka ukuran-ukuran pembangunan dicerminkan dari indikator-indikator pertumbuhan ekonomi dan pemerataan pendapatan. Dalam perkembangannya, ukuran-ukuran ini tidak dapat memberikan hasil yang memuaskan dari banyak pihak. Pertumbuhan ekonomi tinggi, pemerataan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat masih tetap rendah. Maka pada saat itu pula terjadi perubahan dalam paradigma pembangunan menjadi pembangunan yang berpusat pada manusia, yang tentunya disertai dengan perubahan indikator-indikator pengukur keberhasilan pembangunannya, yaitu : Indek Pembangunan Manusia (IPM) yang dinilai dapat mewakili tingkat kesejahteraan masyarakat.

Dalam aspek perkembangan teori dan model strategi pembangunan, perdebatan tentang prioritas pembangunan sektor pertanian ataupun industri dalam hal pengaruhnya terhadap keberhasilan pembangunan serta meningkatnya kesejahteraan masyarakat menjadi bahan perdebatan yang cukup menarik yang pada akhirnya melahirkan teori pembangunan yang dikenal sebagai "*dualism economy theory*" dalam pembangunan. Aplikasi teori ini dalam penelitian-penelitian sampai sekarang tidak pernah berhenti, dengan berbagai hasil yang berbeda satu sama lainnya. Termasuk yang menjadi tema pokok dalam penelitian ini dalam konteks pembangunan di Provinsi Jawa Timur.

Dengan mempergunakan model analisis data *PLS (Partial Least Square)* dengan bantuan "*software*" *Smart PLS*, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerahnya yang diukur dari pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, serta semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya yang diukur dari IPM Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya justru pertumbuhan sektor industri di Provinsi Jawa Timur hanya berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya.

Implikasinya adalah, bahwa strategi pembangunan sektor industri sebagai sektor prioritas dalam pembangunan yang dalam beberapa tahun terakhir ini diimplementasikan adalah kurang tepat. Dengan demikian, bersamaan dengan diberlakukannya "otonomi daerah" di mana masing-masing daerah diberi kebebasan untuk menentukan strategi pembangunannya sendiri, maka pilihan pembangunan sektor pertanian sebagai sektor prioritas dalam pembangunan menjadi sangat perlu dipertimbangkan implementasinya.

SUMMARY

The Effect of the Growth of Agricultural and Industrial Sector on the Successful Development and Socio Economic Welfare in East Java

The dimension of development has changed in accordance with the advanced theory and economic development model in a country. When a development paradigm is still focused on the economic development, the dimension of development is reflected from the indicators of economic growth and equitable income distribution. In fact, this dimension is not able to make people satisfied. Even though the economic growth is high and the development is evenly spread, the public welfare is still in horrific condition. Therefore, this situation creates some changes in the development which has become human orientation paradigms (Human-based Development). Consequently, the change in the indicators of the successful development measurement has also emerged, namely Human Development Index (HDI) that is believed in representing the socio-economic welfare.

In the aspect of theories development, as well as development model strategy, whether the priority is in the agricultural sector or in the industrial one, which is related to the influence toward the development success and the increase in public welfare, has been an interesting topic to debate. As a result, it constructs a development theory known as Theory of Economic Dualism. The application of this theory has never been discontinued and, even, produced various results including the main theme of this research in the context of East Java development.

By using PLS (Partial Least Square) data analytical model supported by smart PLS software, this research shows that the agricultural sector growth has a significant influence to the astonishing success to that area. It is measured from the East Java economic growth and the increase in socio-economic welfare based on East Java HDI. Otherwise, the growth in industrial sector tends to be significant toward the development success. It has no significant influence toward the increase in socio-economic welfare. The implication is that the current implementation of development strategy in the industrial sector as a leading is not appropriate. Thus, in accordance with the actualization of regional autonomy, which each region has its own right to determine its own strategy, the implementation of the agricultural sector development as a priority is highly considered.

ABSTRACT

The Effect of the Growth of Agricultural and Industrial Sector on the Successful Development and Socio Economic Welfare in East Java

This research has an aim to give more information about agricultural and industrial sectors influence toward the success of East Java development and socio economic welfare. From the results of this research, it's expected that the will be more correctly implemented than before by the government.

This research has been formulated based on development model of "Theory of Economic Dualism", which always debates about both sectors toward the development. The differences of this research compared to the others, is that it uses a macro model analysis which measures the influence of both sectors through the economic growth as the development of successful measurement and human development index (HDI) to measure the socio economic welfare. Meanwhile, the past research only used a micro economic analysis.

Data analytical model of the hypothesis is approved by using PLS (Partial Least Square) and supported by Smart PLS software to process the secondary data. As a result, this research shows that the growth of agricultural has a significant influence toward the astonishing success of that area. It has been measured from the economic growth in East Java and the results of economic welfare have increased based on East Java HDI. Otherwise, the industrial effects have influenced the economic growth but not the socio-economic welfare.

Based on this result, the development on East Java should be followed by the development of agricultural sector as a leading economic sector, while the industrial sector should have a backward or forward linkage to the agricultural sector.

Keywords: economic dualism, economic growth, welfare, socio economic and development of agriculture sector, leading sector.

DAFTAR ISI

	Halaman
Sampul Depan.....	i
Sampul Dalam.....	ii
Persyaratan Gelar.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Lembar Penetapan Panitia Ujian.....	v
Ucapan Terima Kasih.....	vi
Ringkasan.....	ix
Summary.....	x
Abstract.....	xi
DAFTAR ISI.....	xii
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR GAMBAR.....	xvii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xviii
 BAB 1 PENDAHULUAN.....	 1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	26
1.3 Tujuan Studi.....	26
1.4 Manfaat Studi.....	27
 BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA.....	 29
2.1 Landasan Teori.....	29
2.1.1 Tujuan Dan Pengertian Pembangunan Ekonomi.....	30
2.1.2 Teori Pertumbuhan.....	34
2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik.....	35
2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Keynesian.....	38
2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik	40
2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Modern.....	42
2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat.....	54
2.1.4 Pembangunan dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi.....	 60

2.1.4.1 Pembangunan Sektor Pertanian.....	60
2.1.4.2 Syarat-syarat Mutlak Pembangunan Pertanian.....	67
2.1.4.3 Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi.....	70
2.1.5 Pembangunan Dan Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi.....	77
2.1.5.1 Pembangunan Sektor Industri.....	77
2.1.5.2 Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi.....	83
2.1.6 Interaksi Antara Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri Dan Pertumbuhan Ekonomi.....	86
2.1.7 Otonomi Dan Pembangunan Daerah.....	90
2.2 Penelitian Terdahulu.....	94
BAB 3 KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS.....	98
3.1 Kerangka Konseptual.....	98
3.2 Hipotesis	112
BAB 4 METODE PENELITIAN.....	113
4.1 Rancangan Penelitian.....	113
4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian.....	113
4.3 Data Penelitian.....	114
4.4 Variabel Penelitian.....	114
4.4.1 Klasifikasi Variabel.....	114
4.4.2 Definisi Operasional Variabel-Variabel.....	115
4.5 Teknik Analisis.....	116
4.6 Analisis Loqatient Quotient (LQ).....	120
BAB 5 ANALISIS HASIL STUDI.....	121
5.1 Profil Provinsi Jawa Timur.....	121
5.1.1 Jumlah Penduduk.....	121
5.1.2 Kepadatan Penduduk.....	122
5.1.3 Ketenagakerjaan.....	126
5.1.4 Disparitas Pembangunan Wilayah.....	132

5.1.5 Potensi Sektor Pertanian dan Industri Masing-Masing Wilayah Kabupaten/Kota dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakatnya.....	145
5.1.6 Hasil Pengujian Asumsi Linieritas.....	152
5.1.7 <i>Goodness of Fit Model</i>	153
5.1.8 Hasil Pengujian Hipotesis.....	154
BAB 6 PEMBAHASAN.....	157
1.1 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur.....	157
1.2 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur.....	162
1.3 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur....	165
1.4 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur....	167
1.5 Pengaruh Keberhasilan Pembangunan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur.....	169
1.6 Hubungan Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri Di Provinsi Jawa Timur.....	171
1.7 Implikasi Kebijakan.....	174
1.8 Keterbatasan Studi.....	207
BAB 7 PENUTUP.....	208
7.1 Kesimpulan.....	208
7.2 Saran.....	210
DAFTAR PUSTAKA.....	213
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	221

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 5.1 Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Jiwa).....	124
Tabel 5.2 Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Jiwa/Ha).....	125
Tabel 5.3 Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Jiwa).....	129
Tabel 5.4 Jumlah Tingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Persen).....	130
Tabel 5.5 Jumlah Tenaga Kerja Di Masing-Masing Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006	131
Tabel 5.6 Perbandingan PDRB/Kapita Dan Pertumbuhan Ekonomi Antar Kabupaten/Kota Dalam Kuadran Provinsi Jawa Timur Tahun 2003 Dan Tahun 2006.....	133
Tabel 5.7 Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Yang Berlaku Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006.....	136
Tabel 5.8 Produk Domestik Regional Bruto Pada Saat Harga Konstan Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Juta Rupiah).....	137
Tabel 5.9 Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Persen).....	138
Tabel 5.10 Variabel Makro Ekonomi Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Timur.....	140
Tabel 5.11 Variabel Makro Ekonomi Sektor Industri Di Provinsi Jawa Timur.....	140
Tabel 5.12 Tingkat Produktifitas Untuk Masing-Masing Sektor Ekonomi Atas Dasar Harga Yang Berlaku Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d. 2006 (Dalam Rupiah)	141

Tabel 5.13	Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur.....	143
Tabel 5.14	Perbandingan IPM Provinsi Jawa Timur Dengan Provinsi-Provinsi di Pulau Jawa Yang Lain.....	144
Tabel 5.15	Keberhasilan Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006.....	145
Tabel 5.16	Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Terhadap Pembentukan PDRB Harga Konstan Yang Berlaku Masing-Masing Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur 2001 s.d 2006.....	148
Tabel 5.17	Nilai LQ Sektor Pertanian dan Industri Serta Nilai IPM Masing-Masing Wilayah Kabupaten/Kota Di Provinsi Jawa Timur Tahun 2005.....	150
Tabel 5.18	Hasil Pengujian Asumsi Linieritas.....	153
Tabel 5.19	Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung.....	154
Tabel 6.1	Arahan Kebijakan Pengembangan Masing-masing Kabupaten/Kota Berdasarkan Potensi Sektoralnya	196

DAFTAR GAMBAR

	Halaman
Gambar 3.1 Kerangka Proses Berpikir.....	98
Gambar 3.2 Kerangka Konseptual	110
Gambar 4.1 Langkah-Langkah Analisis <i>PLS</i>	116
Gambar 4.2 <i>Inner Model</i> Pada Analisis <i>PLS</i>	117
Gambar 5.1 Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis.....	155

DAFTAR LAMPIRAN

	Halaman
Lampiran 1 Surat Pernyataan.....	221
Lampiran 2 Peta Teori.....	222
Lampiran 3 Hasil Pengujian Asumsi Linieritas.....	225
Lampiran 4 Hasil Analisis <i>PLS</i>	235
Lampiran 5 Hasil Pemeriksaan Komponen Musiman.....	237

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Ilmu Ekonomi Pembangunan selamanya akan berkembang terus mengikuti berbagai perubahan fenomena pembangunan yang terjadi di beberapa negara yang sedang melakukan pembangunan ekonominya. Berkembangnya fenomena strategi dan kebijakan pembangunan pada hakikatnya akan mengikuti perubahan-perubahan terhadap permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing negara. Hal ini yang perlu ditekankan adalah bahwa pembangunan ekonomi tidaklah sama dengan pembangunan masyarakat secara keseluruhan. Pembangunan ekonomi hanyalah salah satu bagian atau salah satu dimensi dari pembangunan secara keseluruhan. Pembangunan secara keseluruhan dalam suatu negara termasuk di dalamnya adalah pembangunan sosial dan politik, di samping pembangunan ekonomi dalam upaya membangun identitas suatu bangsa. Meskipun demikian, keterkaitan antara pembangunan sosial, politik dan ekonomi adalah sangat penting bagi pembangunan. Misalnya, bagaimana pembangunan kultur sosial dan politik dapat memberi kontribusi terhadap pembangunan ekonomi, atau bahkan sebaliknya terjadi, bagaimana pembangunan ekonomi dapat memberi sumbangan terhadap pembangunan kultur sosial dan politik. Hal ini jelas menggambarkan bagaimana studi antar disiplin sangat dibutuhkan untuk menentukan bagaimana kekuatan-kekuatan ekonomi dan non-ekonomi saling berinteraksi satu sama lainnya.

Selain itu perlu diingatkan juga terhadap pendapat yang menyamakan bahwa pembangunan ekonomi dengan “kemandirian ekonomi” atau “industrialisasi”. Sebagai akibat dari penjajahan dan diperolehnya kebebasan politik kembali, beberapa negara miskin mengekspresikan ketidak senangan dengan menganggap bahwa “kemandirian” adalah sebagai bentuk dari penyediaan pasar-pasar ekspor dari negara-negara miskin di negara kaya dan bantuan modal asing yang diberikan oleh negara maju kepada negara miskin. Sehingga bagi beberapa negara miskin “kemandirian” dinilai sebagai dominasi negara asing atau eksploitasi negara asing terhadap negara miskin.

Dalam hal industrialisasi, beberapa negara miskin merasa tidak puas karena mereka merasa hanya menghasilkan barang-barang primer. Industrialisasi cenderung dianggap sebagai upaya yang paling superior. Negara-negara kaya mempercayai bahwa mereka kaya karena mereka melakukan industrialisasi. Sebaliknya negara-negara miskin justru mempercayai bahwa mereka miskin karena mereka hanya memproduksi barang-barang primer. Apakah masyarakat industri merupakan suatu tujuan yang paling utama bagi suatu negara?. Bagaimanapun hal itu bukanlah pertanyaan yang relevan. Bagi negara miskin pembangunan pertanian ataupun pembangunan industri adalah bukanlah masalah yang penting, tetapi lebih dari itu, yang lebih penting lagi adalah bagaimana menempatkan strategi yang tepat untuk mengakselerasi pilihan di antara keduanya dalam kerangka pembangunan suatu negara (Meir, 1970 : 6).

Dengan demikian, jelaslah bahwa pembangunan ekonomi bukanlah sama dengan industrialisasi.

Pembangunan ekonomi bukanlah dimaksudkan sama dengan industrialisasi karena beberapa alasan : Pertama, bahwa konsentrasi yang tinggi terhadap produksi dalam sektor primer bukanlah merupakan penyebab kemiskinan. Kemiskinan itu sendiri lebih banyak disebabkan karena rendahnya produktivitas di sektor pertanian. Dengan besarnya proporsi penduduk yang bekerja di sektor pertanian pada negara-negara miskin dengan tingkat produktivitas yang rendah di sektor pertanian, maka berakibat menciptakan kemiskinan sebagian besar masyarakatnya. Kedua, kemajuan dalam industrialisasi adalah sangat ditentukan oleh pembangunan sektor pertanian. Tanpa adanya dukungan terjaminnya ketersediaan produksi dari sektor pertanian, maka industrialisasi akan mengalami hambatan. Ketiga, pembangunan ekonomi secara sederhana adalah lebih merupakan upaya bagaimana memanfaatkan berbagai kelebihan dari industri-industri. Mungkin hal itu dapat diartikan sebagai sesuatu yang kurang lebih merupakan "kemajuan dari keseluruhan sistem sosial". Atau mungkin hal itu dapat diinterpretasikan sebagai pencapaian beberapa hal yang berhubungan dengan cita-cita modernisasi, misalnya: kenaikan produktivitas; persamaan sosial dan ekonomi; pengetahuan modern; perbaikan dalam kelembagaan dan sikap; serta terciptanya sistem yang terkoordinasi secara rasional dari kebijakan yang terukur yang dapat menghilangkan berbagai hambatan dalam sistem sosial yang terdapat dalam negara-negara yang terbelakang (Meir, 1970 : 6).

Pandangan-pandangan tersebut mempunyai implikasi bahwa pembangunan ekonomi adalah sesuatu yang lebih dari sekedar terciptanya pertumbuhan ekonomi saja. Pembangunan adalah dimaksudkan tercapainya "pertumbuhan" dan "perubahan". Namun bagaimanapun juga yang dimaksud "perubahan" adalah sesuatu yang berdimensi kualitatif dalam suatu proses pembangunan yang mungkin saja bisa terjadi tanpa adanya pertumbuhan atau ekspansi perekonomian, tetapi dalam proses pembangunan terjadi perbaikan dalam kinerja faktor-faktor produksi dan perbaikan dalam teknik produksi, berkembangnya kelembagaan dan terjadinya perubahan dalam sikap dan nilai di masyarakat.

Berdasarkan hal itu, maka pembangunan ekonomi diartikan oleh Waterson dalam Mosher (1966 : 24) bahwa : sesungguhnya, *development* itu artinya perubahan atau pertumbuhan. *Development* artinya kemajuan atau perkembangan. Pada mulanya pengertian *development* memang sama dengan kemajuan, akan tetapi kemudian diperluas pengertiannya dengan memasukkan unsur bagaimana cara-cara dasar yang ditempuh sehingga mencapai kemajuan itu. Akhirnya sampailah kepada suatu pengertian, bahwa kemajuan yang tengah berlangsung tersebut harus disertai dengan adanya perubahan dan pertumbuhan yang terus menerus atau lebih khusus lagi harus disertai dengan terjadinya perubahan-perubahan sosial/struktur sosial dan pertumbuhan ekonomi yang dipercepat. Sejalan dengan pendapat Waterson, Meir (1970 : 7) mengartikan pembangunan ekonomi sebagai

suatu “proses” dimana pendapatan per kapita riil masyarakat dari suatu negara mengalami kenaikan dalam “jangka waktu panjang”.

Penekanan kata “proses” karena mempunyai implikasi terjadinya interaksi antar kekuatan-kekuatan tertentu dengan berbagai penyebabnya. Dengan demikian pembangunan adalah suatu proses yang melibatkan hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang terlibat dalam upaya mencapai tujuan-tujuan pembangunan. Karena itu, jika pembangunan tersebut dilaksanakan pada negara miskin, maka pembangunan akan ditujukan untuk menghilangkan adanya kemiskinan massal, dengan target utamanya adalah meningkatkan pendapatan riil masyarakat dan bukan lebih mengutamakan kenaikan dalam pendapatan nasional riil, terlepas dari adanya perubahan dalam jumlah penduduk. Sebab jika lebih mengutamakan kenaikan pada pendapatan nasional riil nya, maka hal itu mungkin saja akan terjadi produksi aggregatnya meningkat tapi tanpa disertai dengan perubahan pendapatan per kapita riil dan perbaikan dalam standar hidup dalam masyarakat. Hal itu akan terjadi jika kenaikan dalam pendapatan nasional riil ternyata diikuti oleh kenaikan dalam jumlah penduduk dalam proporsi yang sama atau bahkan lebih besar, sehingga menyebabkan pendapatan per kapita riil masyarakat malah menurun.

Selanjutnya penekanan kata “dalam jangka panjang” karena hal itu merupakan titik tolak yang sangat penting dari pembangunan yaitu adanya keberlanjutan peningkatan dalam pendapatan riil masyarakat, bukan kenaikan yang sesaat pada periode kenaikan siklus saja. Oleh karena itu

untuk mencapai keberlanjutan dalam peningkatan pendapatan riil masyarakat, pembangunan haruslah didasarkan atas perencanaan pembangunan yang matang, baik itu rencana jangka pendek, menengah, serta jangka panjang.

Meskipun kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat diadopsi sebagai tujuan utama, namun hal itu harus disertai dengan tujuan-tujuan lainnya seperti yang diinterpretasikan dalam pembangunan ekonomi, yaitu misalnya, tercapainya distribusi pendapatan yang merata. Semakin kecilnya ketimpangan ekonomi secara umum adalah merupakan tujuan yang dinyatakan dalam pembangunan ekonomi. Bahkan beberapa ahli ekonomi pembangunan mengkualifikasikan tujuan utama pembangunan ekonomi adalah semakin sedikitnya masyarakat yang hidup di bawah garis minimum standar hidup. Bahkan ketika dualisme sektor tradisional dan sektor modern terjadi, bagaimana pembangunan ekonomi mampu mengeliminasi konflik yang terjadi antara ke dua sektor tersebut, sehingga tercapai keselarasan antara sektor tradisional dan sektor modern yang memungkinkan terciptanya peningkatan dan pemerataan pendapatan seluruh masyarakat dalam suasana perekonomian modern.

Tujuan-tujuan lain yang terdapat dalam pembangunan ekonomi adalah mempertahankan dan meningkatkan tingkat minimum konsumsi masyarakat, tingkat pengangguran yang dapat ditoleransi, menghindari disparitas kemajuan dan pertumbuhan antara wilayah dalam suatu negara, diversifikasi perekonomian, dan mencapai harapan-harapan dalam modernisasi.

Dalam hal tujuan kebijakan, maksud dari pembangunan ekonomi sangat bervariasi. Meskipun hal itu hanya indeks kasar, kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat masih menjadi indikator yang terbaik untuk mengukur capaian hasil tujuan utama dari pembangunan ekonomi. Meskipun demikian, indeks-indeks dari pembangunan ekonomi yang lain sangat perlu dikembangkan untuk mengukur tujuan-tujuan pembangunan ekonomi yang lain.

Meskipun penggunaan indeks kenaikan pendapatan per kapita riil dipergunakan sebagai indeks untuk mengukur tingkat pembangunan ekonomi, namun hal itu masih harus dinilai lagi secara hati-hati, apakah indeks itu dipergunakan untuk mengukur kemajuan ekonomi ataukah untuk mengukur kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat. Jika dipergunakan untuk mengukur kenaikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, maka indeks kenaikan pendapatan per kapita riil adalah belum mencukupi. Kenaikan pendapatan per kapita riil adalah hanya indeks parsial saja dari kesejahteraan ekonomi masyarakat, karena kesejahteraan ekonomi masyarakat harus juga mengandung unsur nilai keadilan yang dicerminkan dari kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat.

Sesungguhnya, kesejahteraan ekonomi tidak hanya menekankan dari aspek keadilan distribusinya saja, melainkan juga mempertimbangkan tentang bagaimana komposisi total produksi yang dapat mengakibatkan kenaikan dalam pendapatan per kapita riil masyarakat serta bagaimana produksi ini dinilai. Apakah dengan lebih besar produksi dapat mencukupi

kebutuhan masyarakat?. Hal itu tergantung dengan seberapa banyak serta apa yang diproduksi dan bagaimana kualitas yang mampu disediakan. Selanjutnya untuk menilai semua hasil produksi tersebut, maka untuk menghindari subyektivitas dalam penilaian, dipergunakan pedoman harga pasar. Harga tersebut akhirnya menjadi “timbangan” meskipun akan tetap dipengaruhi oleh distribusi pendapatan. Dengan distribusi pendapatan yang berbeda, harga-harga akan berbeda dan dengan demikian baik komposisi maupun nilai dari produksi nasional juga akan berbeda. Harga pasar juga pada akhirnya akan menjadi terbatas manakala unsur eksternalitas atau biaya sosial diperhitungkan.

Apa yang telah dijelaskan tersebut, telah memperlihatkan berbagai dimensi dari pembangunan ekonomi, namun bagaimanapun juga yang perlu digaris bawahi kembali adalah bahwa pembangunan ekonomi mengandung suatu proses perubahan, kemajuan dan perbaikan struktur perekonomiannya. Di samping terciptanya pertumbuhan ekonominya serta semakin meningkatnya pendapatan per kapita riil dalam masyarakat yang disertai dengan distribusi pendapatan yang semakin adil agar kesejahteraan ekonomi dalam masyarakat dapat dicapai.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut wajarlah jika perkembangan teori-teori pembangunan ekonomi, model-model pembangunan yang pertama kali digagas oleh para ahli ekonomi pembangunan generasi pertama pada saat itu adalah dengan memperkenalkan teori dan model strategi pembangunan yang menjelaskan tentang transformasi struktural. Pada waktu itu mereka

berpendapat bahwa pembangunan ekonomi merupakan upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang disertai dengan terjadinya transformasi struktural, biasanya dari sektor primer (sektor pertanian) ke sektor sekunder (sektor industri) dan tahap berikutnya dari sektor sekunder ke sektor tersier (sektor jasa). Perdebatan tentang hal ini memang menarik untuk dikaji dalam setiap proses pembangunan ekonomi di setiap negara yang sedang berkembang, termasuk di Indonesia. Tetapi benarkah bahwa pada akhirnya kemajuan suatu bangsa yang dihasilkan dari upaya pembangunan ekonomi akan selalu menafikan keberadaan sektor pertanian, padahal sektor pertanian ini dapat dikatakan merupakan sektor ekonomi yang tertua. Dalam perkembangan sejarahnya, dikatakan bahwa manusia akan berkonsentrasi mengikuti pertanian, yang kemudian pernyataan ini dilengkapi oleh Von Thunen dengan mengatakan bahwa pertanian akan berkonsentrasi di sekitar manusia (Kilkenny, 2004).

Memperhatikan hal tersebut, dapat diketahui bahwa begitu pentingnya sektor pertanian dalam setiap aspek kehidupan ekonomi manusia pada waktu itu, baik itu menyangkut ketersediaan kebutuhan pokok manusia, ataupun menyangkut ketersediaan lapangan pekerjaan bagi masyarakat. Namun demikian seiring dengan upaya perbaikan-perbaikan dalam berbagai aspek kehidupan manusia menuju masyarakat yang lebih maju, di mana upaya ini diyakini sebagai upaya pembangunan ekonominya, misalnya adanya pembangunan prasarana dan sarana transportasi, perbaikan dalam produktivitas, kondisi kehidupan di pedesaan tidak mengalami perubahan yang signifikan, tetap saja semakin

sulit. Di sisi yang lain kehidupan di perkotaan begitu menjanjikan, pada akhirnya semua itu secara dramatis merubah pola hubungan antar daerah (terjadi *demography transition*) yang ditandai dengan semakin meningkatnya urbanisasi dan semakin berkurangnya penduduk di pedesaan. Pada saat yang bersamaan, akibat kemajuan-kemajuan yang diistilahkan sebagai upaya pembangunan ekonomi tersebut, sektor pertanian justru mengalami penurunan dalam perannya.

Secara sederhana, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai suatu upaya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara terus menerus yang disertai dengan adanya perubahan pada struktur ekonominya (transformasi struktural). Dalam konteks ini, banyak penelitian yang dilakukan oleh para ahli ekonomi pembangunan tentang implementasi dari pembangunan ekonomi di banyak negara. Salah satunya adalah yang dilakukan oleh Kuznet (1971: 349-350) yang meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi pada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonominya. Ada 2 (dua) temuan dari penelitian Kuznet yang menarik untuk dikaji, yaitu :

1. Adanya pergeseran yang berupa terjadinya penurunan peranan sektor pertanian dan produk-produk primer lainnya seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan, dan sebaliknya terjadi peningkatan peranan sektor industri dan jasa-jasa dalam perekonomian yang sedang mengalami pembangunan ekonominya. Artinya, selama proses pembangunan berjalan, gejala yang terjadi adalah semakin menurunnya kontribusi sektor primer (pertanian, pertambangan,

kehutanan serta perikanan) dalam pembentukan Produk Domestik Bruto (PDB), sebaliknya kontribusi sektor sekunder (industri) serta sektor tersier (jasa-jasa) dalam pembentukan PDB semakin meningkat.

2. Bahwa awal pertumbuhan ekonomi yang terjadi selalu ditandai dengan meningkatnya akumulasi modal secara fisik (*physical capital accumulations*). Salah satu faktor yang mendorong terciptanya pertumbuhan ekonomi, adalah investasi. Pada awalnya, investasi yang terjadi biasanya berupa modal-modal fisik yang dikenal sebagai "*social overhead capital*" yang sangat dibutuhkan sebagai salah satu prasyarat pembangunan. Mengingat hal itu, wajar jika pada tahap pertumbuhan ekonomi akumulasi modal fisik semakin meningkat.

Hasil penelitian dari Kuznet ini semakin meyakinkan dunia bahwa dalam proses pembangunan ekonomi sesuatu yang muncul adalah adanya kenyataan terjadinya "*trade-off*" antara pertumbuhan satu sektor dengan sektor yang lain, dalam hal ini yang terjadi adalah kemunduran sektor yang dikenal sebagai sektor tradisional (sektor pertanian) dan sebaliknya terjadi kemajuan pada sektor yang dikenal sebagai sektor modern (sektor industri).

Sebenarnya kalau disimak jauh ke belakang, hasil penelitian Kuznet ini tidak ubahnya sebagai pengujian atas tesis-tesis yang dikemukakan baik oleh Lewis (1954) maupun Hirschman (1958:62) yang menyatakan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi akan selalu diikuti dengan kemajuan pada sektor modern (sektor industri) dan

sebaliknya akan terjadinya penurunan peran dari sektor tradisional (sektor pertanian). Semakin maju pembangunan suatu negara, semakin besar *gap* yang akan terjadi di antara dua sektor tersebut, yang pada giliran berikutnya akan menciptakan kondisi di mana sektor tradisional dengan berbagai keterbelakangannya hidup berdampingan dengan sektor modern dengan segala kemajuannya. Kondisi ini selanjutnya dikenal sebagai “dualisme perekonomian” yang oleh Lewis (1954) dan Hirschman (1958:62) disebut sebagai “Model Dualisme Ekonomi”

Pada dasarnya model dualisme ekonomi dalam pembangunan tersebut selalu berusaha mencari penjelasan yang berkaitan dengan :

- a. Adanya penurunan peranan sektor pertanian dalam suatu perekonomian. Salah satu ciri dari pembangunan adalah ditandai dengan penurunan peranan sektor pertanian, baik dalam hal penggunaan faktor produksi, terutama tenaga kerja maupun modal fisik.
- b. Adanya akumulasi modal. Tingginya tingkat pertumbuhan yang secara umum disertai dengan tingginya tingkat tabungan dan investasi pada sektor-sektor *non* pertanian dalam perekonomian.

Dengan kata lain model dualisme ekonomi ini pada hakikatnya untuk mengetahui bentuk interaksi antara sektor tradisional (dalam hal ini sektor pertanian) dengan sektor modern (dalam hal ini sektor industri) dalam sebuah proses pembangunan ekonomi.

Lebih lanjut menurut Lewis (1954) dan Hirschman (1958:62), model ini mencari penjelasan tentang sebab-sebab pertumbuhan ekonomi

dengan penekanan terhadap peranan sektor pertanian dan sektor industri dan keterkaitan di antara kedua sektor tersebut. Dualisme perekonomian memandang sektor pertanian sebagai suatu sektor basis bagi kemajuan perekonomian, sebagai pembangkit modal yang diperlukan untuk *take-off* menuju tahap kedua dari pembangunan ekonomi, yaitu industrialisasi. Tetapi apakah memang benar demikian?

Dalam literatur-literatur yang membahas model dualisme ekonomi ini, terdapat dua isu besar yang selalu dikaji, yaitu: Pertama, sebagian literatur menolak bahwa sektor pertanian merupakan faktor yang penting dalam mendorong pertumbuhan. Kedua, berkaitan dengan itu mereka mengenyampingkan mekanisme umpan balik antara sektor pertanian dengan sektor industri. Oleh karena itu sampai sejauh ini masih terdapat perbedaan pandangan dalam model dualisme ekonomi di antara para peneliti.

Berkaitan dengan hal itu Gopinath *et al.* (1996) melakukan penelitian yang ternyata menghasilkan bahwa terdapat hubungan dan interaksi yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri. Mereka menemukan hubungan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan makanan. Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian akan diikuti dengan semakin murahnya harga *input* di sektor industri pengolahan makanan. Dan dengan semakin murahnya harga *input* tersebut, maka permintaannya akan mengalami peningkatan.

Sebaliknya Martin and Mitra (1998) melakukan penelitian terhadap pertumbuhan total produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri

dengan mempergunakan sampel besar dari banyak negara pada berbagai tingkat pembangunan ekonominya. Hasil penelitian mereka menunjukkan bahwa ternyata sektor pertanian lebih produktif dibandingkan sektor industri. Di samping itu diketahui pula bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas sektor industri. Hasil ini berlawanan dengan pandangan tradisional yang menyatakan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan sektor pertanian. Hasil-hasil penelitian yang semacam ini akan sangat berguna sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan yang akan diambil oleh pihak otoritas pembangunan. Sebab jika tidak teliti dan hati-hati akan terjadi kesalahan yang sangat besar jika dilakukan investasi besar-besaran terhadap salah satu sektor yang ternyata "kurang produktif" bagi kehidupan masyarakatnya jika dibandingkan dengan sektor yang lain.

Perdebatan tentang pilihan terhadap pengembangan sektor pertanian ataukah pengembangan sektor industri dalam penetapan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi juga mewarnai perdebatan otoritas pembuat kebijakan pembangunan di Indonesia saat merancang strategi dan kebijakan pembangunan Indonesia pada Tahun 1970-an, yaitu ketika menyusun dokumen rencana pembangunan lima tahunan yang pertama (REPELITA 1). Memperhatikan hasil-hasil penelitian, bahwa pada akhirnya para perancang strategi dan kebijakan pembangunan nasional pada saat itu mencoba mengakomodir perbedaan pendapat dengan menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan yang

menekankan pembangunan sektor pertanian dan sektor industri yang mendukung sektor pertanian. Dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang seperti ini, diharapkan *out-come* pembangunan akan berjalan sesuai dengan konsep tahap-tahap pertumbuhan seperti yang dikemukakan oleh Rostow (1960). Hingga tahun 1996, pembangunan ekonomi yang dilaksanakan rejim Orde Baru menunjukkan berbagai keberhasilan yang spektakuler. Pertama, pertumbuhan ekonomi, khususnya sektor industri manufaktur sangat tinggi yaitu rata-rata sekitar 7 persen per tahun selama periode 1968-1996. Pertumbuhan yang demikian tinggi telah berhasil mengangkat posisi Indonesia sebagai salah satu negara industri baru dan disebut pula sebagai negara macan ekonomi Asia (*Asian economic tiger*). Kedua, jumlah penduduk miskin absolut menurun tajam dari 54,2 juta orang atau 40,1 persen dari total penduduk pada tahun 1976 menjadi 22,5 juta orang atau 11,4 persen dari total penduduk pada tahun 1996. Ketiga, walaupun krisis pangan temporer masih terjadi secara lokal dan sporadis, secara nasional ketahanan pangan cukup mantap. Indonesia telah berhasil meningkatkan produksi beras dengan spektakuler, sehingga statusnya berubah dari negara importir beras terbesar di dunia menjadi negara berswasembada, bahkan eksportir beras. Keempat, stabilitas ekonomi cukup mantap, masalah hiper inflasi dan kontraksi ekonomi tidak pernah terjadi lagi. Namun demikian, keberhasilan tersebut ternyata tidak berkelanjutan (*unsustainable*). Pada pertengahan tahun 1997 hingga pertengahan tahun 1999 Indonesia jatuh dalam krisis ekonomi akut yang kemudian berkembang menjadi krisis multi dimensi sosial ekonomi-politik, sehingga rejim Orde Baru sendiri mengalami keruntuhan. Banyak yang menduga salah satu penyebab

kondisi tersebut adalah terdapatnya ketidak sesuaian antara konsep-konsep Repelita-repelita tersebut dengan implementasi kebijakannya. Realitasnya, sektor industri mendapat porsi yang utama dibandingkan sektor pertanian. Yang terjadi adalah memang pertumbuhan ekonomi pada selama masa periode pemerintahan Orde Baru tersebut sangat fantastik. Sektor industri telah menggeser dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDB Indonesia. Tetapi belakangan diketahui bahwa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi tersebut serta terjadinya perubahan struktur perekonomian Indonesia, ternyata tidak diikuti oleh terjadinya realokasi tenaga kerja dari sektor yang mempunyai produktivitas rendah (sektor pertanian) ke sektor yang mempunyai produktivitas tinggi (sektor industri). Dengan kata lain selama masa pemerintahan Orde Baru tersebut, *out-come* pembangunan ekonominya mengandung sindroma pertumbuhan tanpa transformasi struktural (*growth without structural transformation*), yang mengakibatkan perekonomian dalam kondisi yang rentan dalam menghadapi goncangan-goncangan. Dalam hal ini terbukti ketika terjadi krisis ekonomi yang menyebabkan kejatuhan pemerintahan Orde Baru pada Tahun 1998 yang kemudian dilakukan reformasi-reformasi secara besar-besaran di berbagai bidang.

Sebagai hasil reformasi pada Tahun 1998, sentralisasi yang dominan dengan wewenang pemerintahan utama di tangan Pemerintah Pusat kini bergeser dengan desentralisasi ke Pemerintahan Daerah. Hal ini akan menimbulkan beberapa perubahan yang penting yang merupakan tonggak perubahan dalam strategi dan kebijakan pembangunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru. Pertama, sistem pemerintahan yang dulunya

sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan dikeluarkannya undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian diperbaharui dengan undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan undang-undang 33 Tahun 2004, membawa angin segar guna tercapainya otonomi daerah. Otonomi ini berarti memerintah sendiri atau mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Kedua, berkaitan dengan itu, sistem perencanaan pembangunan yang dulunya *top-down blueprint*, sekarang menjadi *bottom-up learning*. Ketiga, pendekatan pembangunan yang dulunya mengarah pada pembangunan sektoral, sekarang mengarah pada pendekatan pembangunan regional (wilayah).

Paradigma pembangunan neo-klasik yang berbasis pada produksi (*production centered development*) dan distribusi (*distributions centered development*) pada akhirnya bergeser menjadi pembangunan yang berbasis pada rakyat (*people centre development*) serta yang berbasis partisipasi rakyat (*based participations development*), yang selanjutnya dikenal dengan strategi dan kebijakan pembangunan yang berbasis pada pemberdayaan masyarakat. Pada kondisi yang seperti ini, Pemerintah Daerah akan menjadi ujung tombak dalam setiap implementasi strategi dan kebijakan pembangunan nasional. Artinya keberhasilan dalam implementasi strategi dan kebijakan pembangunan nasional akan sangat ditentukan oleh keberhasilan dalam implementasi strategi dan kebijakan pembangunan daerah. Dengan demikian, jika pada masa sebelum reformasi semua perencanaan ditentukan dari pusat dan pemerintahan di

daerah hanya bertindak sebagai operator saja (*top-down blueprint*). Tetapi untuk saat ini pemerintahan di daerah dengan segala otonomi yang dimiliki, di samping sebagai operator pembangunan juga bertindak sebagai inisiator pembangunan (*bottom-up learning*).

Meskipun semua rencana induk pembangunan ditentukan oleh Pemerintah Pusat, tetapi Pemerintah Daerah diberi keleluasaan untuk menentukan sendiri rencana strategis pembangunannya dengan mengacu pada permasalahan-permasalahan strategis yang dihadapi secara spesifik oleh masing-masing daerah. Implikasi dari semua ini adalah bahwa keberhasilan pembangunan nasional akan sangat dipengaruhi oleh kreativitas dari masing-masing daerah untuk menterjemahkan semua rencana induk pembangunan dari Pemerintah Pusat yang didasarkan atas permasalahan spesifik masing-masing daerah.

Berdasarkan penjelasan-penjelasan tersebut, studi ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, semasa 2001 s.d 2006 memasuki otonomi daerah. Sejauh ini sebagai implikasi dari penetapan Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu zona pengembangan industri dalam kerangka tata ruang nasional, pengembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur mengalami perkembangan yang sangat signifikan. Sejak akhir PELITA V Tahun 1993 s.d 1998 (tahun berakhirnya Pemerintahan Orde Baru) sektor industri merupakan sektor unggulan dari Provinsi Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan sektor industri mencapai rata-rata 5,08% per tahun selama periode tersebut, dibandingkan sektor pertanian yang hanya tumbuh sebesar rata-rata 0,40% per tahun pada periode yang sama.

Komposisi sektoral dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Provinsi Jawa Timur semakin didominasi oleh sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran meninggalkan sektor pertanian. Kontribusi sektor industri yang semula 25,18% pada Tahun 1993 semakin meningkat menjadi 27,77% pada akhir Tahun 1998. Demikian juga dengan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang semula 20,37% pada tahun 1993 menjadi 20,90% pada Tahun 1998, dengan tingkat pertumbuhan sektoral rata-rata sebesar 3,16% pada periode 1993 s.d 1998. Sebaliknya sektor pertanian yang semula kontribusinya terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur sebesar 19,67% pada Tahun 1993, dan malah mengalami penurunan menjadi 18,09% pada Tahun 1998.

Perkembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama periode pembangunan sebelum era otonomi daerah tersebut memberi dampak yang positif terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur. Tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode Tahun 1993 s.d 1997 yang sempat mencapai 7,17% rata-rata per tahunnya, dan pada waktu terjadi krisis ekonomi Tahun 1998 pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur mengalami penurunan hingga mencapai -16,12%, sehingga tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur selama periode 1993 s.d 1998 hanya mencapai 2,51% rata-rata per tahun. Dengan kondisi yang seperti itu tingkat pendapatan per kapita masyarakat Provinsi Jawa Timur yang semula sebesar Rp 1.341.443,93 pada Tahun 1993 hanya meningkat menjadi sebesar Rp 1.422.134,11 pada Tahun 1998.

Meskipun demikian, hasil-hasil ini tidak segera dapat mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa

Timur. Seperti halnya yang terjadi pada level nasional, strategi dan kebijakan pembangunan pada era sebelum otonomi daerah (masa Pemerintahan Orde Baru) menyisakan sejumlah persoalan. Apa yang disinyalir dengan terjadinya sindroma pertumbuhan tanpa transformasi struktural (*growth without structural transformation*) yang dinyatakan dengan adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti terjadinya perubahan komposisi sektoral PDRB secara drastis dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri, tetapi di lain pihak komposisi tenaga kerja tetap didominasi sektor pertanian yang berakibat titik balik transformasi struktural (*structural transformation turning point*) tidak pernah tercapai, terjadi juga di Provinsi Jawa Timur, bahkan setelah era otonomi daerah ini, daerah diberi kebebasan untuk menetapkan sendiri strategi dan kebijakan pembangunan daerahnya, arah strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur belum menunjukkan adanya perubahan yang signifikan. Yang terjadi adalah semakin dominannya sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran yang mengakibatkan kontribusi sektor pertanian semakin tertinggal jauh oleh kedua sektor tersebut.

Selama Tahun 2001 s.d 2006, kontribusi sektor industri malah mencapai rata-rata 28,33% dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mencapai rata-rata 27,14%, sebaliknya kontribusi sektor pertanian masih tidak beranjak dari angka 18%, tepatnya 18,44% rata-rata per tahun. Ketika terjadinya transformasi struktural seperti yang telah ditunjukkan data dan informasi tersebut, yang tidak disertai dengan terjadinya

mobilitas tenaga kerja antar sektor, maka yang terjadi adalah tingginya tingkat pertumbuhan ekonomi tetapi tidak disertai dengan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya, karena ketimpangan pendapatan dalam masyarakat akan semakin mencolok.

Fenomena ini sebenarnya sangat disadari oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur seperti yang telah dinyatakan dalam dokumen RPJMD Provinsi Jawa Timur Tahun 2005 s.d 2008, yaitu : performa kinerja perekonomian Provinsi Jawa Timur sampai saat ini sebenarnya telah menunjukkan adanya transformasi struktural dari sektor primer ke sektor sekunder, namun transformasi struktural ini masih semu dikarenakan belum diikuti oleh mobilitas tenaga kerja dari sektor primer ke sektor sekunder. Sebagai ilustrasi, bahwa dominasi kontribusi perekonomian sektor industri yang mencapai 24,62% hanya menyerap 12,19% dari tenaga kerja yang ada, sedangkan sektor pertanian yang memberikan kontribusi terhadap struktur perekonomian sebesar 16,47%, pada tahun yang sama, tenaga kerja yang bekerja di sektor ini mencapai 48,83%. (RPJMD Provinsi Jawa Timur 2006 s.d 2008 : 21). Hal ini lebih banyak disebabkan karena terdapatnya faktor penghambat dalam proses transformasi struktural sektor industri dan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari masalah ketidak sesuaian faktor *endowment* Provinsi Jawa Timur, di antaranya adalah belum siapnya sumber daya yang dibutuhkan oleh sektor industri di Provinsi Jawa Timur. Rata-rata pendidikan masyarakat di Provinsi Jawa Timur masih relatif rendah. Dan oleh sebab itu, untuk mencukupi tenaga kerja di sektor

industri pertambahan tenaga kerja sebagian besar berasal dari luar Provinsi Jawa Timur. Sehingga dalam lingkup Provinsi Jawa Timur proses transformasi struktural antara sektor pertanian dengan sektor industri tidak dapat berlangsung.

Selain itu secara umum perkembangan industri-industri yang ada di Provinsi Jawa Timur selama ini, dalam kenyataannya bukanlah jenis-jenis industri yang mempunyai sifat baik dalam hal ini "*backward linkages*" maupun "*forward linkages*" dengan sektor pertanian (kecuali PT. Petrokima-Gresik meskipun produknya diatur dalam tata niaga nasional). Perkembangan industri yang ada di Provinsi Jawa Timur lebih cenderung pada industri-industri berat yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan dan industri yang mempunyai intensitas penggunaan lahan yang besar (misalnya *property*). Sehingga dengan demikian menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pertanian. Bentuk-bentuk konflik ini dapat dilihat dengan adanya banyak kasus petani tambak dengan sektor industri, di mana sektor-sektor industri yang ada ternyata menciptakan pencemaran kepada lahan-lahan petani tambak, di samping semakin berkurangnya lahan-lahan pertanian karena "digusur" untuk lahan industri dan permukiman dalam rangka melayani sektor industri. Lebih dari itu lokasi-lokasi sektor industri yang berdekatan dengan permukiman, ternyata memberikan ancaman yang cukup signifikan bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur (ingat kasus meledaknya Pabrik PT. Petrowidada dan kebocoran tabung amonia PT. Petrokimia Gresik serta kasus Lapindo di Sidoarjo).

Selanjutnya keberadaan industri-industri yang hanya berkembang di wilayah pantai utara Provinsi Jawa Timur, tidak memberikan kontribusi yang berarti terhadap sebagian besar masyarakat Provinsi Jawa Timur yang hidup di pedesaan dan hidup dari sektor pertanian, dan hal ini justru menciptakan perbedaan tingkat kesejahteraan yang semakin mencolok antara masyarakat perkotaan yang bekerja di sektor industri dengan masyarakat pedesaan yang bekerja di sektor pertanian.

Berdasarkan pada kenyataan-kenyataan seperti ini, maka ketika Pemerintah Provinsi Jawa Timur diberi kewenangan untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan di era otonomi daerah ini, kiranya sangat wajar untuk mempertanyakan kembali apakah strategi dan kebijakan pembangunan pada era otonomi daerah yang masih menekankan pengembangan sektor industri katimbang sektor pertaniannya sudah tepat guna dan sesuai bagi masyarakat Provinsi Jawa Timur yang sebagian besar penduduknya hidup di pedesaan dan bekerja di sektor pertanian?. Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka kiranya perlu untuk menguji dan menganalisis bagaimana pengaruh perkembangan sektor pertanian dan sektor industri dalam konteks pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, selanjutnya memperbandingkan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri di Provinsi Jawa Timur serta peranan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur dalam aspek penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan serta peranannya dalam pembangunan di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penelitian ini mengambil judul "Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Dan Industri

Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat Di Provinsi Jawa Timur”.

Berdasarkan judul penelitian tersebut, maka penelitian ini akan menjelaskan pengaruh sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur yang diukur dari pengaruh kedua sektor tersebut terhadap tingkat pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, serta pengaruhnya terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Jawa Timur. Dengan diketahuinya peranan dan pengaruh kedua sektor dalam mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, maka dapat dilakukan evaluasi terhadap pilihan sektor pertanian ataupun sektor industri yang nantinya dipergunakan sebagai sektor penggerak perekonomian Provinsi Jawa Timur dalam kerangka strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ke depan, sebab kalau memperhatikan seluruh penjelasan di atas, sampai sejauh ini pengaruh pertumbuhan sektor industri di Provinsi Jawa Timur memang telah meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur yang cukup tinggi, tetapi bersamaan dengan itu, daya serap terhadap tenaga kerjanya rendah. Sehingga hal itu membawa akibat yang tidak menguntungkan dalam upaya pemerataan pendapatan dalam masyarakat. Di samping itu pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini

mengakibatkan semakin terdesaknya keberadaan sektor pertanian yang merupakan "mata pencaharian" bagi mayoritas penduduk Provinsi Jawa Timur, sehingga menyebabkan tingkat pendapatan bagi mayoritas penduduk Provinsi Jawa Timur malah menjadi menurun. Dengan demikian dapatlah dikatakan bahwa pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini memang telah mempengaruhi keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur tetapi belum memberikan pengaruh yang signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan seluruh masyarakat Provinsi Jawa Timur. Bagaimana dengan pembangunan sektor pertanian?. Secara teoritis, tingkat produktivitas sektor pertanian memang harus diakui lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Dan oleh karena itulah, banyak yang menilai bahwa pengaruh sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat relatif lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Tetapi dengan berdasarkan pada konsep bahwa pembangunan harus memanfaatkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah, maka sebaiknya pembangunan di Provinsi Jawa Timur haruslah berbasis pada pembangunan sektor pertanian, karena sebenarnya potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Provinsi Jawa Timur ini adalah di sektor pertanian. Namun demikian, bagaimanapun juga haruslah dilakukan pengkajian yang lebih cermat tentang pengaruh sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasar latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan judul penelitian, maka disusun rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur ?
2. Apakah pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur ?
3. Apakah pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur?
4. Apakah pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur ?
5. Apakah keberhasilan pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur ?

1.3 Tujuan Studi

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan, maka tujuan yang ingin dicapai dalam studi ini adalah :

1. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.

3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
4. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
5. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh keberhasilan pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

1.4 Manfaat Studi

Manfaat yang ingin dicapai dalam studi ini berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dan tujuan studi adalah sebagai berikut :

1. Hasil studi ini dapat dipergunakan sebagai dasar acuan untuk menetapkan strategi kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur yang akan diputuskan. Seperti yang telah dijelaskan, bahwa penetapan strategi kebijakan pembangunan dengan menitik beratkan pada prioritas pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur kenyataannya belum mampu memberikan hasil yang optimal bagi meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Dengan membandingkan peran sektor pertanian dan industri nantinya akan dapat diketahui sektor basis yang mana yang dapat dijadikan pijakan bagi penetapan strategi dan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur.
2. Ditinjau dari aspek pengembangan ilmu ekonomi pembangunan, studi ini diharapkan dapat memberi sumbangan pemikiran kepada pengembangan model dualisme ekonomi terutama dalam aspek

implementasinya. Sejak Lewis menulis tentang model dualisme, model ini mendapat tanggapan yang besar dari para ahli ekonomi pembangunan, baik dalam konteks teorinya maupun dalam aspek implementasinya. Model ini secara substansi mempertentangkan peranan antara sektor pertanian dan sektor industri dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Berkaitan dengan hal itu, sampai saat ini tidak ada kata sepakat dari para ahli ekonomi pembangunan ekonomi. Sebagian ahli menyatakan bahwa sektor pertanian lebih berperan dalam pembangunan ekonomi dibandingkan sektor industri (*agricultural fundamentalism*). Sebaliknya, sebagian ahli menyatakan bahwa sektor industri lebih berperan dibandingkan dengan sektor pertanian (*industrial fundamentalism*). Dalam konteks Provinsi Jawa Timur, penelitian ini akan menghasilkan sektor mana yang lebih berperan dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga dapat dipergunakan sebagai bahan pertimbangan untuk menetapkan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ke depan.

3. Bagi studi-studi selanjutnya, diharapkan dari hasil studi ini dapat memberikan sumbangan pemikiran pada studi-studi yang sejenis yang akan dilakukan. Hasil penelitian yang nantinya diperoleh akan mempertegas posisi peranan sektor pertanian dan sektor industri dalam kerangka pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur sampai saat ini. Berdasarkan kondisi tersebut, hasil ini akan dapat dijadikan pedoman untuk pelaksanaan-pelaksanaan penelitian sejenis pada daerah lain dan bahkan untuk Indonesia.

BAB 2

TINJAUAN PUSAKA

2.1 Landasan Teori

Landasan teori dari studi ini pada intinya adalah didasarkan pada teori pembangunan ekonomi, karena pada hakikatnya tujuan pokok dari studi ini berkaitan dengan implementasi pembangunan ekonomi regional Provinsi Jawa Timur. Oleh karena itu, dalam konteks ini penjelasan-penjelasan teori pembangunan ekonominya berkisar pada penjelasan terhadap tujuan dan pengertian pembangunan ekonomi, model-model dan teori-teori pembangunan ekonomi yang selama ini berkembang. Dengan penjelasan ini diharapkan dapat memberi kesamaan pemahaman dan interpretasi terhadap berbagai fenomena pembangunan ekonomi yang selama ini berkembang, serta dalam kontelasi pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

Selanjutnya, berdasarkan hal itu dan tujuan pokok studi ini, agar tercapai kesamaan pemahaman dan interpretasi keberhasilan pembangunan yang diukur dari pertumbuhan ekonominya dan kesejahteraan masyarakat yang diukur dari Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka perlu dijelaskan pula konsep-konsep tentang teori pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan (*welfare economy*).

Perlu dikemukakan juga, bahwa studi ini berhubungan dengan pengaruh pembangunan sektor pertanian dan sektor industri terhadap keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur serta meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya, maka landasan teori yang juga dibahas



berikut ini adalah penjelasan terhadap konsep-konsep pembangunan sektor pertanian dan industri, terutamanya dalam kaitannya dengan tinjauan teoritis pengaruh ke dua sektor tersebut terhadap pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat. Serta interaksi kedua sektor tersebut dalam pembangunan ekonominya.

Dari aspek dimensi waktu, pada hakikatnya studi ini menjelaskan kondisi sebelum otonomi daerah dan sesudah otonomi daerah. Perbedaan dimensi waktu ini, mengandung implikasi yang berbeda terhadap perencanaan pembangunan ekonomi, terutama dalam hal mekanisme perencanaan pembangunannya. Pada saat sebelum otonomi daerah perencanaan pembangunan di Indonesia dipusatkan pada pemerintah pusat (sentralisasi), yang dikenal dengan konsep "*top-down planning*". Ketika otonomi daerah, perencanaan pembangunan dilakukan dengan mekanisme desentralisasi (*bottom-up planning*). Oleh karena itu dalam landasan teori ini perlu dijelaskan pula keterkaitan otonomi daerah dengan pembangunan ekonomi daerah (regional).

Pada akhirnya, untuk mengkonfirmasi hasil studi ini dibandingkan dengan studi-studi sejenis yang sudah ada, nantinya perlu juga dikemukakan hasil-hasil studi yang sudah dilakukan oleh para ahli yang berhubungan dengan peranan kedua sektor dalam pembangunan ekonomi.

2.1.1 Tujuan Dan Pengertian Pembangunan Ekonomi

Tujuan akhir dari setiap pembangunan ekonomi adalah semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, pada awalnya,

capaian hasil sebuah pembangunan ekonomi adalah diukur melalui semakin meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan semakin meningkatnya pendapatan riil per kapita masyarakatnya. Semakin tinggi pertumbuhan ekonominya dan pendapatan per kapita riil, mengindikasikan semakin meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Tidak mengherankan jika kemudian pengertian pembangunan ekonomi pada saat itu, diartikan sebagai upaya meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan riil per kapita secara terus menerus yang diikuti dengan terjadinya perubahan struktur ekonominya. Berdasarkan hal ini, sering kali pengertian pembangunan ekonomi dibedakan dengan perkembangan ekonomi. Kalau pembangunan ekonomi disertai dengan terjadinya perubahan struktur ekonominya, tetapi kalau perkembangan ekonomi tidak disertai dengan terjadinya perubahan struktur ekonominya (Meir, 1970 : 7).

Namun demikian dalam perkembangannya, banyak negara yang melakukan pembangunan ekonominya yang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dan semakin meningkatnya pendapatan per kapita riil yang disertai dengan terjadinya perubahan struktur ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri, tetapi tidak serta merta mengindikasikan meningkatnya kesejahteraan masyarakatnya. Meskipun pendapatan riil per kapita masyarakat meningkat, tetapi peningkatan pendapatan riil tersebut dinikmati oleh sebagian kecil masyarakat, sehingga yang semakin sejahtera adalah sebagian kecil masyarakat saja. Sebab bagaimanapun juga konsep untuk menghitung pendapatan per kapita adalah Produk Domestik Bruto (PDB) dibagi dengan jumlah

penduduk. Berdasarkan konsep ini maka tinggi rendahnya pendapatan per kapita akan sangat tergantung dari pertumbuhan PDB (pertumbuhan ekonomi) dan pertumbuhan jumlah penduduk. Di samping itu, ukuran pendapatan riil per kapita tidak dapat menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan, karena hal itu sangat tergantung dari pola distribusi pendapatan dalam masyarakat. Semakin tidak merata pola distribusi pendapatan dalam masyarakat, semakin tidak mampu konsep pendapatan per kapita riil menjelaskan tentang kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain, tingginya pendapatan per kapita riil tidak serta merta mengindikasikan kesejahteraan masyarakat. Yang harus dilihat lebih jauh lagi adalah pola distribusinya. Atau Todaro menyebut sebagai “Redistribusi Kemakmuran” yang merupakan pandangan baru ekonomi pembangunan yang dipelopori oleh Prof. Dudley Seers. (Todaro, 2000 : 18–19). Bersamaan dengan itu, makna pembangunan ekonomi mengalami redefinisi, yaitu tujuan utama dari usaha-usaha pembangunan ekonomi menurut pandangan ini adalah bukan lagi menciptakan tingkat pertumbuhan ekonomi (pertumbuhan PDB) yang setinggi-tingginya, melainkan penghapusan tingkat kemiskinan, penanggulangan ketimpangan pendapatan, dan penyediaan lapangan kerja dalam konteks perekonomian yang terus berkembang.

Berdasarkan penjelasan tersebut, banyak ahli ekonomi memperkenalkan ukuran baru dari tingkat kesejahteraan masyarakat yaitu di samping pertumbuhan ekonominya, pendapatan per kapita riil, yang tidak kalah penting juga adalah distribusi pendapatan dalam masyarakat

yang diukur melalui Gini Ratio/Gini Index. Berkaitan dengan hal itu, dalam beberapa dasa warsa yang lalu, dalam teori-teori ekonomi pembangunan kemudian muncul perdebatan antara titik berat pertumbuhan (*growth*) dan pemerataan (*equity*) dalam sebuah pembangunan ekonomi. Artinya, apakah prioritas pembangunan ekonomi lebih mementingkan *out-come* pertumbuhan ekonomi dibandingkan pemerataan pendapatannya atau sebaliknya. Munculnya perdebatan ini, dihubungkan dengan pilihan sektor-sektor ekonomi yang akan dikembangkan terlebih dahulu (*leading sector*) dalam suatu upaya pembangunan ekonomi. Basis strategi pembangunan dengan mempergunakan *leading sector* ini didasarkan atas perkembangan teori pembangunan yang tidak seimbang yang diperkenalkan oleh Hirschman (1958).

Beberapa referensi, pilihan *leading sector* dalam pembangunan ekonomi, biasanya antara sektor pertanian (*agricultural fundamentalism*) dan sektor industri (*industrial fundamentalism*). Jika pilihan *leading sector* nya adalah sektor pertanian, maka *out-come* pembangunan ekonominya akan cenderung menghasilkan pemerataan pendapatan daripada pertumbuhan ekonominya. Sebaliknya jika pilihan *leading sector* nya adalah sektor industri, maka *out-come* pembangunannya akan cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan pemerataan pendapatan masyarakat. (Yotopoulos and Nugent, 1976:13) Pertentangan antara sektor pertanian dengan industri ini kemudian banyak melahirkan teori-teori dan penelitian-penelitian yang bersifat menjelaskan interaksi antara kedua sektor tersebut.

Dari aspek studi teorinya, ahli-ahli ekonomi pembangunan yang memperkenalkan interaksi kedua sektor tersebut adalah: Lewis (1965), Fei and Ranis (1964) dengan teori Dualisme, Nurkse (1964) dengan teori Pertumbuhan Berimbang, Hirschman (1958) dengan teori Pertumbuhan Tidak Berimbang, Rostow (1960) dengan teori Tahap-tahap Pertumbuhan, Rosenstein and Rodan (1970), Perroux (1957) dengan teori Pusat-pusat Pertumbuhan serta Myrdal (1957) dengan teori Sebab-Akibat.

Dari aspek studi empiriknya ahli-ahli ekonomi pembangunan yang melakukan penelitian tentang interaksi kedua sektor tersebut adalah : Gopinath *et al.* (1996); Kuznet (1971); Martin, W. and Warr, P.G. (1993); Chenery and Taylor (1968); Lane and Robertson (2003); Martin and Mitra (1998); Syrquin (1986); Jogersen *et al.* (1987); Lewis *et al.* (1988); Temple and Wobmann (2004).

Studi ini bertujuan menjelaskan pengaruh pertumbuhan kedua sektor tersebut dalam konteks keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan hal itu, maka teori-teori yang relevan untuk dijelaskan adalah berhubungan dengan konsep dan teori pertumbuhan ekonomi, konsep kesejahteraan masyarakat, peranan sektor pertanian dan industri dalam keberhasilan pembangunan daerah.

2.1.2 Teori Pertumbuhan

Dalam teori-teori ekonomi pembangunan terdapat beberapa teori besar (*grand theories*), yang menjelaskan tentang pertumbuhan pada umumnya dibagi dalam beberapa kelompok teori yaitu teori pertumbuhan

klasik, teori pertumbuhan keynesian, teori pertumbuhan neo-klasik serta teori pertumbuhan modern.

2.1.2.1 Teori Pertumbuhan Klasik

Teori klasik dalam pembangunan ekonomi adalah teori dari pertumbuhan ekonomi tanpa kemajuan teknologi (*technical progress*). Pelopor dari Teori Ekonomi Pembangunan Klasik ini adalah Smith, yang juga dikenal sebagai Bapak Ilmu Ekonomi. Dalam bukunya yang berjudul "*An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth of Nations*", Smith menyatakan bahwa pertumbuhan produksi (*out-puf*) dapat dicapai jika dilakukan metode kerja dengan "*division of labor*". Dengan *division of labor* ini akan mengakibatkan meningkatnya keahlian dan ketrampilan kerja serta kemampuan pekerja untuk melakukan apa yang harus dilakukan, sehingga dengan demikian secara keseluruhan, dengan "*division of labor*" ini akan meningkatkan produktivitas pekerja. Dan dengan tingginya produktivitas tenaga kerja, maka akan tercapai *out-put* yang tinggi dalam perekonomian yang pada akhirnya akan meningkatkan kemakmuran suatu negara. (Hagen, 1980:72-73)

Menurut Smith, unsur pokok dari sistem produksi suatu negara ada tiga yaitu : 1. Sumber daya alam yang tersedia (faktor produksi tanah); 2. Sumber daya insani (jumlah penduduk); 3. Stok barang modal yang ada.

Sumber Daya Alam

Sumber daya alam (Faktor produksi tanah : lahan sawah sempit, lahan sawah luas, lahan kering sempit, lahan kering luas, lahan gambut, lahan marjinal, lahan dalam *agroforestry*, lahan perkebunan), yang

tersedia merupakan wadah yang paling mendasar dari kegiatan produksi suatu masyarakat. Jumlah sumber daya alam yang tersedia merupakan "batas maksimum" bagi pertumbuhan suatu perekonomian. Maksudnya, jika sumber daya alam ini belum digunakan sepenuhnya, maka jumlah penduduk dan stok modal yang ada yang memegang peranan dalam pertumbuhan *out-put*. Tetapi pertumbuhan *out-put* tersebut akan berhenti jika semua sumber daya alam tersebut telah digunakan secara penuh.

Sumber Daya Insani

Sumber daya insani (Jumlah penduduk : petani, buruh tani, pengusaha pertanian, pengepul, pedagang, eksportir, importer, pengusaha saprotan, pedagang saprotan, pemerintah, perguruan tinggi dan lembaga penelitian, perbankan), mempunyai peranan yang pasif dalam proses pertumbuhan *out-put*. Maksudnya jumlah penduduk akan menyesuaikan diri dengan kebutuhan akan tenaga kerja dari suatu masyarakat.

Stok Barang Modal

Stok barang modal (Permodalan usaha pertanian : modal seadanya, modal lemah, modal kuat, modal dengan skema perbankan), yang ada merupakan unsur produksi yang secara aktif menentukan tingkat *out-put*. Peranannya sangat sentral dalam proses pertumbuhan *out-put*. Jumlah dan tingkat pertumbuhan *out-put* tergantung pada laju pertumbuhan stok barang modal (sampai batas dari sumber daya alam) (Arsyad, 1999 : 55 -56).

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka menurut Smith, faktor yang paling menentukan dalam pertumbuhan ekonomi suatu negara adalah faktor stok modal dan sumber daya alam. Jika sumber daya alam tersedia, maka faktor stok barang modal menjadi faktor yang utama dalam mendorong pertumbuhan ekonomi suatu negara. Smith, mengabaikan peranan sumber daya insani, karena menurut Smith dengan metode kerja "*division of labor*" maka produktivitas tenaga kerja dapat ditingkatkan.

Tokoh lain dari pemikir ekonomi klasik selain Smith yang juga mengembangkan teori pertumbuhan adalah Ricardo. Pada hakikatnya, teori pertumbuhan ekonomi yang dikembangkan oleh Ricardo ini merupakan pengembangan dari teori pertumbuhan ekonomi yang telah dikembangkan oleh Smith. Hanya saja teori pertumbuhan ekonomi dari Ricardo ini lebih memperhitungkan faktor pertumbuhan penduduk yang mengakibatkan menjadi terbatasnya sumber daya alam yang tersedia. Karena analisis teori pertumbuhan Ricardo ini memusatkan perhatiannya pada sektor pertanian, maka dengan adanya pertumbuhan jumlah penduduk, jumlah tenaga kerja akan meningkat, di sisi yang lain dengan jumlah lahan pertanian yang tetap, maka penambahan tenaga kerja di sektor pertanian akan menurunkan jumlah produksi (*out-put*) di sektor pertanian. Dengan kata lain Ricardo menyatakan bahwa dengan terbatasnya luas tanah, maka pertumbuhan penduduk (tenaga kerja) akan menurunkan produk marginal (*marginal product*) yang dikenal dengan istilah "*the law of diminishing marginal product*". Artinya dengan jumlah tanah yang tetap, adanya penambahan jumlah tenaga kerja secara terus

menerus, pada suatu tingkat tertentu akan menurunkan jumlah pertambahan *out-put* nya. Dari aspek tingkat upahnya, maka petambahan jumlah penduduk akan meningkatkan *supply* tenaga kerja. Dengan semakin banyaknya jumlah tenaga kerja yang tersedia, maka hal ini akan cenderung mendorong menurunnya tingkat upah tenaga kerja. (Hagen, 1980 : 75-76). Sumbangan pemikiran terbesar dari Ricardo dalam teori pertumbuhan ekonomi ini adalah pengembangan tentang hukum kenaikan hasil berkurang (*the law of diminishing marginal product*) seperti yang telah dijelaskan.

2.1.2.2 Teori Pertumbuhan Keynesian

Teori pertumbuhan keynesian ini sangat bertentangan dengan teori pertumbuhan klasik yang mengasumsikan bahwa perekonomian dalam pengerjaan penuh (*full-employment*). Teori pertumbuhan Keynesian ini mengasumsikan bahwa perekonomian dalam kondisi pengerjaan tidak penuh. Kontribusi terbesar pengikut Keynesian yang menjelaskan tentang teori pertumbuhan ini adalah Roy F Harrord and Evsey D Domar. Teori pertumbuhan yang diperkenalkan oleh Harrord and Domar, atau dikenal dengan model pertumbuhan Harrord and Domar ini mendasarkan pada teori-teori ekonomi makro yang dibangun oleh Keynes.

Model pertumbuhan ekonomi dari Harrord and Domar ini bermula dari besar kecilnya investasi yang ada dalam perekonomian. Jika dana yang tersedia untuk investasi ini berasal dari tabungan, maka menurut Harrord and Domar, tingkat pertumbuhan ekonomi dari suatu perekonomian akan tergantung dari :

- a. Besarnya tingkat tabungan masyarakat dan rasio tabungan.
- b. Besarnya produktivitas investasi atau *capital-output ratio* (COR) dalam perekonomian.

Berdasarkan hal itu, maka model ini dapat dipergunakan pada berbagai macam tingkat kombinasi dari tabungan dan *capital out-put ratio* pada berbagai situasi yang berbeda, sehingga dengan demikian model ini dapat menentukan untuk mencapai suatu tingkat pertumbuhan pendapatan tertentu, berapa kebutuhan tingkat tabungan yang diperlukan berdasarkan struktur ekonomi yang ada. Di samping itu model ini juga dapat menentukan berapa besarnya *capital out-put ratio*, berdasarkan tingkat pertumbuhan pendapatan dan tingkat tabungan yang telah ada.

Secara matematis, bentuk sederhana dari model Harrod and Domar ini dapat dinyatakan dengan :

$$\Delta Y = 1/ICOR \cdot \Delta S$$

Di mana : ΔY adalah pertumbuhan pendapatan

$ICOR$ adalah *incremental capital out-put ratio*, atau tingkat perubahan COR

ΔS adalah tingkat tambahan tabungan

Dengan asumsi bahwa seluruh tambahan tabungan (ΔS) dipergunakan untuk menambah investasi (ΔI), maka $\Delta S = \Delta I$, sehingga persamaan di atas dapat dirubah menjadi : $\Delta Y = 1/ICOR \cdot \Delta I$

Implikasi model pertumbuhan ekonomi dalam konteks kebijakan pembangunan ekonomi adalah, bahwa untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka kebijakan pemerintah harus mengarah pada

peningkatan tabungan masyarakat dan mendorong penggunaan teknologi tinggi dalam rangka untuk menurunkan tingkat *capital out-put ratio* (COR). (Meier, 1970 : 688-689).

2.1.2.3 Teori Pertumbuhan Neo Klasik

Seperti teori pertumbuhan yang telah diperkenalkan oleh Ekonom klasik, teori pertumbuhan neo-klasik ini juga memusatkan perhatiannya kepada kontribusi dari tanah, tenaga kerja, modal terhadap produksi dan distribusi pendapatan melalui sewa tanah, upah dan keuntungan. Seperti halnya teori klasik, teori neo-klasik ini juga mengasumsikan dasar analisisnya bahwa perekonomian dalam kondisi pengerjaan penuh (*full employment*). Pada hakikatnya, teori pertumbuhan dari neo-klasik ini berkembang berdasarkan ketidak puasan terhadap teori pertumbuhan yang dibangun oleh Harrod and Domar. Oleh karena itu teori pertumbuhan yang kemudian dibangun oleh Solow and Swan yang termasuk pemikir neo-klasik ini merupakan perbaikan-perbaikan dari teori pertumbuhan Harrod and Domar.

Selanjutnya menurut Solow-Swan, akumulasi modal saja tidak cukup untuk menentukan tinggi rendahnya pertumbuhan ekonomi, lebih dari itu, tingkat produktivitas tenaga kerja harus diperhitungkan untuk mencapai tingkat pertumbuhan ekonomi yang diinginkan. Oleh karena itu Solow-Swan kemudian mengembangkan model Harrod and Domar dengan lebih menekankan pengaruh masing-masing faktor produksi terhadap pertumbuhan ekonomi. Model pertumbuhan ekonomi Neo-Klasik ini pada hakikatnya bentuk pembaharuan-pembaharuan dari ajaran klasik

yang mengasumsikan bahwa perekonomian akan tetap mengalami tingkat pengerjaan penuh (*full employment*) dan kapasitas peralatan modal akan tetap dipergunakan sepanjang waktu. Dengan kata lain sampai di mana perekonomian berkembang tergantung pada pertambahan penduduk, akumulasi modal dan kemajuan teknologi. Model pertumbuhan Neo-klasik ini diwakili oleh Solow-Swan. Sehingga model pertumbuhan ekonomi Neo-klasik ini dikenal dengan sebutan model pertumbuhan ekonomi Solow-Swan atau juga dikenal dengan *Exogenous Growth Model*.

Tidak seperti model pertumbuhan ekonomi dari Harrod and Domar yang memandang besarnya tingkat tabungan ditentukan oleh tingkat pertumbuhan, pendapat dari Solow-Swan memandang tingkat tabungan ditentukan hanya oleh tingkat pendapatan. Selain itu tidak seperti Harrod and Domar juga yang menyatakan bahwa *COR* adalah bersifat eksogen, sebaliknya Solow-Swan ini memandang bahwa *COR* dalam suatu perekonomian adalah merupakan faktor endogen, sehingga dia bisa cepat menyesuaikan dengan perubahan-perubahan dalam perekonomian.

Menurut model pertumbuhan Solow-Swan ini, pertumbuhan ekonomi akan tergantung dari pertambahan penyediaan faktor-faktor produksi (penduduk, tenaga kerja, dan akumulasi modal) dan tingkat kemajuan teknologi. Berdasarkan penelitian Solow, faktor kemajuan teknologi peranannya sangat tinggi dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Arsyad, 1999).

Implikasi dari penjelasan-penjelasan teori pertumbuhan tersebut, bahwa pembangunan sektor industri akan lebih memacu pertumbuhan

ekonomi yang tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Banyak faktor yang mendukung hal itu, yang antara lain kemajuan teknologi di sektor industri lebih pesat dibandingkan dengan sektor pertanian, selain itu juga produktivitas modal dan tenaga kerja sektor industri jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, sehingga pembangunan sektor industri secara keseluruhan akan meningkatkan total produktivitas yang mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi. (Temple and Wobmann, 2004)

2.1.2.4 Teori Pertumbuhan Modern

Pada saat yang bersamaan, model-model dari strategi pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan akumulasi modal juga diperkenalkan oleh para ahli yang lain pada masa ini. Misalnya Lewis (1965), Fei and Ranis (1964) dengan teori Dualisme, Nurkse (1964) dengan teori Pertumbuhan Berimbang, Hirschman (1958) dengan teori Pertumbuhan Tidak Berimbang, Rostow (1960) dengan teori Tahap-tahap Pertumbuhan, Rosenstein and Rodan (1970), Perroux (1957) dengan teori Pusat-pusat Pertumbuhan serta Myrdal (1957) dengan teori Sebab-Akibat.

Pada umumnya model ini menyatakan bahwa perbedaan antara negara-negara maju dengan negara-negara yang sedang berkembang, hanyalah terletak pada perbedaan dalam derajat modernitas saja. Ukuran-ukuran yang biasa dipakai dalam mengukur derajat modernisasi ini adalah peralatan produksi, bantuan modal, transfer pengetahuan, sehingga dengan demikian negara-negara yang sedang berkembang akan dapat mencapai tahap sebagai negara industri sesegera mungkin.

Oleh karena itu, model-model ini lebih dikenal dengan Model Pertumbuhan Ekonomi Modernisme. Dalam model ini pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu kenaikan produksi dan efisiensi yang diukur terutama dari tingkat pendapatan per kapita.

Teori ini juga memandang bahwa faktor internal dalam suatu negara seperti rendahnya tingkat pendidikan, struktur pertanian tradisional, dan sikap tradisional dari penduduk, rendahnya spesialisasi kerja, kurangnya prasarana dan sarana komunikasi serta infrastruktur lainnya, adalah merupakan sebab-sebab dari keterbelakangan suatu negara. Selain itu pula mereka memandang bahwa perbedaan dalam struktur dan latar belakang suatu negara mempunyai pengaruh yang kecil terhadap keterbelakangan, di samping itu mereka juga mengabaikan adanya faktor ketergantungan dengan negara lain.

Model Modernisme ini selanjutnya dibagi 2 (dua) teori lagi yaitu: Teori Dualisme (*Dualism Theories*) dan Teori Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy Theories*), yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut:

A. Teori Dualisme (*Dualism Theories*)

Konsep dualisme mempunyai 4 unsur pokok yaitu :

1. Dua keadaan yang berbeda di mana suatu keadaan bersifat "superior" dan keadaan lainnya bersifat "inferior" yang bisa hidup berdampingan pada ruang dan waktu yang sama.
2. Kenyataan hidup berdampingan dua keadaan tersebut bersifat kronis dan bukan transisional. Perbedaan tersebut bukan merupakan

fenomena yang sementara akan hilang dengan sendirinya sejalan dengan berjalannya waktu.

3. Derajat superioritas atau inferioritas itu tidak menunjukkan kecenderungan yang menurun, bahkan terus meningkat.
4. Keterkaitan antara superior dan unsur inferior tersebut menunjukkan bahwa keberadaan unsur superior tersebut hanya berpengaruh kecil atau bahkan tidak berpengaruh sama sekali dalam mengangkat derajat unsur inferior. Bahkan kenyataannya, unsur yang superior tersebut sering kali justru menyebabkan timbulnya kondisi keterbelakangan (*under-development*). (Arsyad, 1999:251-252).

Berdasarkan konsep dualisme, maka Teori Dualisme ini mengasumsikan adanya perbedaan ekonomi dan struktur sosial dari masing-masing sektor, sehingga mereka akan berbeda secara organisasi, tingkat perkembangan, dan struktur tujuan (dualisme sosial; ekologis; teknologi; financial; dan dualisme regional). Biasanya konsep dari dualisme ekonomi ini menurut Boeke (1953 : 11) dibedakan antara 2 (dua) sektor ekonomi, yaitu :

1. Sektor tradisional yang bersifat subsisten yang terdiri dari pertanian skala kecil, kerajinan dan perdagangan skala kecil, yang mempunyai derajat penggunaan tenaga kerja tinggi tetapi rendah dalam penggunaan modal dan sedikit sekali adanya spesialisasi kerja.
2. Sektor modern yang bersifat industri yang menggunakan tenaga kerja sedikit tetapi menggunakan padat modal untuk produksi dan tingginya spesialisasi kerja.

Kedua sektor tersebut mempunyai hubungan yang saling mempengaruhi relatif sangat rendah. Perkembangan mereka sangat tergantung dari struktur mereka masing-masing. Sektor modern ini dapat menjadi kantong-kantong ekonomi dari negara-negara industri dan mereka mempunyai pengaruh yang sangat kecil terhadap pasar internal.

Beberapa penulis menekankan dualisme dengan faktor-faktor yang spesifik yang lain. Eckhaus (1955) misalnya, membedakan konsep dualisme menurut teknologi yang dipakai dalam suatu sektor (*technological dualism*), yaitu antara padat tenaga kerja dengan padat modal. Sedangkan Gannage (dalam Khunen, 1987) membedakan dualisme berdasarkan perbedaan antar regional yang disebabkan karena kurangnya prasarana dan sarana komunikasi dan pertukaran antar regional.

Pembangunan dalam konsep dualisme adalah penekanan terhadap sektor tradisional dengan lebih mengkonsentrasikan dan memperluas sektor modern. Pada saat itu berkembang anggapan bahwa konsep “efek menetes ke bawah” (*trickle down effect*) akan mengurangi dan menghapus dualisme. Dalam hal ini masalah utamanya adalah terletak pada kemampuan dalam “formasi modal”, hal itu akan menentukan derajat kecepatan dan ruang lingkup ekspansi sektor modern. Manakala hal ini sulit untuk dicapai, maka pilihan ekspansi sektor tradisional menjadi pilihan yang layak untuk dipertimbangkan, sebab bagaimanapun, pada sektor tradisional (biasanya sektor pertanian) tersedia cukup banyak Sumber daya tenaga kerja dan mungkin juga modal. Secara rinci,

pemilihan strategi antara sektor modern dan sektor tradisional bervariasi. Misalnya Lewis (1965) dan Fei and Ranis (1964) menyatakan bahwa penurunan dalam angkatan kerja di sektor pertanian yang disebabkan karena meluasnya pengangguran yang tidak kentara (*disguished unemployment*) dalam sektor ini tidak akan mengurangi produksi sektor pertanian. Tenaga kerja—tenaga kerja yang produktif dari sektor pertanian ini kemudian dipekerjakan dalam sektor modern, sehingga total produksi dalam perekonomian mengalami peningkatan. Dari sinilah kemudian diharapkan terjadinya proses “*trickle down effect*”. Tetapi menurut Lewis dan Fei and Ranis, dalam proses ini ternyata *trickle down effect* tidak pernah terjadi, sehingga mereka mengatakan bahwa konsentrasi terhadap ekspansi sektor modern hanya akan menghasilkan semakin meningkatnya disparitas antar regional, migrasi dari desa ke kota, pengangguran di perkotaan, penurunan dalam sektor pertanian, dan terjadinya hambatan dalam pembangunan sektor industri karena rendahnya daya beli pada masyarakat pedesaan. Menurut mereka pemilihan strategi pembangunan dengan penekanan terhadap sektor modern akan mengalami kegagalan seperti yang dialami oleh India.

B. Teori Strategi Pertumbuhan (*Growth Strategy Theories*)

Keterbelakangan menurut teori ini adalah merupakan hasil dari adanya faktor “*vicious circles*”. Salah satu contohnya adalah yang terjadi pada negara-negara yang sedang berkembang di mana pendapatan riilnya sangat rendah. Rendahnya pendapatan riil ini disebabkan karena rendahnya produktivitas tenaga kerja. Rendahnya produktivitas tenaga

kerja ini disebabkan karena faktor kekurangan modal dan kekurangan modal itu sendiri disebabkan karena rendahnya tingkat tabungan masyarakat. Sedangkan rendahnya tingkat tabungan ini disebabkan karena pendapatan riil masyarakat rendah.

Teori strategi ini berupaya untuk memutus tali lingkaran pada titik tertentu yang dianggap sebagai titik yang paling kritis. Oleh karena itu menurut teori ini, jika akan melakukan pembangunan dan melakukan transformasi dari perekonomian sektor tradisional ke perekonomian pasar modern, salah satu faktor yang penting yang harus dilakukan adalah meningkatkan "formasi modal" dan investasi dalam jumlah yang besar.

Menurut Khunen (1987), Teori Strategi ini selanjutnya dibagi lagi menjadi beberapa teori, yaitu: Teori Pertumbuhan Seimbang (*Theory of Balanced Growth*), Teori Pertumbuhan Tidak Seimbang (*Theory of Unbalanced Growth*), Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan (*Theory of Stage of Growth*), Teori Pusat-Pusat Pembangunan (*Theory of Development Poles*), serta *Theory of Circular Causation*, yang masing-masing akan dijelaskan sebagai berikut ini :

Teori Pertumbuhan Seimbang (*Theory of Balanced Growth*)

Teori ini dikemukakan oleh Nurkse (1964 : 22-30) Teori ini memandang bahwa rintangan pembangunan adalah berkaitan dengan keterbatasan pasar dan peluang pasar, yang disebabkan karena rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu, yang diperlukan di sini adalah sejumlah investasi terhadap barang dan jasa yang pada saat yang bersamaan dapat menimbulkan permintaan. Teori ini berdasarkan pada

teorema Say's dan keperluan investasi untuk beberapa sektor harus berhubungan dengan penawaran (produksi), daya beli dan permintaan.

Hambatan utama dalam memecahkan masalah keterbatasan pasar ini adalah adanya kekurangan modal dan karena itu seluruh sumber-sumber yang potensial harus dimobilisasi. Jika modal tersedia, investasi dapat dilakukan. Dan bagaimanapun juga untuk menjamin adanya pertumbuhan yang seimbang, maka peranan pemerintah dalam perencanaan investasi (*investment planning*) mutlak diperlukan.

Menurut teori ini pembangunan dilihat sebagai suatu upaya perluasan pasar dan peningkatan produksi termasuk produksi pertanian. Adanya kemungkinan hambatan struktural tidak diperhitungkan dalam teori ini seperti misalnya adanya keterkaitan pasar.

Teori Pertumbuhan Tidak Seimbang (*Theory of Unbalanced Growth*)

Teori ini dikemukakan oleh Hirschman (1958). Teori ini merupakan kebalikan dari teori pertumbuhan seimbang. Menurut Hirschman bahwa rintangan pertumbuhan bukanlah bersumber dari adanya kekurangan dalam modal, tetapi bersumber dari kekurangan dalam kemampuan kewirausahaan (*entrepreneurial abilities*). Potensi kewirausahaan dalam pengambilan keputusan biasanya dihambat oleh faktor kelembagaan, apakah bersumber dari kelompok yang memainkan peranan besar atau bersumber dari potensi kewirausahaan itu sendiri, ataupun tujuan usaha yang hanya ingin memperoleh pendapatan sedikit. Semua itu merupakan hal-hal yang menghambat pembangunan. Berdasarkan hal ini, maka diperlukan mekanisme insentif dan paksaan yang akan secara otomatis

dapat memperbaiki proses pengambilan keputusan. Menurut pendapat Hirschman, bukanlah pertumbuhan yang seimbang yang akan dicapai, tetapi lebih pada pertumbuhan yang tidak seimbang yang harus dipertahankan. Investasi tidak perlu disebar, tetapi lebih dikonsentrasikan pada satu proyek yang dapat menciptakan nilai tambah investasi yang berupa timbulnya hubungan ke belakang dan ke depan (*backward and forward linkages*) dari proyek tersebut tanpa mengurangi aspek pembinaan kemampuan kewirausahaan. Industri manufaktur dan substitusi impor merupakan contoh yang tepat dalam hal ini.

Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan (*Theory of Stage of Growth*)

Teori ini dikemukakan oleh Rostow (1960). Teori ini menjelaskan proses pembangunan ekonomi suatu negara berdasarkan sejarah ekonominya dengan menggambarkan 5 (lima) tahapan pertumbuhan melalui kondisi masyarakatnya.

1. Tahap yang pertama, adalah **masyarakat tradisional**, yang dicerminkan dari hampir 75% penduduknya berusaha pada produksi pertanian. Kekuasaan politik berada pada pemilik tanah atau Pemerintah Pusat yang didukung oleh kekuatan militer dan birokrasi.
2. Tahap yang kedua, adalah tahap mempersiapkan **prakondisi untuk *take-off*** yang ditandai dengan adanya terjadinya perubahan secara radikal sektor-sektor *non* industri. Tahap ini dicerminkan dengan semakin meningkatnya ekspor bahan mentah, munculnya klas-klas pengusaha baru serta munculnya ide-ide tentang bagaimana memajukan ekonomi dari kalangan luar melalui elit-elit yang ada.

3. Tahap yang ketiga, adalah tahap **take-off**. Pada tahap ini terjadi peningkatan investasi yang luar biasa dalam *out-put* per kapita. Di samping itu terjadi revolusi industri yang disertai dengan adanya perubahan yang drastis dari teknik produksi. Pada awalnya investasi dilakukan pada kelompok-kelompok kecil dari sektor-sektor yang diprioritaskan (*leading sector*). Dari sisi sosial, terjadi dominasi masyarakat modern terhadap masyarakat tradisional.
4. Tahap keempat, **tahap kematangan (*maturity*)**. Pada tahap ini terjadi penyebaran pertumbuhan dari sektor pemimpin kepada sektor-sektor yang lain dan adanya pemakaian yang meluas teknologi modern yang diikuti perubahan tingkat kebutuhan masyarakat dalam jumlah besar.
5. Tahap kelima, **tahap konsumsi massa yang tinggi (*high mass consumption*)**. Tahap ini dapat dicapai setelah tercapai tingkat tertentu dari pendapatan nasional dan penyusunan kebijakan ekonominya memberikan prioritas untuk meningkatkan konsumsi *privat*. Tahap yang kritis pada teori Rostow ini berada pada tahap ketiga, yaitu tahap **take-off**. Pada tahap ini tingkat investasi *netto* harus meningkat antara 5–10% dari produksi nasional. Selain itu pula harus dibangun pula kerangka kelembagaan, politik, sosial untuk menghadapi situasi *self-sustained growth*. Sumber-sumber keuangan harus diakumulasi secara internal untuk mencapai tingkat tabungan yang lebih tinggi.

Teori Pusat-Pusat Pertumbuhan (*Theory of Growth Poles*)

Teori ini dikemukakan oleh Perroux (1957). Peningkatan pusat pertumbuhan regional akan melayani daerah-daerah tertentu dan akan merangsang pertumbuhan daerah-daerah lain. Beberapa konsentrasi dalam daerah tertentu akan membantu untuk mencapai manfaat teknologi dari luar yang ekonomis dan penciptaan pusat-pusat pertumbuhan akan menarik para pengusaha dan karena itu akan mendorong pembangunan. Secara singkat teori dapat dikatakan sebagai teori pertumbuhan daerah yang tidak seimbang (*regional unbalanced growth theory*) yaitu dengan mempergunakan ketidak seimbangan daerah untuk mendorong pembangunan. Namun demikian teori ini tidak memberi perhatian yang cukup besar terhadap proses yang diperlukan untuk menjamin bahwa penyebaran dan keterkaitan antara pusat dengan daerah sekitarnya justru tidak menyebabkan terjadinya dualisme perekonomian.

Teori Sebab-Akibat (*Theory of Circular Causation*)

Teori ini dikemukakan oleh Myrdal (1957 : 44-49). Teori ini menolak strategi pembangunan pusat-pusat pertumbuhan, sebab menurut Myrdal pada hakikatnya sistem sosial dan proses ekonomi tidak menyebabkan pembangunan pusat-pusat pertumbuhan tersebut menuju keadaan keseimbangan, tetapi justru sebaliknya faktor-faktor tersebut secara kumulatif cenderung menciptakan siklus positif atau negatif. Dalam kondisi "*laissez faire*" pada negara yang sedang berkembang, hal itu cenderung menciptakan kumulatif negatif.

Prinsipnya, teori dari Myrdal ini menjelaskan problem yang dihadapi oleh negara-negara yang sedang berkembang tidak semata-mata dari variabel ekonomi saja, tetapi sudah mempertimbangkan variabel-variabel sosial. Pada setiap tingkatan suatu negara, yang dibedakan menurut tahapan pembangunan antar wilayahnya, ataupun perdagangan internasionalnya, ataupun juga perdagangan antara negara-negara industri dengan negara-negara yang sedang berkembang, terjadinya perbedaan tersebut cenderung akan meningkat dan akan menciptakan kesenjangan yang semakin melebar. Daerah-daerah yang sudah akan berkembang akan semakin berkembang, sebaliknya daerah-daerah yang terbelakang akan tetap terbelakang. Demikian juga, sektor-sektor modern akan semakin berkembang pesat meninggalkan sektor-sektor tradisional yang semakin tidak mampu berkembang. Misalnya, jika barang-barang industri yang diimpor harus bersaing dengan barang-barang kerajinan dari sektor tradisional, maka dengan jelas kondisi "*term of trade*" sangat jelek, dan jika dilakukan perdagangan antara keduanya, maka dipastikan akan terjadi defisit pada neraca perdagangan negara pengekspor barang-barang kerajinan, sehingga terjadi aliran modal keluar.

Model-model mempunyai implikasi bahwa negara harus berperan penuh dalam pembangunan ekonomi. Selain itu, pada tahapan ini, permasalahan yang dihadapi oleh banyak negara yang sedang berkembang adalah terjadinya kegagalan pasar (*market failures*), yang menuntut adanya koordinasi terpusat dan alokasi sumber daya dari negara untuk mengatasi terjadinya kegagalan pasar.

Menginjak Tahun 1960-an, konsentrasi terhadap akumulasi modal fisik telah bergeser ke konsentrasi akumulasi modal manusia. Investasi pada modal manusia dan implikasinya kepada pembangunan mulai menjadi pusat perhatian. Mereka percaya bahwa pembangunan akan sangat tergantung pada produktivitas manusia yang menjadi agen pembangunan. Oleh karena itu meningkatkan pengetahuan masyarakat melalui pendidikan, menyediakan layanan kesehatan dan nutrisi yang lebih baik, peningkatan ketrampilan, akan mampu meningkatkan total produktivitas masyarakat.

Pada periode ini juga, peranan negara dalam pembangunan ekonomi kembali dikritik dan dipertanyakan, karena dibawa kendali negara, pembangunan malah menunjukkan tingkat kemiskinan yang semakin meningkat, tingkat pengangguran juga semakin meningkat dan distribusi pendapatan dan asset dalam masyarakat semakin tidak merata. Kritik terhadap peran negara dalam pembangunan adalah berkisar pada terjadinya kegagalan *non* pasar yang disebabkan karena kesalahan pada pilihan kebijakan publiknya. Secara spesifik, kritik terhadap kegagalan pemerintah dalam melaksanakan pembangunan ini disebabkan karena pengabaian terhadap sektor pertanian, ketidak efisienan pada BUMN-BUMN yang ada, terjadinya efek kebalikan dari kebijakan industri substitusi impor, dan terjadinya defisit neraca pembayaran.

Pada awal Tahun 1970-an, ketidak efisienan dalam program-program industrialisasi dan perencanaan pembangunan yang komprehensif yang dilakukan oleh pemerintah semakin bertambah akut

yang menjurus akan terjadinya kegagalan pemerintah (*government failures*), yang disebabkan karena ketidak efisienan dalam perencanaan, ketidak cukupan informasi dan sumber-sumber daya, kelemahan institusional, dan kegagalan dalam birokrasi. Oleh karena itu dari aspek kebijakan pembangunan untuk mengatasi hal ini adalah bagaimana menetapkan harga secara tepat (*get prices right*). Dengan ketidak percayaan masyarakat terhadap pemerintah, pada akhirnya mereka menuntut adanya peran negara yang minimal dalam pembangunan ekonomi.

2.1.3 Kesejahteraan Masyarakat

Dalam teori ekonomi, konsep kesejahteraan masyarakat dikenal sebagai ekonomi kesejahteraan (*Welfare Economics*) yang pada hakikatnya menjelaskan tentang alokasi faktor-faktor produksi serta barang dan jasa dalam suatu perekonomian kepada semua warga masyarakat. Layard and Walter (1978 : 3-4) menjelaskan bahwa ekonomi kesejahteraan adalah berhubungan dengan pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut :

- a. Bagaimana faktor-faktor produksi dialokasikan kepada produk-produk barang dan jasa?
- b. Bagaimana produk-produk barang dan jasa tersebut didistribusikan kepada masyarakat?

Konsep yang dipergunakan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah berdasarkan teori *Pareto Efficient* serta *Pareto Optimum*. Pada teori *Pareto Efficient*, disini tidak menjelaskan tentang

pemerataan distribusi kesejahteraan kepada seluruh masyarakat. *Pareto Efficient* hanyalah sebuah konsep yang menunjukkan bahwa alokasi faktor produksi dan barang jasa berada pada suatu titik yang paling efisien. (Varian, 1987 : 543). Dengan kata lain, pada kondisi *Pareto Efficient*, seseorang tidak akan dapat meningkatkan kepuasannya, tanpa menyebabkan kepuasan orang lain menjadi berkurang. Sedangkan konsep *Pareto Optimum*, menjelaskan suatu situasi dimana tercapai alokasi faktor produksi dan barang jasa yang paling efisien, yang secara bersamaan disertai tercapai juga kondisi distribusi kesejahteraan yang merata.

Dengan demikian implikasinya adalah bahwa alokasi faktor-faktor produksi serta barang dan jasa bisa mencapai titik yang paling efisien (tercapainya situasi *Pareto Efficient*), tetapi kondisi distribusinya kepada masyarakat tidak merata (*Pareto Optimum* belum tercapai). Dengan kata lain tercapainya kondisi *Pareto Efficient*, tetapi belum mencapai kondisi *Pareto Optimum*. Oleh karena itu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal adalah dengan menciptakan distribusi yang merata pada saat alokasinya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi (*Pareto Optimum*).

Hubungan antara ketidak merataan distribusi kesejahteraan dengan kesejahteraan masyarakat (*social welfare*) dapat dilakukan dengan berbagai cara, tergantung dalam bentuk apa fungsi kesejahteraan sosial (*social welfare function*) tersebut. Mungkin kesejahteraan sosial dapat

dilihat dari fungsi daya guna (*utility*) individual. Atau bisa juga kesejahteraan sosial dilihat sebagai fungsi langsung dari pendapatan.

Pelopor untuk menghitung ketidak merataan yang berakibat menurunnya kesejahteraan adalah Hugh Dalton (1920), yang mempergunakan fungsi sederhana kesejahteraan sosial utilitarian. Menurut Dalton, kesejahteraan sosial dipandang sebagai jumlah total daya guna masing-masing individu, dan daya guna masing-masing individu tersebut dianggap sebagai fungsi dari pendapatan individu. Dengan demikian jika keseluruhan jumlah pendapatan dalam masyarakat tersebut didistribusikan kepada seluruh anggota masyarakat secara sama, maka akan tercapai kesejahteraan sosial yang maksimal. Berdasarkan hal itu, maka derajat ketidak merataan distribusi pendapatan adalah merupakan persentase selisih antara pendapatan yang terendah yang diterima oleh anggota masyarakat dengan pendapatan tertingginya. (Sen, 1992 : 94 – 96).

Selanjutnya Atkinson (1970), mengukur derajat ketidak merataan distribusi pendapatan dengan menghitung indeks ketidak merataan (*index of inequality*). Atkinson mengukur ketidak merataan distribusi pendapatan berdasarkan persentase pengurangan total pendapatan yang dapat dipertahankan tanpa menurunkan kesejahteraan sosial, selanjutnya mendistribusikan jumlah pengurangan tersebut secara sama. Selanjutnya menurut pendekatan Atkinson ini, perubahan dalam fungsi kesejahteraan sosial akan menjamin : (1) Kesejahteraan sosial secara keseluruhan

adalah fungsi dari pendapatan saja; (2) Untuk beberapa tingkat pendapatan, suatu distribusi yang merata harus menunjukkan distribusi kesejahteraan sosial yang maksimal dari total pendapatan. (Sen, 1992 : 97).

Dari beberapa penjelasan, dapatlah diketahui bahwa konsep kesejahteraan sosial adalah berkaitan dengan distribusi pendapatan dalam masyarakat. Dengan kata lain, suatu kesejahteraan sosial yang paling maksimal dalam masyarakat akan tercapai jika distribusi pendapatan dalam masyarakat merata.

Berdasarkan konsep kesejahteraan yang seperti itu, maka salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, dapat dilakukan melalui perbedaan antara tingkat pendapatan per kapita di sektor pertanian dan pendapatan per kapita di sektor industri. Perbedaan itu akan mencerminkan perbedaan tingkat kesejahteraan antara masyarakat yang bekerja di sektor pertanian dengan masyarakat yang bekerja di sektor industri. Semakin tinggi derajat perbedaannya, semakin rendah tingkat kesejahteraan dalam masyarakat, sebaliknya semakin kecil perbedaan itu, semakin tinggi tingkat kesejahteraan masyarakat. Dengan kata lain cara ini akan sama dengan konsep pengukuran distribusi pendapatan melalui Gini Index yang dikenal sebagai salah satu cara untuk mengukur tingkat kesejahteraan dalam suatu masyarakat. Namun ukuran distribusi pendapatan sebagai indikator kesejahteraan masyarakat yang dihasilkan oleh usaha

pembangunan, dalam perkembangannya juga tidak dapat memuaskan semua pihak, sehingga perlu diperluas.

Sebenarnya untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai hasil usaha pembangunan, mengalami perkembangan yang pesat sejalan dengan perubahan-perubahan dalam paradigma pembangunan. Ketika paradigma pembangunan berpusat pada ekonomi (*economic development centered*), maka ukuran-ukuran kesejahteraan masyarakat sebagai indikator capaian hasil pembangunan dinyatakan dengan tingkat pertumbuhan ekonominya (*growth*). Dalam perkembangannya, ukuran ini tidak memuaskan semua pihak, karena hal itu belum mencerminkan tinggi rendahnya pendapatan per kapita masyarakat. Oleh karena itu kemudian ukuran tingkat kesejahteraan masyarakat diukur dengan tingginya pendapatan per kapita masyarakat. Semakin tinggi semakin sejahtera dan sebaliknya semakin rendah semakin tidak sejahtera. Namun sekali lagi, ukuran inipun dalam perkembangannya banyak dipertanyakan, karena ukuran pendapatan per kapita ini hanya konsep rata-rata saja, dan tidak mampu memberi informasi tentang distribusi pendapatan yang nyata dalam masyarakat. Dan sejak saat itulah indikator yang dipergunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai capaian hasil pembangunan mempergunakan ukuran distribusi pendapatan.

Ketika problem pembangunan semakin berkembang, ukuran distribusi pendapatan yang mencerminkan tingkat kesejahteraan

masyarakatpun mulai tidak mampu mengakomodasi problem-problem pembangunan saat itu. Problem pembangunan yang berkembang saat itu adalah dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap pembangunan manusia katimbang pembangunan ekonomi semata. Dan mulai saat itu paradigma pembangunan berkembang menjadi berpusat pada pembangunan manusia (*human development centered*). Bersamaan dengan berkembangnya paradigma pembangunan berpusat pada manusia, maka ukuran kesejahteraan masyarakat sebagai capaian hasil pembangunanpun mengalami perubahan dan pergeseran. Peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai capaian hasil pembangunan dengan paradigma pembangunan yang seperti ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemiskinan Manusia (IKM) dan lain-lain.

Berdasarkan hal itu, ukuran kesejahteraan masyarakat yang dipergunakan sebagai capaian pembangunan dalam studi ini adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan pertimbangan, indek ini merupakan indek komposit dari beberapa indek yang mencerminkan tingkat kesejahteraan masyarakat dalam bidang-bidang kesehatan, pendidikan dan daya beli masyarakat (*Purchasing Power Parity/PPP*). Sehingga dengan demikian akan dapat mencerminkan kondisi tingkat kesejahteraan masyarakat yang sesungguhnya. Di samping itu, indek IPM atau HDI (*Human Development Indexs*) ini telah menjadi indikator resmi yang ditetapkan oleh PBB dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat sebagai capaian hasil pembangunan.

2.1.4 Pembangunan dan Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi

2.1.4.1 Pembangunan Sektor Pertanian

Apakah pertanian itu, pada umumnya secara garis besar telah dimaklumi oleh masyarakat luas, yaitu mengusahakan tanaman guna memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari dan kalau kemudian terdapat kelebihan (surplus) barulah bisa dipertukarkan dengan barang-barang lain yang tidak dimiliki. Secara teknis pertanian adalah mengusahakan flora dan fauna (tumbuh-tumbuhan dan hewan) melalui reproduksi. Dengan flora berarti semua tumbuh-tumbuhan mulai dari tingkat rendah sampai dengan tingkat tinggi, sedangkan fauna adalah binatang, baik yang dipelihara sebagai ternak atau hewan atau ikan, maupun yang tidak dipelihara. Reproduksi berarti menghasilkan sama dengan induknya. Jadi menanam padi akan menghasilkan padi juga dan bukan jagung. Memelihara sapi akan menghasilkan sapi juga dan bukan kerbau. Oleh karena fauna dan flora itu banyak sekali macam dan jenisnya, maka di Indonesia pertanian dibedakan ke dalam pertanian dalam arti luas dan pertanian dalam arti sempit. Pertanian dalam arti luas meliputi semua kegiatan usaha dalam reproduksi fauna dan flora tersebut, yang dibedakan ke dalam 5 (lima) sektor, masing-masing pertanian rakyat, perkebunan, peternakan, perikanan dan kehutanan, sedangkan pertanian dalam arti sempit, khusus ditujukan terhadap pertanian rakyat. Di negara-negara lain, pengertian pertanian pada umumnya lebih sempit,

seperti rumusan Cohen (dalam Mosher 1965 : 3) sebagai berikut : Pertanian dirumuskan sebagai ilmu dan seni mengusahakan tanah, dan definisi ini terutama menekankan produksi tanaman dalam pertanian. Demikian juga Mosher (1965 : 16) merumuskan dalam ruang lingkup yang sempit, seperti berikut ini.

"Pertanian adalah sejenis proses produksi yang khas yang didasarkan atas proses-proses pertumbuhan tanaman dan hewan. Para petani mengatur dan menggiatkan pertumbuhan tanaman dan hewan itu dalam usahatani (*farm*). Kegiatan-kegiatan produksi di dalam setiap usahatani merupakan suatu bagian usaha (*business*), di mana biaya dan penerimaan adalah penting".

Dari kedua rumusan ini, maka dalam pengertian pertanian, Cohen menitik beratkan pengusahaan tanah untuk tanaman, sedangkan Mosher menekankan pada usahatani, dimana para petani pada umumnya mengusahakan tanaman dan ternak. Di Indonesia pengertian pertanian dalam arti luas dititik beratkan terutama pada produksi yang dihasilkan, seperti jika produksi utamanya kayu, menjadi kehutanan, jika produksi utamanya ikan menjadi perikanan, jika produksi utamanya ternak menjadi peternakan, jika produksi utamanya tanaman industri menjadi perkebunan dan khusus bagi pertanian rakyat, maka titik berat ditekankan pada usahatani rakyat di pedesaan. Oleh karena rakyat di pedesaan mempunyai beraneka ragam usaha, bukan saja mengusahakan tanaman untuk pangan, akan tetapi juga lain-lain jenis produksi seperti ikan, ternak, tanaman

industri dan kayu-kayuan, maka kegiatan sehari-harinya akan menyangkut juga ke lima sektor pertanian. Oleh karena itu timbullah kemudian istilah-istilah seperti perkebunan rakyat, karet rakyat, kopi rakyat hutan penduduk/rakyat, dan sebagainya. Dengan cara penggolongan pertanian dalam arti luas ke dalam 5 (lima) sektornya atas dasar jenis-jenis produksi yang dihasilkan, maka cara pengusahaannya sudah barang tentu berbeda-beda, tergantung dari kemampuan yang mengusahakan dan kebijaksanaan yang diambil oleh pemerintah. Di daerah pedesaan ada petani yang mengusahakan ikan secara kecil-kecilan dengan membuat kolam di dekat rumah. Ada petani yang hanya mempunyai beberapa ekor ayam atau kambing atau domba sebagai usaha sampingan. Akan tetapi juga ada yang sengaja memelihara beberapa puluh ekor itik untuk mata pencaharian pokok. Ada yang menanam beberapa pohon kayu-kayuan di pekarangan, tetapi ada pula yang sengaja menanam pohon-pohon seperti hutan pada sebidang tanahnya, antara lain di Jawa Barat, di Jawa Timur (Banyuwangi, Situbondo, Jember, Lumajang) dengan menanam sengan laut atau jeunjing (*Albizzia falcata*) untuk kemudian dijual kayunya sebagai bahan bangunan dan limbah serbuk gergajian untuk bahan arang dan juga untuk bahan bakar di pabrik gula. Ada petani yang sekedar menanam satu dua tanaman kopi di halaman rumahnya, tetapi ada juga yang sebidang tanahnya seluruhnya ditanami kopi, sehingga disebut kopi rakyat. Di samping tanaman industri seperti kopi, karet, teh dan sebagainya diusahakan kecil-kecilan oleh penduduk,

maka banyak juga yang diusahakan secara besar-besaran, merupakan perusahaan-perusahaan khusus dan dikenal dengan istilah perkebunan. Perusahaan-perusahaan demikian itu di masa lampau disebut *onderneming*, dikuasai oleh swasta-swasta besar, dengan tujuan mencari keuntungan semata-mata dan jasa-jasa kepada masyarakat hanyalah sekedar sebagai sampingan. Dalam hal ini, hutan-hutan beserta tanahnya dikuasai oleh pemerintah. Hutan-hutan itu terbagi atas hutan lindung dengan fungsi utama mencegah erosi dan mengatur tata air serta hutan produksi yang pada dasarnya juga diatur sebagai perusahaan besar seperti *onderneming*. Akan tetapi, karena hutan-hutan produksi itu dikuasai oleh pemerintah, maka tujuannya bukan semata-mata mencari keuntungan akan tetapi juga memberi jasa kepada masyarakat. Dewasa ini, semua usaha di bidang pertanian dalam arti luas, sampai dengan usaha-usaha kecil, seperti usahatani dan usaha-usaha kecil sampingan seperti memelihara ternak dan ikan, dalam rangka meningkatkan kemajuannya diberi istilah pembangunan pertanian, pembangunan kehutanan, pembangunan perkebunan, pembangunan perikanan dan seterusnya. Sejauh manakah sesungguhnya ketepatan pengertian pembangunan itu dapat diterapkan pada masing-masing sektor pertanian tersebut, perlu kiranya mendapat pembahasan. Seperti diutarakan sebelumnya, pembangunan pada suatu daerah dilakukan dengan mengusahakan agar senantiasa tercipta perubahan-perubahan sosial, dalam arti masyarakatnya diajak maju, sehingga menjadi

makin pandai, makin terampil, makin bergairah, makin bersemangat, makin tekun bekerja dan seterusnya. Dengan perubahan-perubahan sosial semacam itu produktivitas di segala bidang kegiatan dan ditambah dengan sarana dan prasarana yang cukup, maka pertumbuhan ekonomi makin cepat. Pertumbuhan ekonomi daerah yang makin cepat ini mempengaruhi dan mendorong ke arah perubahan sosial lebih lanjut, sehingga terciptalah perubahan-perubahan struktur sosial, Proses perubahan sosial dan pertumbuhan ekonomi, yang saling kait mengkait dan menunjang itu lebih lanjut secara berangsur-angsur dan terus menerus membawa peningkatan kesejahteraan masyarakat daerah yang bersangkutan. Demikianlah pada dasarnya, proses pembangunan pada suatu daerah. Apabila semua penduduk di daerah yang bersangkutan itu berusaha di bidang pertanian dalam arti luas, ada yang menjadi peternak, ada yang berusaha pertanian rakyat, ada yang menanam pohon untuk menghasilkan kayu, ada yang mata pencaharian pokoknya mengusahakan tanaman industri dan seterusnya, maka perubahan-perubahan sosial penduduk terutama diarahkan pada segi-segi pertanian. Setiap penduduk pengetahuan dan keterampilannya mengenai pertanian meningkat, gairah dan semangat kerja dalam usaha-usaha pertanian meningkat pula, sehingga produktivitas di masing-masing sektor pertanian meningkat.

Sementara sarana produksi untuk pertanian, seperti alat-alat pertanian, pupuk, benih dan sebagainya atau dapat dikatakan sarana-

sarana yang bersifat ekonomis diusahakan dan diatur lebih baik, maka produktivitas semua usaha di sektor-sektor pertanian akan lebih meningkat lagi dan dengan demikian pertumbuhan ekonomi di daerah yang bersangkutan akan tumbuh lebih cepat. Demikianlah kurang lebih proses berlangsungnya pembangunan pertanian pada suatu daerah.

Penduduk di daerah ini mempunyai usaha di semua sektor pertanian, akan tetapi ada pada suatu daerah kecil di pinggir pantai misalnya, semua penduduk menjadi nelayan dan dengan semua nelayan ini diajak maju, ditingkatkan pengetahuan dan ketrampilannya serta ditunjang pengaturan sarana dan prasarana, sehingga usaha-usahanya sebagai nelayan meningkat dan pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut berlangsung lebih cepat, maka pembangunan perikanannya berjalan lancar.

Dari uraian-uraian tersebut dapat ditarik kesimpulan, bahwa dalam rangka pembangunan khususnya pembangunan pertanian dititik beratkan pada kegiatan yang ditujukan kepada orang-orang dengan mengubah diri sendiri menjadi lebih pandai, lebih terampil, lebih bergairah, lebih bersemangat, sehingga usahanya menjadi terus menerus lebih maju dan dinikmati demi peningkatan kesejahteraannya sendiri. Oleh karena itu Mosher (1966 :16) merumuskan, bahwa dalam rangka pembangunan pertanian, maka segala kegiatan harus dapat ditujukan kepada :

- a. Mengubah proses-proses produksi pertanian.
- b. Mengubah perilaku petani.

- c. Mengubah corak masing-masing usahatani.
- d. Mengubah hubungan antara biaya dan penerimaan bagi setiap perusahaan pertanian.

Dengan pengertian pembangunan tersebut timbullah pertanyaan bagaimanakah cara memajukan usaha-usaha pertanian dalam ukuran-ukuran yang besar seperti perkebunan, perusahaan hutan negara (Perhutani) dan lain-lain, sebab kesemuanya senantiasa juga disebut dengan istilah pembangunan. Usaha-usaha pertanian dalam ukuran besar itu dikelola menurut sistem perusahaan dan tenaga-tenaga yang bekerja di dalamnya bersifat sebagai buruh, pekerja atau pegawai.

Mereka tidak bebas mengerjakan segala sesuatu, akan tetapi senantiasa atas perintah atau petunjuk. Lain halnya dengan para petani bersama usahatannya. Segala sesuatu dikerjakan atas kemauan sendiri dan dapat menentukan sendiri juga apa saja yang akan diusahakan dan resiko juga ditanggung sendiri. Semua kemajuan yang dicapai juga demi kesejahteraan sendiri bersama keluarganya. Lain halnya dengan buruh, pekerja atau pegawai pada perusahaan. Semua prestasi kerjanya adalah demi kepentingan perusahaan dan apabila bekerjanya baik akan dapat imbalan jasa, seperti upah dinaikkan, fasilitas bekerja ditambah dan sebagainya. Akan tetapi imbalan jasa yang diberikan itu, belum tentu sama dengan peningkatan prestasi kerjanya, dapat lebih kecil dan dapat lebih besar, tergantung dari kemajuan perusahaannya. Dapat juga buruh, pekerja

dan para pegawainya bekerja lebih keras, lebih rajin, akan tetapi belum tentu perusahaannya berjalan lebih baik dan mencapai kemajuan, karena misalnya pemimpinnya kurang cakap. Pemimpin yang kurang cakap biasanya memang tidak dapat membawa kemajuan perusahaannya, karena tidak dapat mengajak dan membawa para buruh, pekerja dan pegawainya bekerja lebih bergairah, lebih baik, lebih efisien dan seterusnya. Meskipun dipaksa lebih keras, belum tentu perusahaannya lebih maju. Bahkan seringkali terjadi, jika pemimpinnya ada, para buruh, pekerja dan pegawainya pura-pura bekerja keras dan tekun, akan tetapi begitu pemimpinnya pergi, suasana bekerja baik sudah tidak ada lagi, maka sudah barang tentu perusahaannya tidak akan berhasil.

Atas dasar pertimbangan tersebut, maka kemajuan perusahaan-perusahaan besar, termasuk perusahaan-perusahaan di bidang pertanian, kiranya bukanlah melalui cara-cara pembangunan sebagaimana diuraikan di muka, akan tetapi melalui cara lain, yang dikenal dengan sebutan *management* atau pengelolaan.

2.1.4.2 Syarat-Syarat Mutlak Pembangunan Pertanian

Untuk meningkatkan produktivitas pertanian, setiap petani semakin lama semakin tergantung kepada sumber-sumber dari lingkungannya. Petani melengkapi zat hara tanaman yang terdapat di dalam tanah dengan pupuk, ditambah kelembaban tanah dengan air irigasi, bibit unggul, disediakan pestisida dan obat-obatan untuk memberantas penyakit tanaman dan hewan. Di samping itu diperlukan 5 (lima) macam

fasilitas dan jasa (*services*) yang harus tersedia bagi para petani jika pertanian hendak dimajukan. Masing-masing merupakan syarat mutlak (*esential*). Tanpa salah satu dari padanya tidak akan ada pembangunan pertanian. Apabila semuanya lengkap, barulah pembangunan itu dapat terjadi. Adapun syarat-syarat mutlak pembangunan pertanian tersebut antara lain :

- a. **Adanya pasar untuk hasil-hasil usahatani**, hasil-hasil ini perlu adanya pasaran serta harga yang cukup tinggi guna membayar kembali biaya-biaya tunai dan daya upaya yang telah dikeluarkan petani sewaktu memproduksikannya. Di samping hal tersebut juga diperlukan : Yang pertama, adanya permintaan (*demand*) terhadap hasil usahatani. Yang kedua, adanya penyalur hasil usahatani (sistim tataniaga) dan yang ketiga, adanya kepercayaan petani pada kelancaran sistim tataniaga itu.
- b. **Teknologi yang senantiasa berkembang**, meningkatnya produksi pertanian adalah akibat pemakaian teknik-teknik atau metode-metode di dalam usahatani. Memang tidaklah mungkin untuk memperoleh hasil yang banyak dengan hanya menggunakan tanaman, hewan dan tanah dengan cara-cara yang tetap seperti dulu. Maka untuk meningkatkan produktivitas diperlukan adanya teknologi usahatani, bagaimana cara melakukan pekerjaan usahatani, di dalamnya termasuk cara-cara bagaimana petani menyebarkan benih, memelihara tanaman, pemupukan, pengobatan, mempergunakan alat-alat pertanian, memungut hasil, memelihara ternak dan

mengkombinasikan cabang usahatani, mengolah tanah pertanian agar tanah menjadi subur.

Agar pembangunan pertanian dapat berjalan terus, haruslah selalu terjadi perubahan. Apabila perubahan ini terhenti, maka pembangunan pertanian pun terhenti. Produksi terhenti kenaikannya, bahkan dapat menurun karena merosotnya kesuburan tanah atau karena kerusakan yang makin meningkat yang disebabkan oleh hama penyakit yang semakin merajarela.

- c. Tersedianya bahan-bahan dan alat-alat produksi secara lokal,** kebanyakan metoda baru yang dapat meningkatkan produksi pertanian memerlukan penggunaan bahan-bahan dan alat-alat produksi khusus oleh petani. Di antaranya termasuk bibit, pupuk, pestisida dan obat ternak. Pembangunan pertanian menghendaki kesemuanya itu tersedia di atau dekat pedesaan dalam jumlah cukup banyak untuk memenuhi keperluan tiap petani yang mau menggunakannya.
- d. Adanya perangsang produksi bagi petani,** cara-cara kerja usahatani yang lebih baik, pasar yang mudah dicapai dan tersedianya sarana dan alat produksi, ini semuanya memberi kesempatan kepada petani untuk menaikkan produksi. Perangsang yang dapat secara efektif mendorong petani menaikkan produksinya adalah terutama bersifat ekonomis, antara lain : (a) Perbandingan harga yang menguntungkan, (b) Bagi hasil yang wajar, (c) Tersedianya barang dan jasa yang ingin dibeli oleh petani untuk keluarganya.

e. Tersedianya pengangkutan yang lancar dan kontinyu, tanpa pengangkutan yang efisien dan murah, keempat syarat mutlak lainnya tidak dapat diadakan secara efektif. Sehubungan dengan itu diperlukan jaringan pengangkutan yang menyebar luas untuk membawa sarana dan alat produksi ke lokasi usahatani, dan membawa hasil usahatani ke konsumen di kota besar dan kecil.

2.1.4.3 Peranan Sektor Pertanian Dalam Pembangunan Ekonomi

Peranan sektor pertanian dan industri dalam pembangunan ekonomi selalu menjadi bahan perdebatan yang menarik yang kemudian melahirkan banyak teori dan penelitian yang berkaitan dengan peranan kedua sektor tersebut dalam pembangunan ekonomi. Yotopoulos and Nugent (1976:13), mengistilahkan perdebatan itu sebagai perdebatan antara *industrial fundamentalism* dengan *agricultural fundamentalism*. Selanjutnya Yotopoulos and Nugent menulis, bagi *industrial fundamentalism* (dimaknai juga sebagai sektor-sektor *non* pertanian) mereka meyakini bahwa terdapat hubungan yang positif antara sumbangan sektor industri dalam pembentukan PDB/PDRB dengan pendapatan per kapita. Artinya, jika sumbangan sektor industri semakin meningkat, maka pendapatan per kapita masyarakat juga akan mengalami peningkatan. Sebaliknya bagi *agricultural fundamentalism* berpendapat, bahwa sekalipun di sektor pertanian kenyataannya pendapatan per kapitanya rendah, tetapi banyak jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian. Oleh karena itu, jika produktivitas di sektor ini

dapat ditingkatkan, maka hal itu akan meningkatkan pendapatan sebagian besar masyarakat yang nantinya dapat dipergunakan untuk melakukan industrialisasi.

Dalam mendiskusikan peranan sektor pertanian dan industri melalui interaksi dari kedua sektor ini, ada dua hal yang perlu dijelaskan, yaitu : Yang pertama, perlunya melakukan analisis tentang kemungkinan investasi untuk pengembangan sektor-sektor *non* pertanian dari surplus yang dihasilkan oleh sektor pertanian. Hal ini dapat dilakukan dengan cara transfer modal dari sektor pertanian ke sektor lain; transfer tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor lain; serta pajak-pajak dari sektor pertanian. Yang kedua, adalah saling ketergantungan antara sektor pertanian dengan industri. Hal ini memberi penekanan hubungan fungsi produksi dan aliran pasar yang menghubungkan antara sektor pertanian dengan sektor-sektor *non* pertanian.

Lebih spesifik lagi, pengembangan sektor pertanian mungkin meningkatkan permintaan bahan-bahan setengah jadi, misalnya pupuk, insektisida dan mesin-mesin yang termasuk barang-barang *non* pertanian; atau mungkin juga meningkatkan *supply* bahan baku pertanian kepada sektor-sektor *non* pertanian. Kedua aspek ini dikenal sebagai *backward and forward linkages*. Di samping itu juga pembangunan sektor pertanian dengan seluruh pekerjaanya, akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan produk-produk *non* pertanian.

Namun demikian, persoalannya sekarang adalah bagaimana bisa menciptakan surplus pada sektor pertanian dan bagaimana bisa mempergunakan surplus tersebut untuk membiayai investasi dalam rangka menciptakan pertumbuhan sektor industri? Hal ini merupakan “beban ganda” dalam pembangunan sektor pertanian. Ada dua aspek yang merupakan beban ganda dalam pembangunan sektor pertanian, yaitu : Beban produksi dan beban pengeluaran.

Beban produksi dapat dilihat dari berbagai bentuk. Dalam pendekatan *Marxist-Leninist*, *out-put* dapat dicerminkan secara langsung melalui penetapan harga yang rendah kepada sektor-sektor *non* pertanian. Atau juga merupakan kombinasi antara penetapan harga produk-produk pertanian yang tinggi yang disertai dengan pajak pertanian yang tinggi. Tingginya harga produk-produk pertanian akan merangsang penggunaan teknologi yang dapat meningkatkan produktivitas di sektor pertanian, dan secara simultan hasil dari penerimaan pajak pertanian yang berupa pajak untuk lahan-lahan pertanian, yang ditetapkan dengan basis pengenaan pajak yang tinggi, akan dapat dialokasikan untuk pembangunan sektor-sektor *non* pertanian.

Beban produksi juga dapat dilakukan dengan bentuk tidak langsung dan melalui mekanisme pasar. Dalam pasar dengan orientasi persaingan sempurna, semua produsen akan berusaha untuk menurunkan biaya produksi, agar dapat tetap eksisten. Begitu juga dengan rumah tangga petani, mereka akan senantiasa berusaha untuk menurunkan biaya produksi dengan cara mengadopsi teknologi-teknologi baru agar dapat

memproduksi dengan biaya yang lebih murah. Dengan biaya produksi yang lebih murah, maka harga jual produk-produk pertanian juga akan semakin murah. Pada kondisi yang seperti ini, ada dua hal yang penting yang merupakan transfer sektor pertanian ke sektor-sektor *non-pertanian*, yaitu : Yang pertama adanya kemajuan teknologi pertanian yang pada giliran berikutnya akan mendorong industri-industri bidang teknologi pertanian. Yang kedua, adanya kemajuan dalam penyediaan *supply* bahan makanan yang berasal dari sektor pertanian sehingga harganya menjadi murah.

Namun demikian buruknya "*term of trade*" merupakan masalah yang selalu dihadapi oleh sektor pertanian yang berakibat semakin menurunnya sektor pertanian. Tekanan-tekanan persaingan dan semakin cepatnya kemajuan teknologi pertanian mengakibatkan banyak petani tidak dapat menyesuaikan keadaan tersebut, yang pada gilirannya mereka tidak dapat bekerja lagi. Untuk mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut mereka memutuskan untuk berurbanisasi ke kota mencari pekerjaan. Mereka memasuki dunia yang baru yang belum dikuasai dan meninggalkan dunia pertanian yang selama ini menjadi pekerjaan utamanya walaupun dalam derajat subsisten saja. Sehingga bagaimanapun mereka akan menemui banyak kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Konsep yang demikian ini disebut sebagai "beban pengeluaran" dari sektor pertanian.

Berdasarkan penjelasan tersebut, terdapat 3 aspek dalam "beban ganda" dari sektor pertanian, yaitu: Pertama, sektor ini dibebani untuk

melakukan transfer modal yang dihasilkan dari margin sektor pertanian. Kedua, sektor pertanian ini dibebani dengan jeleknya "*term of trade*" produk-produk pertanian dengan produk-produk *non* pertanian. Ketiga, sektor pertanian dibebani dengan adanya transfer tenaga kerja melalui migrasi (Yotopoulos and Nugent, 1976:261).

Sebenarnya kalau disimak dari penjelasan tadi, dapatlah diketahui bahwa sesungguhnya sektor pertanian ini diharapkan sangat berperan dalam setiap pembangunan ekonomi. Namun kenyataannya dalam setiap pembangunan ekonomi, peranan sektor pertanian ini justru menunjukkan penurunan dalam perannya. Ada banyak faktor yang mempengaruhi semakin menurunnya peran sektor pertanian dalam suatu pembangunan ekonomi, yang dapat dijelaskan melalui sisi permintaannya (*demand side*) maupun dari sisi penawarannya (*supply side*).

Dari sisi permintaannya, elastisitas permintaan produk-produk pertanian ini biasanya tidak elastis terhadap perubahan harga (*in-elastis*), sehingga ketika terjadi kenaikan pendapatan per kapita dalam masyarakat, permintaan akan produk-produk pertanian dari rumah tangga proporsinya akan menurun lebih besar dibandingkan dengan produk-produk *non* pertanian. Berdasarkan hukum Engel's, ketika pendapatan masyarakat naik, maka pengeluaran mereka sebagian besar akan dialokasikan untuk membeli barang-barang *non* pertanian dibandingkan untuk membeli barang-barang pertanian.

Dalam perekonomian tertutup, *other things equal*, perubahan preferensi masyarakat ini, akan menyebabkan menurunnya harga-harga

produk-produk pertanian. Menurunnya harga produk-produk pertanian selanjutnya akan menurunkan produksi produk-produk pertanian, yang pada giliran berikutnya akan meningkatnya jumlah faktor produksi pertanian yang tidak dipergunakan (termasuk tenaga kerjanya) yang menyebabkan semakin meningkatnya migrasi tenaga kerja dan modal ke sektor-sektor yang lain. Dengan demikian, akan menurunkan tingkat pertumbuhan sektor pertanian dan meningkatkan jumlah pengangguran.

Dalam perekonomian kecil terbuka (*small open economic*) dengan adanya barang yang diperdagangkan (*tradable goods*) dan yang tidak diperdagangkan (*non-tradable goods*), sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB/PDRB akan mengalami penurunan jika permintaan barang-barang yang tidak diperdagangkan elastisitas pendapatannya bersifat elastis, karena permintaannya akan meningkat lebih cepat dibandingkan meningkatnya harganya karena barang-barang tersebut lebih bebas untuk diperdagangkan di pasar dunia. (Anderson, 1987)

Dari sisi penawarannya, penjelasan tentang penurunan sektor pertanian didominasi oleh ketidak simetrisan pertumbuhan dalam faktor *endowment* dan adanya perbedaan produktivitas pertumbuhan sektoral. Adanya perbedaan derajat perubahan teknik produksi antara sektor-sektor akan mempengaruhi komposisi *out-put* agregat, dan pertumbuhan faktor *endowment*. Meskipun pusat perhatian dalam ekonomi pembangunan lebih menekankan pada kemajuan teknologi dibandingkan pertumbuhan faktor *endowmentnya*, namun demikian pengaruh ketidak

seimbangan derajat pertumbuhan faktor *endowment* secara potensial akan mempengaruhi perubahan struktur ekonomi. (Martin and Warr, 1993)

Berdasarkan pada seluruh penjelasan tadi, maka dapatlah diketahui bahwa peranan sektor pertanian dalam suatu pembangunan yang dinyatakan dengan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk adanya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dapat dijelaskan bahwa sektor pertanian dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah relatif lebih rendah dibandingkan sektor-sektor yang lain dalam hal ini adalah sektor industri. Hal ini dapat diketahui dengan semakin menurunnya pertumbuhan sektor pertanian dalam setiap upaya pembangunan ekonomi yang disebabkan karena beberapa faktor seperti yang telah dijelaskan.

Peranan sektor pertanian dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan semakin meratanya distribusi pendapatan dalam masyarakat adalah lebih signifikan dibandingkan dengan sektor industri. Sektor pertanian bagaimanapun juga merupakan sektor yang terbesar dalam hal jumlah tenaga kerjanya. Di banyak referensi seringkali dikatakan bahwa di sektor pertanian terjadi surplus tenaga kerja. Oleh karena itu dengan keberhasilan pembangunan di sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan mayoritas masyarakat yang dengan demikian akan cenderung mengarah pada terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat.

2.1.5 Pembangunan dan Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi

2.1.5.1 Pembangunan Sektor Industri

Karakteristik yang dimiliki Indonesia amat memungkinkan saat ini untuk membangun sektor industri dan sektor pertanian secara simultan diikuti dengan pengembangan sektor jasa. Sekalipun bila dibandingkan dengan negara maju, industrialisasi Indonesia masih pada tahap awal, peluang untuk mengembangkannya amatlah besar. Indonesia sungguh pantas untuk percaya diri meraih sukses industrialisasi karena pernah meraih prestasi ini khususnya pada dekade 1980-an dan 1990-an. Apalagi telah memiliki pondasi yang sungguh kokoh : demokrasi dan otonomi daerah.

Pemikiran tentang industrialisasi amatlah penting untuk digali. Pengalaman atas kesuksesan dan kegagalan di masa lalu perlu dicatat dan diambil sebagai pelajaran. Karena itu pemetaan atas sejarah industrialisasi yang pernah dilakukan menjadi penting untuk dilihat kembali.

Kebijakan yang diambil oleh bangsa Indonesia sejak Tahun 1972 (PELITA I) meletakkan sektor pertanian sebagai landasan pembangunan bangsa. Hal ini mengingat peran strategis sektor pertanian ini, dengan besarnya jumlah penduduk yang terlibat di dalamnya, yakni sebesar 51%-52%. Kebijakan ini telah dilakukan secara konsisten sehingga swasembada beras dapat dicapai setelah kerja keras selama 15 tahun.

Dalam periode krisis moneter yang berawal pada Tahun 1997

Indonesia memang mengimpor beras, namun pada Tahun 2004 kita telah dapat kembali mencukupi kebutuhan beras nasional. Pencapaian ini harus dipertahankan, karena sungguh sangat membahayakan bila bangsa Indonesia dengan jumlah penduduk 200 juta lebih ini menggantungkan impor pangan pada bangsa lain. Oleh karena itu, upaya swasembada pangan termasuk upaya diversifikasi pangan harus terus dikembangkan agar bangsa Indonesia mampu melaksanakan swasembada pangan secara lestari. Upaya ini juga sekaligus diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani, sekalipun harus disadari bahwa upaya peningkatan kesejahteraan petani melalui produksi beras masih begitu berat.

Bersamaan dengan program pembangunan sektor pertanian, pada PELITA I mulai dirintis upaya untuk melaksanakan pembangunan sektor industri, yang antara lain juga bertujuan menunjang sektor pertanian. Perkembangan sektor ini berjalan pesat dipacu oleh pengembangan ekspor hasil industri. Pada Tahun 1993, ekspor hasil industri jauh melampaui ekspor migas. Karena peranan sektor industri pada Tahun 1993 terhadap PDB telah mencapai proporsi lebih dari 22,3%, maka perkembangan ini juga mendorong kegiatan industri jasa dalam arti yang luas. Bahkan sejak krisis moneter, yaitu sejak Tahun 2003, ekspor hasil industri mampu berkembang dengan baik, dan peranan industri terhadap PDB pada Tahun 2003 meningkat menjadi 28,84% dari angka 25,45% pada masa sebelum krisis, Tahun 1996.

Pengembangan tiga sektor ini, yaitu pertanian, industri, dan jasa, saling menguatkan satu sama lain. Berkembangnya sektor pertanian

yang kuat akan memberi landasan bagi pengembangan industri berdaya saing tinggi dengan dukungan sumber daya yang memadai. Industri yang tumbuh pesat akan mampu menyerap dukungan sektor pertanian sekaligus meningkatkan nilai tambahnya. Perkembangan industri dan pertanian pada akhirnya juga akan mendorong tumbuhnya sektor jasa dalam arti yang luas, karena industri membutuhkan dukungan perbankan, asuransi, periklanan, akuntansi, pelatihan, pemasaran, distribusi, pengangkutan, dan berbagai jasa lainnya.

Gambaran keterkaitan tersebut memberikan harapan besar atas masa depan industrialisasi di Indonesia. Apabila keterkaitan antara ketiga sektor ini dapat lebih ditingkatkan menjadi keterpaduan ekonomi Indonesia akan berkembang cepat dan kuat. Keterpaduan yang saling menguatkan seperti ini tidak dimiliki oleh negara-negara yang sering disebut dengan *Newly Industrialized Countries (NICs)*. Singapura dan Taiwan, misalnya tidak memiliki dukungan sumber daya alam yang melimpah khususnya di bidang pertanian. Dengan demikian memang bukan pilihan masuk akal bagi mereka untuk mengembangkan secara simultan sektor industri dan sektor pertanian kemudian diikuti sektor jasa, sehingga mereka menetapkan pilihan pada jenis-jenis industri tertentu.

Apabila diamati perkembangan negara maju, tingkat pertumbuhan ekonomi diawali oleh sektor pertanian disusul dengan kegiatan industri kemudian pada periode lanjutannya, peranan sektor jasa menjadi

dominan. Terdapat kesan bahwa dengan berkembangnya sektor jasa di Indonesia yang pesat, diharapkan perekonomian kita juga tumbuh dengan pesat. Memang patut dibanggakan bahwa sektor jasa telah tumbuh sangat pesat dengan kategori sub sektor yang amat beragam, mulai dari sektor perdagangan, sektor keuangan, telematika, transportasi, sampai *engineering*.

Di sisi lain, tumbuhnya pembangunan ekonomi juga memberikan pelajaran berharga bahwa peranan pengembangan sumber daya manusia dan pengembangan iptek praktis mutlak diperlukan untuk mendorong pertumbuhan sektor pertanian, sektor industri, dan sektor jasa. Karenanya dua hal ini merupakan landasan pokok bagi pengembangan ketiga sektor tersebut.

Belajar dari pengalaman peranan sektor pertanian, industri, dan jasa tersebut maka pembangunan bangsa pada waktu yang akan datang perlu diarahkan untuk :

- a. Mengembangkan sumber daya manusia karena peranannya sangat menentukan bagi kemajuan bangsa kita ;
- b. Penguasaan dan pengembangan iptek untuk menunjang industrialisasi, swasembada pangan, dan jasa dalam arti yang luas ;
- c. Membangun sektor pertanian yang kuat termasuk upaya untuk kelestarian swasembada pangan ;
- d. Melaksanakan industrialisasi ;
- e. Mengembangkan sektor jasa dalam arti yang luas ; dan
- f. Dukungan kebijakan Moneter, Fiskal, dan Administrasi Negara.

Pengalaman tersebut pantas digali sebagai buah pemikiran bagi perumusan strategi industrialisasi ke depan. Konsep keterpaduan sektor industri, sektor pertanian dan sektor jasa ini agaknya dapat merupakan landasan penting dalam mengembangkan strategi tersebut.

Kendati pengembangan industri nasional baru dalam tahap awal, dan justru karena itu, harus yakin akan besarnya kemampuan Indonesia untuk mengembangkan industri dengan daya saing kuat dengan berbagai peluangnya, baik untuk pasar dalam negeri maupun ekspor.

Besarnya peluang Indonesia juga didukung oleh lokasi geografis dan lingkungan strategis negara ini. Dengan lokasi geografis yang menguntungkan keunggulan sebagai negara kepulauan yang memiliki akses ke laut yang pendek, yang terpanjang hanya Kalimantan Tengah dan Papua Tengah, maka produk nasional dapat dipasarkan ke mana saja. Tambahan lagi, lingkungan strategis yang ada juga memiliki peluang besar untuk dibidik sebagai pasar ekspor, mitra investasi, sumber teknologi, maupun sebagai tantangan dan pesaing.

Kendati sejumlah negara, seperti China dan India, juga merupakan ancaman atau pesaing, kiranya sangat perlu untuk memanfaatkan peluang yang komplementer. Di samping kedua negara tersebut, harus pula memanfaatkan peluang yang dihadirkan ASEAN; Asia Timur, yang meliputi antara lain negara-negara Jepang, Korea dan China; APEC, yang mencakup antara lain AS, Kanada, Meksiko, dan Australia; Asia Selatan; Timur Tengah; Eropa; Rusia, dan

lain-lain.

Peluang untuk melaksanakan industrialisasi di Indonesia juga sangat luas mengingat besarnya penduduk yang dimiliki. Potensi penduduk Indonesia dapat dilihat dalam dua perspektif yaitu : Pertama, jumlah penduduk 200 juta lebih ini merupakan potensi sumber tenaga terampil dan wiraswasta. Dengan memperbaiki kualitas pendidikan bangsa secara terus-menerus diharapkan mutu pendidikan akan meningkat dan menghasilkan sumber tenaga yang semakin berkemampuan dan berjiwa wiraswasta. Kedua, jumlah penduduk yang besar adalah potensi pasar tersendiri. Dan adanya pertumbuhan ekonomi serta dengan peningkatan pendapatan per kapita, maka jumlah penduduk tersebut merupakan pasar yang besar dan akan terus meningkat pertumbuhannya.

Peluang sangat besar ini tidak bisa disia-siakan. Kesalahan dalam merumuskan strategi tidak hanya dapat membuang sumber daya yang ada, namun juga menciptakan kerusakan yang mungkin tidak dapat diperbaiki kembali. Memanfaatkan peluang dengan cerdas memerlukan landasan pemikiran yang kuat.

Transisi politik menuju demokrasi Indonesia telah mengantarkan bangsa Indonesia menjadi negara demokratis terbesar ketiga setelah Amerika Serikat dan India. Sukses tersebut tidak terlepas dari keberhasilan bangsa menyelenggarakan Pemilu Tahun 1999 dan Pemilu Tahun 2004 yang berjalan relatif lancar, tertib, dan demokratis. Atas dasar Pemilu yang demokratis tersebut, bangsa ini

telah berhasil melakukan reformasi kelembagaan politik melalui serangkaian amandemen UUD 1945. Rangkaian amandemen UUD 1945 tersebut telah berhasil meletakkan dasar-dasar kehidupan politik bernegara yang demokratis dan kokoh antara lain berupa : Pertama, penerapan sistem pemerintahan presidensiil yang menegaskan pembatasan kekuasaan antara kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif melalui mekanisme *check and balances*. Kedua, penerapan otonomi daerah dalam arti yang seluas-luasnya berupa distribusi kekuasaan politik dan ekonomi dari pusat ke daerah untuk mengelola dan mengatur urusan rumah tangganya sendiri. Penerapan otonomi ini memungkinkan daerah mengeksplorasi keunikannya masing-masing semaksimal mungkin, sehingga memiliki keunggulan komparatif dan bahkan bisa juga keunggulan absolut di dalam kancah persaingan global.

2.1.5.2 Peranan Sektor Industri Dalam Pembangunan Ekonomi

Seperti yang telah dijelaskan pada penjelasan-penjelasan terdahulu, bahwa menurut pandangan *agricultural fundamentalism* sektor pertanian adalah merupakan sektor yang dapat menunjang pada pengembangan sektor-sektor yang lain terutama sektor industri, melalui apa yang disebut sebagai *backward and forward linkages*. Sebaliknya menurut pandangan *industrial fundamentalism*, yang menyatakan bahwa pengembangan sektor industri dalam suatu pembangunan ekonomi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan riil per kapita dalam masyarakat, karena sektor industri mempunyai *backward and forward linkages* yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian

dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika teori-teori pertumbuhan yang telah berkembang pada umumnya basis analisisnya adalah pengembangan sektor industri.

Sejak terjadi Revolusi Industri di Inggris pada abad ke 18, semua orang melihat terjadi perubahan yang luar biasa pada perekonomian Inggris pada saat itu. Pertumbuhan ekonomi Inggris meningkat dengan pesat, tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja juga meningkat dengan cepat, tenaga kerja di sektor pertanian berkurang secara signifikan. Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai teori tentang pertumbuhan dan sebab-sebab pertumbuhan.

Sektor industri kemudian dianggap sebagai *leading sector* yang patut dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi. Yang kemudian berkembang adalah munculnya anggapan bahwa pembangunan ekonomi analog dengan industrialisasi. Yang pada akhirnya memicu perdebatan antara pengutamaan pengembangan sektor pertanian atau sektor industri dalam pembangunan ekonomi. Asumsi-asumsi yang mendasari bagi penganut industri sebagai *leading sector* ini didasari, bahwa dengan berkembangnya sektor industri, maka akan memacu dan mengangkat pembangunan di sektor-sektor lain seperti sektor pertanian dan sektor jasa. Pertumbuhan industri yang pesat akan merangsang pertumbuhan sektor pertanian untuk menyediakan bahan baku bagi industri. Sektor jasa akan meningkat dengan berkembangnya lembaga-lembaga keuangan yang memfasilitasi kebutuhan sektor industri. Dengan kondisi yang seperti ini, berarti terjadi perluasan lapangan kerja yang sangat signifikan yang

pada akhirnya meningkatkan pendapatan dan permintaan masyarakat (daya belinya). Kenaikan pendapatan dan peningkatan daya beli (permintaan) tersebut menunjukkan bahwa perekonomian tersebut tumbuh pesat.

Chenery and Taylor (1968), melakukan penelitian tentang peranan sektor primer (pertanian) dan sektor industri dan sektor jasa dalam pembentukan *GNP* dari beberapa negara yang sedang melakukan pembangunan ekonominya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama proses pembangunan ekonomi, terjadi kenaikan sumbangan sektor industri dan sektor jasa dan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan *GNP* negara-negara yang sedang membangun ekonominya.

Menurut Lane and Robertson (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan sektor industri dan melambannya pertumbuhan sektor pertanian selama proses pembangunan ekonominya, adalah karena terjadinya perbedaan investasi di antara kedua sektor tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat produktivitas faktor-faktor produksi diantara kedua sektor tersebut. Seperti yang dijelaskan oleh Lane and Robertson, bahwa metode produksi yang dipergunakan oleh sektor pertanian adalah padat tenaga kerja (*labor intensive*), sebaliknya metode produksi yang dipergunakan di sektor industri adalah padat modal yang disertai dengan investasi sumber daya manusia yang dilakukan secara intensif (*physical and human investment intensive*). Pada kondisi yang seperti ini, dapat dipastikan terjadi

perbedaan tingkat produktivitas diantara kedua sektor tersebut. Dan jika terjadi pelarian tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri karena di sektor pertanian terjadi surplus tenaga kerja, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuhan di sektor industri dan secara bersamaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Dari penjelasan tersebut, maka dapatlah dikatakan bahwa peranan sektor industri dalam pembangunan ekonomi yang ditunjukkan dengan peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi adalah sangat besar, tetapi peranannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan peranannya dalam menciptakan kondisi distribusi pendapatan dalam masyarakat belum merata (sangat kecil).

2.1.6 Interaksi Antara Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri Dan Pertumbuhan Ekonomi

Dengan semakin meningkatnya perhatian terhadap teori pertumbuhan, penelitian-penelitian terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi semakin meningkat dalam beberapa dekade terakhir ini. Banyak literatur yang memfokuskan terutama pada determinan dari pertumbuhan ekonomi secara agregat sehingga perhatian terhadap pertumbuhan ekonomi sektoral mulai berkurang. Pertumbuhan sektoral ini lebih banyak dikembangkan dan dibangun dari model-model dualisme perekonomian yang terutama dipelopori oleh Lewis (1954) dan Hirschman (1958). Model-model ini berusaha untuk menjelaskan pertumbuhan ekonomi dengan menekankan peranan sektor pertanian dan industri serta interaksi antara kedua sektor

tersebut. Model dualisme dalam suatu perekonomian memandang bahwa sektor pertanian merupakan basis dari peningkatan perekonomian, yang merupakan pembangkit kebutuhan modal untuk menuju tahap "*take-off*" memasuki tahap kedua dari tahapan pembangunan ekonomi, yaitu industrialisasi, dan ketika industrialisasi sudah tercapai, maka sektor pertanian menjadi semakin berlebihan. Sektor pertanian merupakan sektor yang dapat mendukung penyediaan bahan baku bagi sektor industri. Tanpa adanya dukungan yang kuat dari sektor pertanian, sektor industri tidak mungkin berkembang.

Pendapat-pendapat tentang dualisme perekonomian pada umumnya mengangkat dua isu yang keduanya terkesan sangat didasarkan pada intuisi saja tentang tahap pembangunan berikutnya. Yang pertama, pendapat yang kurang mempercayai sektor pertanian sebagai sektor yang penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi. Yang kedua, pendapat yang mengenyampingkan mekanisme umpan balik antara sektor pertanian dengan industri, dan dalam perkembangannya, saat ini banyak yang menentang pendapat-pendapat tersebut. Misalnya Gopinath *et al.* (1996) menganalisis kemungkinan keterkaitan antara sektor pertanian dengan Industri. Menurut mereka meningkatnya produktivitas sektor pertanian akan mempengaruhi perkembangan dalam industri pengolah makanan. Dengan semakin rendahnya harga bahan baku yang hasil-hasil produk pertanian, maka harga jual dalam industri pengolah makanan akan menjadi murah. Sehingga dengan demikian keterkaitan antara kedua sektor tersebut akan terjadi setiap waktu.

Selanjutnya Martin *and* Mitra (1998) menganalisis faktor produktivitas total dan “kecembungannya” (*convergence*) pada sektor pertanian dan industri manufakturing untuk sampel besar dari negara pada setiap tingkat pembangunan ekonominya. Mereka menemukan hasil bahwa produktivitas sektor pertanian lebih cembung dibandingkan sektor industri manufakturing, yang artinya, pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih besar dibandingkan sektor industri manufakturing. Temuan ini bertolak belakang dari pandangan selama ini yang menyatakan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Misalnya Lewis (1954) menyatakan bahwa sektor industri adalah mesin pertumbuhan, dengan demikian proses pertumbuhan didasarkan pertumbuhan industri-industri baru yang memanfaatkan surplus tenaga kerja di sektor pertanian. Dengan cara yang agak berbeda Matsuyama (1992) yang mengembangkan model pertumbuhan endogen pada kesempatan kerja penuh (*full-employment endogenous growth model*) menyatakan bahwa dengan asumsi tidak ada pertumbuhan produktivitas di sektor pertanian, maka pertumbuhan produktivitas di sektor industri akan tergantung pada kesempatan kerja di sektor industri. Sehingga dengan semakin berkurangnya kesempatan kerja di sektor pertanian, akan meningkatkan kesempatan kerja di sektor industri dan tercipta pertumbuhan ekonomi.

Kalau memperhatikan pendapat dari Lewis dan Matsuyama tersebut, dapatlah diketahui bahwa salah satu faktor yang dapat

menciptakan pertumbuhan ekonomi adalah karena terjadinya sifat persaingan antara tenaga kerja di sektor pertanian dengan industri. Dengan kata lain, bahwa jika tenaga kerja di sektor pertanian berkurang, maka tenaga kerja di sektor industri akan meningkat, atau juga dapat dikatakan bahwa pertumbuhan ekonomi akan meningkat salah satunya disebabkan karena adanya mobilitas tenaga kerja antar sektor. Tetapi menurut Ratto and Torvik (2003), pendapat yang menyatakan akan terjadi persaingan dalam penggunaan tenaga kerja di sektor pertanian dengan industri adalah pendapat yang terlalu optimistik. Di sub-Saharan Africa, surplus tenaga kerja yang ada tergolong tenaga kerja tidak mempunyai keahlian (*un-skilled labor*), sehingga adanya pengurangan tenaga kerja di sektor pertanian, tidak berpengaruh apa-apa terhadap pertumbuhan ekonomi. Faktor inilah yang menyebabkan kegagalan pembangunan sektor industri di sub-Saharan Africa dan rata-rata negara yang sedang berkembang. Kasus yang seperti ini juga terjadi di Indonesia, dan Provinsi Jawa Timur. Artinya meningkatnya peranan sektor industri dalam pembentukan PDB/PDRB ternyata tidak disertai dengan adanya pergeseran tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri. Pada umumnya surplus tenaga kerja di sektor pertanian di Indonesia ataupun di Provinsi Jawa Timur, adalah merupakan tenaga kerja yang tidak berketerampilan (*un-skilled labor*), sehingga tidak dapat dimanfaatkan oleh sektor industri. Akibatnya, yang terjadi adalah fenomena terjadinya pertumbuhan tanpa adanya transformasi struktural.

2.1.7 Otonomi Dan Pembangunan Daerah

Sebagai hasil reformasi pada Tahun 1998, sentralisasi yang dominan dengan wewenang pemerintahan utama ditangan Pemerintah Pusat kini bergeser dengan desentralisasi ke Pemerintahan Daerah. Hal ini akan menimbulkan perubahan yang penting yang merupakan tonggak perubahan dalam strategi dan kebijakan pembangunan bangsa Indonesia dibandingkan dengan masa pemerintahan Orde Baru. Sistem pemerintahan yang dulunya sentralistik berubah menjadi sistem pemerintahan yang desentralistik dengan dikeluarkannya Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, kemudian diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang 33 Tahun 2004, membawa angin segar guna tercapainya otonomi daerah. Kedua undang-undang tersebut berjiwakan desentralisasi dan otonomi yang diimplementasikan pada tanggal 1 Januari 2001. Tentu saja interpretasi tentang desentralisasi dan otonomi ini harus diposisikan dengan benar. Pemahaman tentang desentralisasi dan otonomi tidak beragam antara pendapat satu dengan yang lainnya.

Ada beberapa pengertian tentang desentralisasi, dekonsentrasi, dan otonomi. Sesuai dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 pasal1 ayat (6), (7), (8), dan (9) menyebutkan bahwa : daerah otonom, selanjutnya disebut daerah, adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan

mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan wewenang pemerintahan oleh Pemerintah kepada Gubernur sebagai wakil pemerintah dan atau kepada instansi vertikal di wilayah tertentu. Tugas pembantu adalah penugasan dari pemerintah kepada daerah dan atau desa dari Pemerintah Provinsi kepada kabupaten/kota dan atau desa serta dari pemerintah kabupaten/kota kepada desa untuk melaksanakan tugas tertentu.

Sesuai dengan undang-undang Nomer 32 Tahun 2004 pasal 157 menyebutkan bahwa sumber pendapatan daerah berasal dari :

1. Pendapatan asli daerah yang selanjutnya disebut PAD, yaitu :
 - a. Hasil Pajak Daerah;
 - b. Hasil Retribusi Daerah;
 - c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan
 - d. Lain-lain PAD yang sah.
2. Dana perimbangan; dan
3. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Kenyataan yang terjadi dari sumber pendapatan daerah tersebut, Pendapatan Asli Daerah (PAD) hampir di seluruh kabupaten/kota di Indonesia kontribusinya kecil sekali dibandingkan dengan Dana

Perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah. Masalah keuangan daerah merupakan suatu dilema bagi daerah otonom. Di satu pihak, dengan prinsip otonomi daerah, undang-undang mewajibkan daerah yang bersangkutan untuk mengurus rumah tangganya sendiri, baik urusan rutin maupun tugas-tugas dalam pembangunan daerah. Di lain pihak justru pembiayaan urusan rutin rumah tangga daerah otonom ini yang harus dibantu oleh Pemerintah Pusat. Kewajiban otonomi daerah tersebut membutuhkan biaya yang seharusnya disediakan sendiri oleh daerah dari sumber keuangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah Pusat dan sumber lain yang ada di daerah.

Menurut Halim (2001: 167-169), ciri utama yang menunjukkan suatu daerah mampu melaksanakan otonomi adalah:

1. Kemampuan keuangan daerah, artinya daerah harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan, mengelola, dan menggunakan keuangannya sendiri yang cukup memadai untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahannya;
2. Ketergantungan kepada bantuan pusat harus seminimal mungkin agar Pendapatan Asli Daerah (PAD) harus menjadi bagian sumber keuangan terbesar yang didukung oleh kebijakan perimbangan keuangan pusat dan daerah, sehingga peranan pemerintah daerah menjadi lebih besar.

Kemudian Rasyid (2000 : 88) menyatakan bahwa ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu menyelenggarakan otonomi daerahnya terletak pada kemampuan keuangan daerahnya. Artinya daerah

otonom harus memiliki kewenangan dan kemampuan untuk menggali sumber-sumber keuangan daerah sendiri yang cukup untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerahnya. Sumber keuangan daerah yang dimaksud tidak lain adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Kondisi tersebut akan berhasil bila sumber daya manusianya berkualitas, yang diikuti oleh manajemen pemerintahan yang handal, dengan tujuan untuk dapat meningkatkan perekonomiannya, serta punya kemampuan untuk menggali potensi daerah lebih cepat lagi. Bila keadaan ini dapat dilakukan dengan baik, maka kesejahteraan akan dapat ditingkatkan dibandingkan sebelum adanya otonomi daerah, sebab dalam era keterbukaan perekonomian global diperlukan tenaga yang berkualitas.

Rasyid (2000 : 78) menyatakan pengertian desentralisasi dan otonomi daerah sebenarnya mempunyai tempat masing-masing. Istilah otonomi lebih cenderung pada *Political Aspect* (aspek politik kekuasaan negara), sedangkan desentralisasi lebih cenderung pada *administrative aspect* (aspek administrasi negara). Dilihat dalam prakteknya, kedua istilah tersebut mempunyai keterkaitan yang erat, dan tidak dapat dipisahkan. Artinya jika berbicara otonomi daerah, tentu akan menyangkut pertanyaan seberapa besar wewenang untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan yang telah diberikan sebagai wewenang rumah tangga daerah?, demikian pula sebaliknya.

Kemudian Manan (1994 : 21) menyatakan bahwa: penyelenggaraan azas desentralisasi menghasilkan daerah otonom, sedangkan urusan yang

diserahkan kepada daerah otonom yang menjadi hak atau wewenangnya disebut otonomi daerah atau otonomi saja. Otonomi berarti memerintah sendiri atau mengandung arti kemandirian untuk mengatur dan mengurus urusan rumah tangganya sendiri.

Konsekuensi dari perubahan sistem pemerintahan yang sentralistik menjadi desentralistik yang dikenal dengan sebutan “otonomi daerah” seperti yang telah dijelaskan di atas, adalah terjadinya perubahan dalam paradigma sistem perencanaan pembangunannya. Kalau sebelum diberlakukannya otonomi daerah, sistem perencanaan pembangunannya adalah “*top-down blueprint*”, maka setelah diberlakukannya otonomi daerah sistem perencanaan pembangunannya adalah “*bottom-up learning*”.

Implikasinya adalah bahwa pada era otonomi daerah ini, baik daerah kabupaten/kota maupun daerah provinsi, dapat menentukan arah strategi dan kebijakan pembangunan daerahnya secara sendiri dengan berdasarkan faktor *endowment* yang dimiliki oleh masing-masing daerah tersebut.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi landasan awal ide dari disertasi yang disusun adalah sebagai berikut:

1. Gopinath *et al.* (1996), dalam penelitiannya dengan judul *Competitiveness of U.S. Food Processing: Benefit from Primary Agriculture*. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa terdapat hubungan dan interaksi yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri. Mereka menemukan hubungan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan makanan. Meningkatnya produktivitas di

sektor pertanian akan diikuti dengan semakin murah nya harga *input* di sektor industri pengolahan makanan. Dan dengan semakin murah nya harga *input* tersebut, maka permintaannya akan mengalami peningkatan.

2. Kuznet (1971), dalam penelitiannya dengan judul *Economic Growth of Nations, Total Out-put and Production Structure*, meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur pada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonominya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : a. Adanya pergeseran penurunan peranan sektor pertanian dan produk-produk primer lainnya seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan. Dan sebaliknya terjadi peningkatan peranan sektor industri dan jasa dalam perekonomian yang sedang mengalami pembangunan ekonominya. b. Bahwa awal pertumbuhan ekonomi yang terjadi selalu ditandai dengan meningkatnya akumulasi modal secara fisik (*physical capital accumulations*).
3. Martin and Mitra (1998) dalam penelitiannya dengan judul *Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing, Development Research Group, World Bank and Department of Economics*, meneliti pertumbuhan total produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri dengan mempergunakan sampel besar dari banyak negara pada berbagai tingkat pembangunan ekonominya. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : a. Sektor pertanian lebih produktif dibandingkan sektor industri. b. Di samping itu diketahui pula

bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas sektor industri.

4. Syrquin (1986), dalam penelitiannya dengan *Productivity Growth and Factor Reallocation*, in Chenery, H, Robinson and Syrquin M, eds, *Industrialization and Growth a Comparative Study*, melakukan penelitian untuk memperbandingkan produktifitas total dari faktor produksi (*total factor productivity*) antara sektor pertanian dengan sektor industri. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa : produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri selama tahap yang penting dari proses pertumbuhan.
5. Jorgensen *et al.* (1987) dalam penelitiannya dengan judul *Productivity and U.S. Economic Growth*, melakukan penelitian dengan mempergunakan pendekatan fungsi biaya untuk setiap sektor di Amerika Serikat dan mengestimasi tingkat pertumbuhan produktifitas sektoral. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa: pertumbuhan produktivitas pada sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang lainnya.
6. Lewis *et al.* (1988), dalam penelitiannya dengan judul *Capital and Investment in The Agricultural Economic*, melakukan penelitian dengan mempergunakan model fungsi produksi untuk menghitung pertumbuhan produktifitas sektor pertanian dan sektor industri serta sektor jasa di Australia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : pertumbuhan produktifitas sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan kedua sektor yang lain.

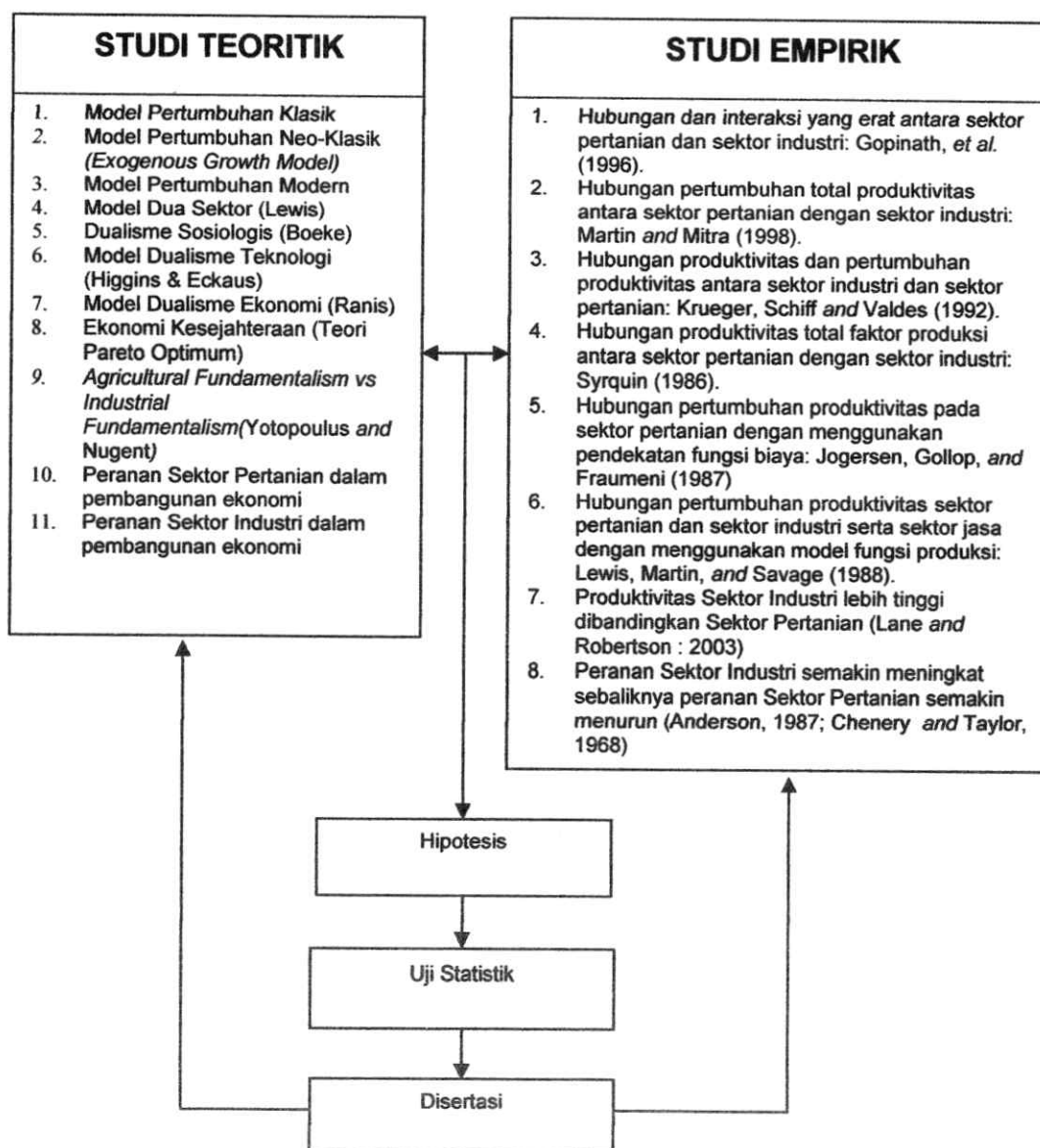
7. Mursinto, (2004) dalam penelitiannya yang berjudul “Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten Dan Kota pada awal Otonomi Daerah Di Provinsi Jawa Timur” satu diantara hasil penelitiannya yaitu bahwa derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih rendah dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah bersifat konsultatif. Model derajat desentralisasi fiskal tidak dapat dipakai sebagai ukuran tingkat kemandirian daerah pada awal otonomi daerah.
8. Radianto, (1987) dalam penelitiannya yang berjudul “Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Kenaf di Kabupaten Gresik Jawa Timur” memperoleh hasil penelitiannya yaitu bahwa salah satu faktor rendahnya produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah karena rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga penggunaan tenaga kerja dalam usahatani tidak dapat optimal.

BAB 3

KERANGKA KONSEPTUAL DAN HIPOTESIS

3.1 Kerangka Konseptual

Berlandaskan latar belakang masalah, landasan teoritik dan hasil penelitian-penelitian terdahulu, maka disusun kerangka konseptual penelitian, dengan kerangka proses berpikir sebagaimana tercantum pada Gambar 3.1 berikut :



Gambar 3.1
KERANGKA PROSES BERPIKIR

Secara umum, kerangka proses berpikir dari penelitian ini dilandaskan pada dua hal, yaitu fenomena studi teoritik dan studi empirik yang berkaitan dengan substansi materi penelitian. Fenomena studi teoritik, pada hakikatnya menjelaskan proses berpikir deduktif, yaitu dari fenomena umum berdasarkan teori-teori yang relevan kemudian dipergunakan sebagai landasan berpikir dari penelitian. Sebaliknya fenomena studi empirik, pada hakikatnya menjelaskan proses berpikir induktif, artinya hasil penelitian-penelitian sejenis dengan penelitian ini dipertimbangkan sebagai landasan proses berpikirnya. Interaksi antara kedua fenomena (studi teoritik dan empirik) tersebut, pada akhirnya membentuk hipotesis penelitiannya. Dengan kata lain, panah bolak balik dari studi teoritik dengan studi empirik menggambarkan proses berfikir deduktif (teoritik) dengan proses berfikir induktif (empirik) sehingga dapat dirumuskan hipotesis. Dengan melakukan pengujian atas hipotesis penelitian tersebut, maka hasilnya akan menjadi pokok-pokok temuan penelitian dari disertasi ini, yang diharapkan akan memberi sumbangan terhadap fenomena studi teoritiknya dan sekaligus memberi sumbangan terhadap fenomena studi empiriknya. Artinya, panah dari disertasi ke studi teoritik menggambarkan bahwa disertasi yang dihasilkan mempunyai kontribusi terhadap pengembangan teori. Sedangkan panah dari disertasi ke studi empirik menggambarkan bahwa disertasi yang dihasilkan mempunyai kontribusi terhadap hasil-hasil penelitian empirik. Secara keseluruhan kerangka proses berpikir dari penelitian dapat dijelaskan sebagai berikut :

Dari aspek fenomena studi teoritiknya dapat diketahui bahwa teori-teori ekonomi pembangunan yang berkembang pada awalnya adalah teori pertumbuhan. Oleh karena itu, pembangunan ekonomi biasanya selalu diartikan meningkatnya pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita riil yang disertai dengan terjadinya pertumbuhan struktur ekonomi. Teori pertumbuhan diperkenalkan oleh Smith yang dianggap sebagai pemikir Teori pertumbuhan klasik yang kemudian diikuti oleh Ricardo dengan teori *the law of diminishing marginal product* yang terkenal itu. Teori Pertumbuhan Klasik menganggap bahwa faktor utama yang dapat memicu terjadinya pertumbuhan ekonomi adalah produktivitas tenaga kerja yang dapat dicapai melalui spesialisasi (*division of labor*).

Kemudian teori-teori klasik tersebut dikembangkan lagi oleh Harrod and Domar yang dikenal dengan Teori Pertumbuhan Keynesian, yang kemudian diperbaiki oleh Ekonom neo-klasik, Solow and Swan. Teori Pertumbuhan Keynesian berpendapat bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi diperlukan investasi. Dengan demikian mereka berpendapat bahwa faktor utama yang menyebabkan pertumbuhan ekonomi selama proses pembangunan adalah adanya investasi. Berdasarkan teori Pertumbuhan yang ada, maka berkembang pesat teori-teori pertumbuhan yang lain yang dapat dikelompokkan ke dalam Teori Pertumbuhan Modern.

Pada umumnya Teori Pertumbuhan Modern ini menyatakan bahwa perbedaan antara negara-negara maju dengan yang sedang berkembang, hanyalah terletak pada perbedaan dalam derajat modernitas saja.

Ukuran-ukuran yang biasa dipakai dalam mengukur derajat modernisasi ini adalah peralatan produksi, bantuan modal, transfer pengetahuan, sehingga dengan demikian negara-negara yang sedang berkembang akan dapat mencapai tahap sebagai negara industri sesegera mungkin. Oleh karena itu, model-model ini lebih dikenal dengan Model Pertumbuhan Ekonomi Modernisme. Dalam model pembangunan ekonomi dipandang sebagai suatu kenaikan produksi dan efisiensi yang diukur terutama dari tingkat pendapatan per kapita.

Teori ini juga memandang bahwa faktor internal dalam suatu negara seperti rendahnya tingkat pendidikan, struktur pertanian tradisional, dan sikap tradisional dari penduduk, rendahnya spesialisasi kerja, kurangnya prasarana dan sarana komunikasi serta infrastruktur lainnya, adalah merupakan sebab-sebab dari keterbelakangan suatu negara. Selain itu pula mereka memandang bahwa perbedaan dalam struktur dan latar belakang suatu negara mempunyai pengaruh yang kecil terhadap keterbelakangan, di samping mereka juga mengabaikan adanya faktor ketergantungan dengan negara lain.

Selain teori-teori pertumbuhan modern yang selalu melihat fenomena, bahwa selama proses pembangunan ekonomi, selalu diikuti oleh terjadinya pergeseran struktur ekonomi dari dominasi sektor pertanian ke sektor industri. Oleh karena itulah kemudian banyak ahli ekonomi yang tertarik untuk mendalami dan membuat perbandingan dan interaksi antara sektor pertanian dengan sektor industri selama proses pembangunan berlangsung, terutamanya peranan kedua sektor tersebut

dalam pembangunan ekonomi yang diindikasikan melalui peranannya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan dalam menciptakan distribusi pendapatan yang merata. Dengan demikian, pada hakikatnya teori-teori pertumbuhan modern ini lebih mencari dan mengeksplorasi perbandingan antara peranan sektor pertanian dengan sektor industri dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi selama proses pembangunan, sehingga dengan demikian dapat menentukan strategi pembangunan ekonomi pada masa yang akan datang.

Sejak Lewis memperkenalkan teori pembangunannya yang dikenal dengan Model Dua Sektor Lewis (*Lewis two sector model*) pada Tahun 1954 dalam salah satu artikelnya yang terkenal, yang berjudul "*Economic Development With Unlimited Supplies of Labor*", maka dunia disadarkan bahwa dalam proses pembangunan ekonomi seringkali memunculkan situasi dimana yang terjadi adalah semakin meningkatnya dari sektor yang disebut sebagai sektor modern (sektor industri) yang diikuti oleh semakin menurunnya sektor lain yang disebut sebagai sektor tradisional (sektor pertanian), yang selanjutnya kondisi yang demikian ini dikenal dengan "dualisme ekonomi". Oleh karena itu tidak mengherankan jika kemudian model yang dibangun oleh Lewis tersebut menjadi teori umum dari pembangunan ekonomi untuk negara-negara yang mempunyai surplus tenaga kerja.

Sebenarnya terdapat bermacam-macam konsep "dualisme". Misalnya Boeke, memperkenalkan "dualisme sosiologis" (*Sociological Dualism*) yang menekankan adanya perbedaan antara perekonomian

negara-negara barat dengan kultur dan tujuan-tujuan yang hendak dicapai oleh negara-negara *non* barat. Atau Higgins dan Eckaus yang memperkenalkan konsep "dualisme teknologi" (*Technological Dualism*) yang menekankan adanya perbedaan antara variabel faktor proporsi dengan koefisien konstan pada sektor modern. Selanjutnya ada juga yang memandang dualisme dari sisi terjadinya ketidak simetrisan keberadaan antara sektor yang satu dengan yang lain. Teori Lewis sendiri pada hakikatnya perkembangan dari pandangannya terhadap adanya dualisme di pasar tenaga kerja (*Dualism in Labor Market*) yang kemudian lebih dianalogkan sebagai "dualisme ekonomi" (Ranis, 2003).

Ketika tujuan akhir dari pembangunan adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka penjelasan berikutnya adalah dengan menjelaskan konsep dan teori "*Pareto Optimum*" atau "*Pareto Efficient*", yang merupakan konsep yang menunjukkan bahwa alokasi faktor produksi dan barang jasa berada pada suatu titik yang paling efisien/optimal. Pada kondisi yang seperti ini tingkat kesejahteraan masyarakat dinilai optimal karena tercapainya distribusi yang merata dan pada saat yang bersamaan alokasi barang dan jasa mencapai tingkat yang paling efisien (*Pareto Optimum*). Sebab alokasi faktor-faktor produksi serta barang dan jasa bisa mencapai titik yang paling efisien, tetapi kondisi distribusinya kepada masyarakat tidak merata. Oleh karena itu untuk mencapai tingkat kesejahteraan yang optimal adalah dengan menciptakan distribusi yang merata pada saat alokasinya mencapai tingkat efisiensi yang tinggi (*Pareto Optimum*). Dalam perkembangan

berikutnya, semua ahli menyepakati penggunaan *Human Development Index* (HDI) atau Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dalam mengukur tingkat kesejahteraan masyarakat berdasarkan konsep *Pareto Optimum* ini.

Berkaitan dengan teori dualisme yang telah dijelaskan, pokok bahasan di hampir keseluruhan referensi selalu memunculkan pertentangan antara eksistensi dan pilihan antara sektor pertanian dan sektor industri dalam proses pembangunan. Yotopoulos and Nugent, mengistilahkan kondisi ini sebagai *agricultural fundamentalism versus industrial fundamentalism*. Jika dalam proses pembangunan lebih memilih sektor pertanian katimbang sektor industri, maka dapat digolongkan sebagai *agricultural fundamentalism*. Sebaliknya jika lebih menitik beratkan pembangunan sektor industri katimbang sektor pertanian maka dapat digolongkan sebagai *industrial fundamentalis*.

Untuk memperjelas pernyataan di atas, maka perlu juga dijelaskan seberapa besar peranan sektor pertanian dan sektor industri dalam proses pembangunan ekonomi daerah, dalam konteks penjelasan teoritisnya. Bahwa sektor pertanian mempunyai tingkat produktivitas yang lebih rendah dibandingkan dengan sektor industri. Dan karena itu peranan sektor industri dalam kontelasi pembangunan ekonomi selalu dinilai lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika pilihan strategi pembangunan dengan menempatkan sektor industri sebagai "*leading sector*" hampir diimplementasikan di setiap negara yang

sedang melaksanakan pembangunan ekonominya. Namun bagaimanapun juga pendapat ini masih mengandung pro-kontra di antara para ahli pembangunan ekonomi, yang kemudian memaksa para ahli melakukan penelitian (fenomena studi empirik) untuk mengetahui bagaimana sebenarnya hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri

Dari berbagai penelitian (fenomena studi empirik) yang telah dilakukan tersebut, ada yang memperoleh hasil bahwa sebenarnya sektor pertanian memberikan kontribusi juga terhadap perkembangan sektor industri dalam bentuk penyediaan bahan baku. Jika sektor industri mengalami pertumbuhan yang tinggi seharusnya sektor pertanian juga mengalami hal yang sama. Sehingga kedua sektor tersebut dapat berjalan bersama-sama. Seperti yang telah disinggung pada BAB 1 bagaimana antara Gopinath *et al.* (1996) dengan Martin *and* Mitra (1998) mempunyai perbedaan pandangan dalam konteks ini.

Meskipun demikian, perbedaan pandangan tentang dualisme perekonomian yang bersumber dari teori Lewis tersebut, nampaknya lebih cenderung mengarah pada perbedaan pandangan dalam hal perbedaan tingkat produktivitas dan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dengan sektor industri. Kepercayaan terhadap perbedaan produktivitas dan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri mempunyai implikasi yang sangat penting bagi pemilihan kebijakan dan strategi pembangunan suatu negara. Di banyak negara yang sedang berkembang, berkembangnya kepercayaan bahwa

produktifitas dan pertumbuhan produktifitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian menyebabkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang diambil lebih memprioritaskan sektor industri ketimbang sektor pertanian (Krueger *et al.* 1992).

Meskipun demikian, kegagalan-kegagalan dari pendekatan ini terhadap hasil-hasil pembangunan pada akhirnya menimbulkan dorongan yang kuat untuk mempertanyakan kembali tentang kebenaran pendapat bahwa sektor industri lebih produktif dibandingkan sektor pertanian. Perbandingan produktivitas dan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri pada akhirnya menjadi pusat perhatian para peneliti di samping untuk keperluan penyusunan kebijakan dalam alokasi sumber daya, juga untuk pengembangan ilmu pengetahuan khususnya ilmu ekonomi pembangunan.

Syrquin (1986) misalnya, melakukan penelitian untuk memperbandingkan produktivitas total dari faktor produksi (*total factor productivity*) antara sektor pertanian dengan sektor industri dan memperoleh hasil bahwa produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri selama tahap yang penting dari proses pertumbuhan. Gambaran hasil penelitian terhadap pertumbuhan produktivitas total dari faktor produksi dalam penelitian Syrquin ini dilatar belakangi oleh kasus-kasus dimana data yang tersedia selama abad 19 yang secara umum menunjukkan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian.

Selanjutnya Jogersen *et al.* (1987) mempergunakan pendekatan fungsi biaya untuk setiap sektor di Amerika Serikat dan mengestimasi tingkat pertumbuhan produktivitas sektoral yang selanjutnya hasilnya menyimpulkan bahwa pertumbuhan produktivitas pada sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang lainnya. Dengan mempergunakan model fungsi produksi untuk menghitung pertumbuhan produktivitas sektor pertanian dan sektor industri serta sektor jasa di Australia, penelitian dari Lewis *et al.* (1988) ini menyimpulkan bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan kedua sektor yang lain.

Lane and Roberstson (2003), dalam suatu penelitiannya menemukan hasil bahwa produktivitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian, oleh karena pembangunan ekonomi harus lebih menekankan pembangunan sektor industri dibandingkan sektor pertanian. Anderson, (1987) maupun Chenery and Taylor (1968), juga melakukan penelitian dengan memperbandingkan peranan sektor industri dan sektor pertanian selama proses pembangunan pada negara-negara yang sedang berkembang, dan menemukan hasil bahwa sumbangan sektor industri terhadap pembentukan PDB semakin meningkat dan sebaliknya sumbangan sektor pertanian justru semakin menurun.

Berdasarkan latar belakang berkembangnya pemikiran-pemikiran seperti yang telah dijelaskan, maka studi ini dimaksudkan untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan industri

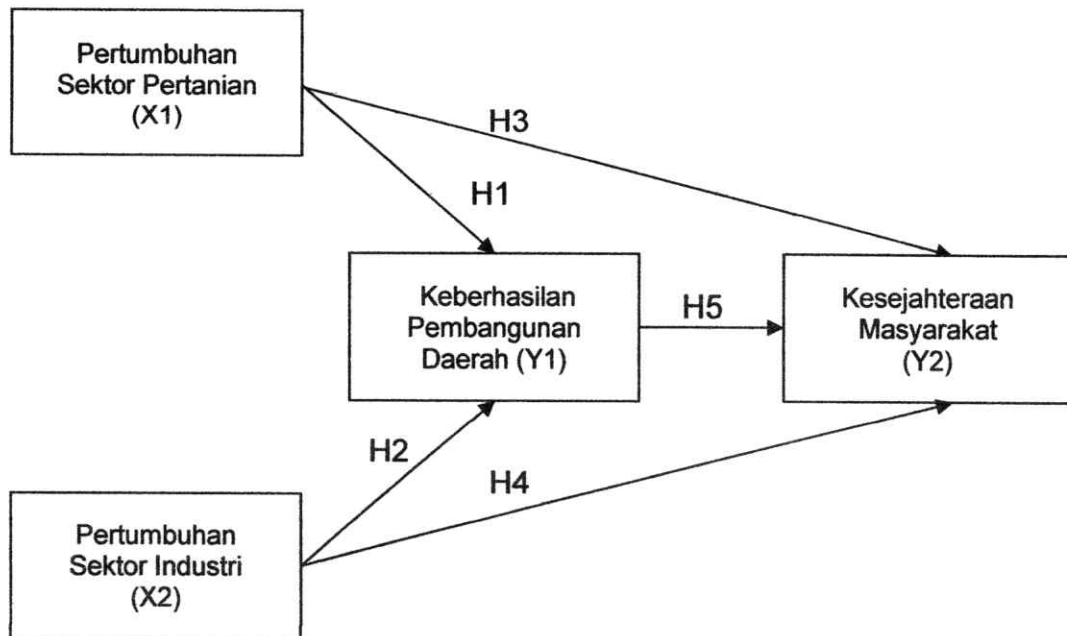
terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur dengan melihat peranan kedua sektor dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, sehingga dengan demikian dapat dipergunakan untuk memberikan bahan dan informasi dalam menetapkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur ke depan, di samping itu juga untuk memberi sumbangan pemikiran terhadap perkembangan perbedaan pendapat dalam memandang perbedaan produktivitas dan pertumbuhan produktivitas antara sektor pertanian dan sektor industri dalam konteks model dualisme ekonomi.

Kerangka konseptual dari studi ini didasarkan atas berkembangnya fenomena-fenomena yang ada dari proses serta hasil-hasil pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur yang dilakukan baik oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri maupun Pemerintah Kabupaten/Kota yang termasuk wilayah Provinsi Jawa Timur selama ini. Berdasarkan fenomena-fenomena yang terjadi tersebut, kemudian dicari dasar-dasar teori dan model-model penelitian yang sesuai dan yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk melakukan analisis terhadap berbagai aspek yang menyangkut fenomena-fenomena tersebut. Sehingga dengan demikian diharapkan dapat memperoleh berbagai data dan informasi sebagai bahan untuk melakukan penyesuaian-penyesuaian serta perbaikan-perbaikan dalam melakukan pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur.

Selama ini, kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat yang kemudian diikuti oleh pemerintahan-pemerintahan di bawahnya, adalah strategi pertumbuhan dengan menetapkan sektor industri sebagai sektor pemimpin (*leading sector*). Bersamaan dengan terjadi berbagai “reformasi” yang menyangkut banyak hal yang dimulai pada Tahun 1998 ketika Pemerintah Orde Baru jatuh, terjadi perubahan paradigma dalam pemerintahan daerah yang dikenal dengan otonomi daerah. Dengan otonomi daerah ini, kemudian daerah-daerah diberi keleluasaan dalam menentukan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi daerahnya masing-masing. Dengan kebebasan ini, diharapkan masing-masing daerah dapat menentukan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi daerah yang sesuai dengan kondisi dan potensi di daerah masing-masing.

Jika demikian, maka persoalan yang dihadapi oleh setiap pemerintahan di daerah saat ini adalah apakah akan melanjutkan strategi pembangunan daerah dengan tetap mengacu sektor industri sebagai sektor prioritas atau melakukan perubahan strategi pembangunan yang berdasarkan potensi yang dimiliki oleh suatu daerah, dalam hal ini adalah sektor pertanian. Untuk menentukan strategi dan kebijakan pembangunan yang tepat, diperlukan beberapa informasi tentang pengaruh sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di suatu daerah. Dengan informasi-informasi tersebut selanjutnya dapat ditetapkan strategi dan kebijakan pembangunan daerahnya secara tepat.

Dengan proses berpikir seperti yang telah dijelaskan, maka secara diagramatik kerangka konseptual dari penelitian ini dapat dibuat seperti yang nampak pada Gambar 3.2 halaman 109.



Gambar 3.2
KERANGKA KONSEPTUAL

Memperhatikan Gambar 3.2 halaman 110, dapatlah diketahui bahwa kerangka konseptual ini adalah dimaksudkan untuk menguji, menganalisis dan mengukur serta memperbandingkan pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Dalam pendekatan *Path Analysis* maupun *Structural Equation Models (SEM)*, pengaruh suatu variabel terhadap variabel yang lain dapat dibedakan menjadi dua pengaruh, yaitu : pengaruh langsung (*direct effect*) serta pengaruh tidak langsung (*indirect effect*). Dengan demikian untuk mengukur pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan industri terhadap

keberhasilan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, terlebih dahulu harus diketahui variabel-variabel apa saja dan yang mana saja yang merupakan pengaruh langsungnya serta variabel-variabel apa saja dan yang mana saja yang merupakan pengaruh tidak langsung.

Pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah, seperti yang digambarkan pada garis panah H1 dan H2, serta pengaruhnya terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat seperti yang digambarkan garis panah H3 dan H4, adalah merupakan pengaruh langsung (*direct effect*). Begitu juga pengaruh keberhasilan pembangunan daerah terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat, seperti yang digambarkan garis panah H5, merupakan pengaruh langsung (*direct effect*). Tetapi sektor pertanian dan industri mempunyai pengaruh tidak langsung terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui variabel keberhasilan pembangunan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas dan Gambar 3.2 halaman 110, maka pengaruh langsung Sektor Pertanian (X1) terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah (Y1) digambarkan pada garis panah H1 sedangkan pengaruh langsungnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y2) digambarkan pada garis panah H3. Selanjutnya pengaruh langsung Sektor Industri (X2) terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah (Y1) digambarkan pada garis panah H2 dan pengaruh langsungnya terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y2) digambarkan pada garis panah H4.

Kemudian pengaruh langsung Keberhasilan Pembangunan Daerah (Y1) terhadap Kesejahteraan Masyarakat (Y2) digambarkan pada garis panah H5. Dalam pengolahan datanya, yang dihitung adalah pengaruh-pengaruh langsung masing-masing variabel itu saja, sedangkan pengaruh-pengaruh tidak langsung tidak diperhitungkan. Berdasarkan hubungan pengaruh antara variabel seperti yang telah dijelaskan tersebut, maka dapat dibuat hipotesis sebagai berikut ini.

3.2 Hipotesis

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan studi, landasan teoritik, kerangka berpikir dan kerangka konseptual, maka disusun hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
4. Pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
5. Keberhasilan pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

BAB 4

METODE PENELITIAN

4.1 Rancangan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk menguji dan menganalisis pengaruh pertumbuhan sektor pertanian dan industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Penelitian dilakukan dengan menggunakan metode survei. Menurut Singarimbun (1989:3) “....Penelitian Survey adalah penelitian yang mengambil sampel dari populasi dan menggunakan kuesioner sebagai alat pengumpulan data yang pokok.....” Secara umum terdapat tiga tipe dalam penelitian sosial, yaitu : penelitian eksploratif (*explorative research*), penelitian deskriptif (*descriptive research*) dan penelitian eksplanatori (*explanatory research*).

Berdasarkan pada definisi tersebut, maka penelitian yang dilakukan ini adalah termasuk dalam kategori penelitian eksplanatori, yaitu suatu penelitian untuk menguji dan menganalisis pengaruh dan hubungan antar variabel yang ada. Penelitian ini disebut juga dengan penelitian fungsional (*functional study*) karena untuk menguji dan menganalisis fakta dengan pengaruh sebab-akibatnya.

4.2 Waktu dan Lokasi Penelitian

Lama waktu yang diperlukan untuk melaksanakan penelitian ini sekitar 6 (enam) bulan, dimulai pada bulan Desember 2007 dan berakhir

pada bulan Mei 2008. Lokasi pelaksanaan penelitian ini adalah di Provinsi Jawa Timur.

4.3 Data Penelitian

Data penelitian berupa data skunder, yang dikumpulkan dari berbagai dokumentasi yang ada pada berbagai penerbitan dan Dinas/Instansi/Unit Kerja yang terkait (BPS, Bappeda, Dinas Pertanian, Dispenda, Disnaker, Bagian Keuangan SetKab dalam wilayah Provinsi Jawa Timur) dan lembaga lainnya. Di samping itu, data penelitian ini merupakan data runtun waktu (*time series*) selama 6 tahun, yaitu dari Tahun 2001 s.d 2006.

4.4 Variabel Penelitian

4.4.1 Klasifikasi Variabel

Variabel di dalam penelitian ini terdiri dari variabel eksogen dan variabel endogen. Variabel eksogen merupakan variabel independen, sedangkan variabel endogen terdiri dari variabel intervening dan variabel dependen.

Variabel Eksogen : Independen, adalah :

1. Pertumbuhan Sektor Pertanian (X_1)
2. Pertumbuhan Sektor Industri (X_2)

Variabel Endogen : Intervening mencakup variabel, adalah :

Keberhasilan pembangunan daerah (Y_1)

Variabel Endogen : Dependen, adalah :

Kesejahteraan masyarakat (Y_2)

4.4.2 Definisi Operasional Variabel

Berdasarkan pada model yang telah dibuat, maka pada hakikatnya diketahui bahwa model yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah melibatkan variabel-variabel tentang pertumbuhan sektor pertanian dan sektor industri, serta variabel keberhasilan pembangunan daerah dan variabel kesejahteraan masyarakat, yang masing-masing dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Variabel pertumbuhan sektor pertanian adalah variabel pertumbuhan jumlah produksi riil atau *out-put* riil sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang diukur berdasarkan pertumbuhan jumlah atau besarnya nilai tambah riil (pada harga konstan) sektor pertanian, dalam satuan (%).
- b. Variabel pertumbuhan sektor industri adalah variabel pertumbuhan jumlah produksi riil atau *out-put* riil sektor industri di Provinsi Jawa Timur yang diukur berdasarkan pertumbuhan jumlah atau besarnya nilai tambah riil (pada harga konstan) sektor industri, dalam satuan (%).
- c. Variabel keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur yang diukur dari tingkat pertumbuhan ekonomi daerah atau PDRB Provinsi Jawa Timur pada harga konstan, dalam satuan (%).
- d. Variabel kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang diukur berdasarkan IPM, (diukur dalam satuan angka indeks).

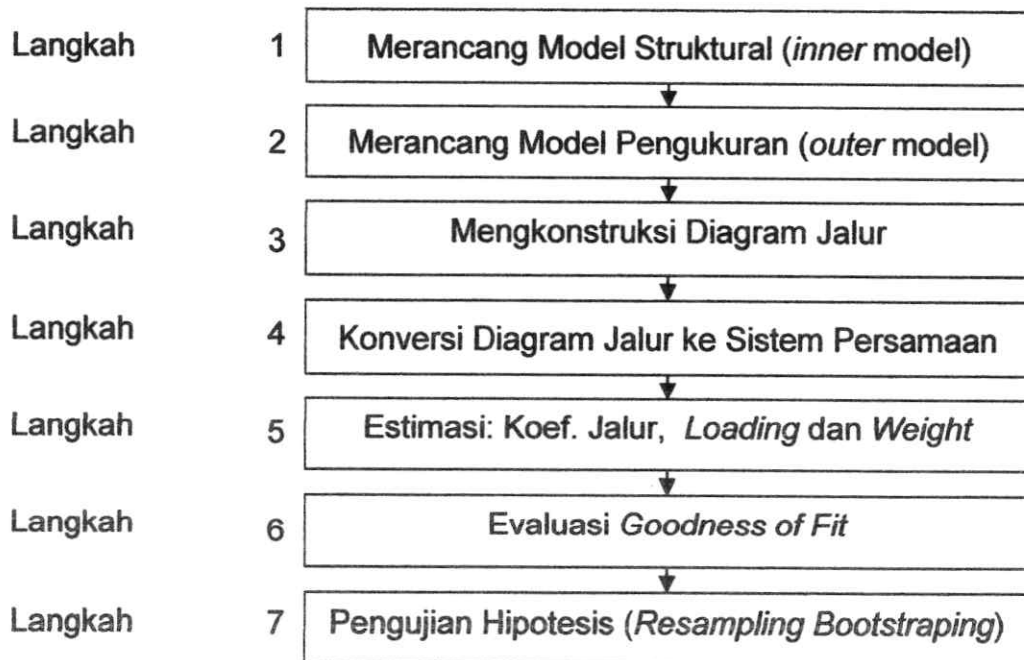
4.5 Teknik Analisis

Metode analisis data yang digunakan, sesuai dengan tujuan studi, adalah dilakukan dengan menggunakan teknik dan metode sebagai berikut :

Model analisis data yang digunakan untuk pengujian hipotesis adalah analisis *PLS (Partial Least Square)* dengan menggunakan bantuan program komputer paket *Smart PLS*, dengan alasan bahwa :

- a. Model analisisnya berjenjang dan model persamaan struktural memenuhi model rekursif.
- b. Model indikator variabel laten ada yang bersifat formatif, sehingga tidak bisa digunakan *SEM*
- c. *Sample size*-nya kecil dan tidak memenuhi untuk menggunakan *SEM (Structural Equation Model)*

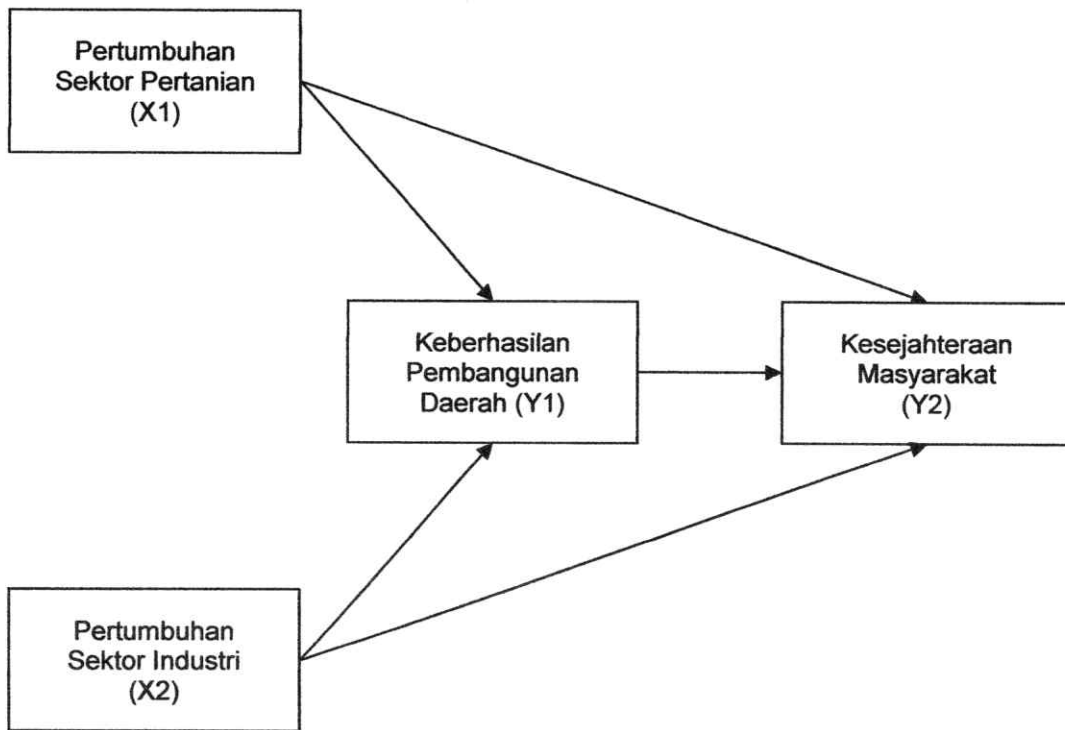
Adapun langkah-langkah di dalam analisis yang menggunakan *PLS (Partial Least Square)* dapat dilihat pada Gambar 4.1 sebagai berikut :



Gambar 4.1
LANGKAH-LANGKAH ANALISIS PLS

1. Langkah Pertama : Merancang Model Struktural (*Inner Model*)

Perancangan model struktural hubungan antar variabel laten pada *PLS* didasarkan pada rumusan masalah atau hipotesis penelitian. Hal ini dapat dilihat pada Gambar 4.2 sebagai berikut :



Gambar 4.2

INNER MODEL PADA ANALISIS PLS

2. Langkah Kedua : Merancang Model Pengukuran (*Outer Model*)

Outer model di dalam penelitian ini semua variabel berupa variabel *observable*, sehingga tidak diperlukan indikator.

3. Langkah Ketiga : Mengkonstruksi diagram Jalur

Bilamana langkah satu dan dua sudah dilakukan, maka agar hasilnya lebih mudah dipahami, hasil perancangan *inner* model dan *outer*

model tersebut, selanjutnya dinyatakan dalam bentuk diagram jalur, sebagaimana pada Gambar 4.2 halaman 117.

4. Langkah Keempat : Konversi diagram Jalur ke dalam Sistem Persamaan.

- a. *Outer Model*, yaitu spesifikasi hubungan antara variabel laten dengan indikatornya, disebut juga dengan *Outer Relation* atau *Measurement Model*. Mengingat semua variabel bersifat manifes, maka tidak diperlukan rancangan *outer model*.
- b. *Inner model*, yaitu spesifikasi hubungan antar variabel laten (*structural model*), disebut juga dengan *inner relation*, menggambarkan hubungan antar variabel laten berdasarkan teori substansif penelitian, adalah sebagai berikut :

$$\eta_1 = \gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \zeta_1$$

$$\eta_2 = \gamma\gamma_1\xi_1 + \gamma_2\xi_2 + \beta_1\eta_1 + \zeta_2$$

5. Langkah Kelima : Estimasi

Metode pendugaan parameter (estimasi) di dalam *PLS* adalah metode kuadrat terkecil (*least square methods*). Proses perhitungan dilakukan dengan cara iterasi, di mana iterasi akan berhenti jika telah tercapai kondisi konvergen.

6. Langkah Keenam : *Goodness of Fit*

Model struktural atau *inner model* dievaluasi dengan melihat persentase varian yang dijelaskan, yaitu dengan melihat R^2 untuk konstruk laten dependen, kemudian dihitung nilai *Stone-Geisser Q Square test* dengan rumus : $Q^2 = 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \dots (1 - R_p^2)$

7. Langkah Ketujuh : Pengujian Hipotesis

Pengujian hipotesis (β , γ , dan λ) dilakukan dengan metode *resampling bootstrap* yang dikembangkan oleh Geisser and Stone. Statistik uji yang digunakan adalah statistik t atau uji t, dengan hipotesis statistik sebagai berikut :

- a. Hipotesis statistik untuk *outer* model adalah :

$$H_0 : \lambda_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \lambda_i \neq 0$$

- b. Hipotesis statistik untuk *inner* model: pengaruh variabel laten eksogen terhadap endogen adalah :

$$H_0 : \gamma_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \gamma_i \neq 0$$

- c. Sedangkan hipotesis statistik untuk *inner* model : pengaruh variabel laten endogen terhadap endogen adalah :

$$H_0 : \beta_i = 0 \quad \text{lawan}$$

$$H_1 : \beta_i \neq 0$$

Penerapan metode *resampling*, memungkinkan berlakunya data terdistribusi bebas (*distribution free*), tidak memerlukan asumsi distribusi normal serta tidak memerlukan sampel yang besar (direkomendasikan sampel minimum 30). Pengujian dilakukan dengan t-test, bilamana diperoleh $p\text{-value} \leq 0,05$ (alpha 5 %), maka disimpulkan signifikan, dan atau sebaliknya. Bilamana hasil pengujian pada *inner* model signifikan, maka dapat diartikan bahwa terdapat pengaruh yang bermakna variabel laten satu terhadap variabel laten lainnya.

4.6. Analisis *Loqatient Quotient* (LQ)

Selain teknik analisis yang seperti dijelaskan pada halaman-halaman sebelumnya, penelitian ini juga mengadopsi juga metode analisis *Loqatient Quotient* (LQ), yang dipergunakan untuk mengukur kekuatan potensi masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, sehingga hal itu akan mempermudah dalam implementasi kebijakannya.

Secara sederhana analisis *Loqatient Quotient* (LQ) dapat ditulis dengan :

$$LQ = \frac{E_{ij}/E_j}{E_{in}/E_n}$$

di mana :

- E_{ij} adalah nilai tambah bruto sektor i di kabupaten/kota j
- E_j adalah nilai Total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di kabupaten/kota j
- E_{in} adalah nilai tambah bruto sektor i di Provinsi Jawa Timur
- E_n adalah nilai Total PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) di Provinsi Jawa Timur

Pada hakikatnya metode analisis *LQ* ini memang dipergunakan untuk mengetahui posisi potensi relatif masing-masing wilayah kabupaten/kota untuk sektor pertanian dan industri terhadap sumbangan kedua sektor tersebut dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Dengan mengetahui nilai *LQ* untuk sektor pertanian dan industri pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka akan dapat diketahui wilayah-wilayah kabupaten/kota yang mempunyai potensi sektor pertanian dan industri relatif dibandingkan dengan wilayah kabupaten/kota yang lainnya.

BAB 5

ANALISIS HASIL STUDI

5.1 Profil Provinsi Jawa Timur

5.1.1 Jumlah Penduduk

Provinsi Jawa Timur yang terdiri dari 29 (dua puluh sembilan) Pemerintah Kabupaten dan 9 (sembilan) Pemerintah Kota dengan jumlah penduduk nomer dua terbesar di Indonesia, setelah Povinsi Jawa Barat. Pada Tabel 5.1 halaman 124, tampak perkembangan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 s.d 2006. Pada Tahun 2001, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 35.200.079 orang/jiwa. Pada Tahun 2002, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 35.004.283 orang/jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2002 dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2001, mengalami penurunan sebesar 195.796 orang/jiwa atau terjadi penurunan 0,55%. Pada Tahun 2003, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 35.667.765 orang/jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2003 dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2002, terjadi kenaikan sebesar 663.482 orang/jiwa atau terjadi kenaikan 1,9%. Pada Tahun 2004, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 36.183.794 orang/jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2004 dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2003, terjadi kenaikan sebesar 516.029 orang/jiwa atau terjadi kenaikan 1,45%. Pada Tahun 2005, jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 36.293.239 orang/jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2005 dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2004, terjadi kenaikan sebesar 109.445 orang/jiwa atau



terjadi kenaikan 0,30%. Pada Tahun 2006 jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur 37.006.396 orang/jiwa. Jumlah penduduk pada Tahun 2006 dibandingkan jumlah penduduk Tahun 2005, terjadi kenaikan 713.157 orang/jiwa atau terjadi kenaikan 1,97%.

Jadi dari Tahun 2001 s.d 2006 rata-rata kenaikan jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur sejumlah 361.258 orang/jiwa atau 1,026%. Mengenai jumlah penduduk Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota Tahun 2001 s.d 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.1 halaman 124.

5.1.2 Kepadatan Penduduk

Dilihat dari sisi kepadatan penduduk, dapat dijelaskan pada Tabel 5.2 halaman 125, di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota kepadatan penduduk per hektarnya dari Tahun 2001 s.d 2006. Pada Tahun 2001, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 761 orang/jiwa per hektarnya. Pada Tahun 2002, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur sebesar 767 orang/jiwa per hektarnya. Dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2001, pada Tahun 2002 terjadi kenaikan sebesar 6 orang/jiwa per hektarnya atau terjadi kenaikan 0,8%. Pada Tahun 2003, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur 774 orang/jiwa per hektarnya. Dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2002, pada Tahun 2003 terjadi kenaikan sebesar 7 orang/jiwa per hektarnya atau terjadi kenaikan 0,91%. Pada Tahun 2004, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur 780 orang/jiwa per hektarnya. Dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2003, pada Tahun 2004 terjadi kenaikan kepadatan penduduk

sebesar 6 orang/jiwa per hektarnya atau terjadi kenaikan 0,78%. Pada Tahun 2005, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur 787 orang/jiwa per hektarnya. Dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2004, pada Tahun 2005 terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 7 orang/jiwa per hektarnya atau terjadi kenaikan 0,897%. Pada Tahun 2006, kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur 796 orang/jiwa per hektarnya. Dibandingkan kepadatan penduduk Tahun 2005, pada Tahun 2006 terjadi kenaikan kepadatan penduduk sebesar 9 orang/jiwa atau terjadi kenaikan 1,14% per hektarnya.

Jadi rata-rata kenaikan jumlah kepadatan penduduk per hektarnya di Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2001s.d 2006 sebesar 5,8 orang/jiwa atau 0,76%. Mengenai kepadatan penduduk Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2001 s.d 2006 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.2 halaman 125.

Tabel 5.1
Jumlah Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Jiwa)

No	Kabupaten	Jumlah Penduduk					
		2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pacitan	530.256	532.941	535.626	538.310	540.995	546.365
2	Ponorogo	798.678	801.221	803.765	806.309	810.124	816.483
3	Trenggalek	660.461	664.076	667.700	671.308	674.923	682.155
4	Tulungagung	943.690	948.922	955.199	960.430	966.707	977.169
5	Blitar	1.094.676	1.101.031	1.105.798	1.110.564	1.118.508	1.131.218
6	Kediri	1.444.264	1.453.966	1.465.055	1.474.757	1.488.618	1.509.408
7	Malang	2.404.384	2.323.940	2.329.899	2.338.834	2.359.693	2.395.446
8	Lumajang	981.413	988.577	993.950	999.322	1.006.486	1.017.231
9	Jember	2.192.747	2.205.135	2.220.001	2.232.390	2.244.778	2.264.600
10	Banyuwangi	1.520.845	1.526.628	1.535.410	1.538.193	1.549.758	1.561.324
11	Bondowoso	695.805	700.499	705.165	708.285	712.966	720.766
12	Situbondo	609.637	416.554	617.831	621.108	624.387	630.942
13	Probolinggo	1.007.956	1.017.555	1.027.155	1.036.755	1.046.354	1.059.154
14	Pasuruan	1.361.337	1.380.900	1.401.614	1.420.026	1.436.136	1.463.754
15	Sidoarjo	1.547.277	1.592.319	1.610.082	1.682.402	1.722.367	1.787.711
16	Mojokerto	923.328	938.555	954.475	968.318	983.545	1.008.463
17	Jombang	1.142.530	1.153.376	1.163.319	1.172.358	1.183.205	1.200.379
18	Nganjuk	1.008.848	1.014.970	1.022.316	1.028.437	1.038.232	1.054.148
19	Madiun	652.005	653.016	655.037	657.059	660.092	664.135
20	Magetan	622.004	622.004	621.316	620.627	621.316	621.316
21	Ngawi	830.723	633.315	837.203	839.793	844.979	851.459
22	Bojonegoro	1.185.823	1.195.057	1.204.285	1.213.514	1.222.724	1.238.891
23	Tuban	1.054.286	1.061.645	1.069.005	1.076.365	1.083.725	1.096.604
24	Lamongan	1.213.770	1.222.118	1.228.796	1.235.474	1.245.492	1.262.187
25	Gresik	1.008.938	1.026.806	1.043.482	1.060.159	1.075.645	1.100.660
26	Bangkalan	852.709	864.044	875.380	885.457	901.831	927.021
27	Sampang	801.684	812.784	823.884	883.751	848.552	874.452
28	Pamekasan	713.070	721.785	731.293	740.008	751.100	768.531
29	Sumenep	1.009.263	1.017.257	1.025.251	1.033.245	1.041.239	1.057.228
	Kota						
30	Kediri	251.508	251.698	251.888	252.015	252.906	254.361
31	Blitar	122.333	122.691	123.017	123.343	123.961	124.939
32	Malang	750.499	756.332	762.166	767.558	771.960	779.005
33	Probolinggo	194.684	196.610	198.480	200.236	202.272	205.506
34	Pasuruan	170.839	172.850	174.862	176.732	178.779	182.061
35	Mojokerto	109.130	110.101	111.089	111.994	113.673	116.389
36	Madiun	169.639	169.606	169.539	169.473	170.038	170.935
37	Surabaya	2.619.040	2.633.399	2.647.432	2.651.675	2.675.173	2.698.997
38	Batu	-	170.000	173.777	177.210	179.900	185.003
	Jawa Timur	35.200.079	35.004.283	35.667.765	36.183.794	36.293.239	37.006.396

Sumber : Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2006

Tabel 5.2
Kepadatan Penduduk Provinsi Jawa Timur Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2001 s.d 2006 (Jiwa/Ha)

No	Kabupaten	Luas Area	Kepadatan Penduduk					
		(1000Ha)	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pacitan	1.342,42	395	397	399	401	403	407
2	Ponorogo	1.271,78	628	630	632	634	637	642
3	Trenggalek	1.205,22	548	551	554	557	560	566
4	Tulungagung	1.046,22	902	907	913	918	924	934
5	Blitar	1.588,79	689	693	696	699	704	712
6	Kediri	1.386,05	1.042	1.049	1.057	1.064	1.074	1.089
7	Malang	2.979,41	807	780	782	785	792	804
8	Lumajang	1.790,90	548	552	555	558	562	568
9	Jember	2.477,68	885	890	896	901	906	914
10	Banyuwangi	5.782,68	263	264	265	266	268	270
11	Bondowoso	1.560,10	446	449	452	454	457	462
12	Situbondo	1.638,81	372	375	377	379	381	385
13	Probolinggo	1.599,93	630	636	642	648	654	662
14	Pasuruan	1.150,75	1.183	1.200	1.218	1.234	1.248	1.272
15	Sidoarjo	634,39	2.439	2.510	2.538	2.652	2.715	2.818
16	Mojokerto	692,15	1.334	1.356	1.379	1.399	1.421	1.457
17	Jombang	903,90	1.264	1.276	1.287	1.297	1.309	1.328
18	Nganjuk	1.224,33	824	829	835	840	848	861
19	Madiun	1.010,86	645	646	648	650	653	657
20	Magetan	688,82	903	903	902	901	902	902
21	Ngawi	1.295,98	641	643	646	648	652	657
22	Bojonegoro	2.307,06	514	518	522	526	530	537
23	Tuban	1.839,94	573	577	581	585	589	596
24	Lamongan	1.669,56	727	732	736	740	746	756
25	Gresik	1.191,19	847	862	876	890	903	924
26	Bangkalan	1.259,54	677	686	695	703	716	736
27	Sampang	1.233,36	650	659	668	676	688	709
28	Pamekasan	792,30	900	911	923	934	948	970
29	Sumenep	1.998,54	505	509	513	517	521	529
	Kota							
30	Kediri	63,40	3.967	3.970	3.973	3.975	3.989	4.012
31	Blitar	32,57	3.756	3.767	3.777	3.787	3.806	3.836
32	Malang	110,06	6.819	6.872	6.925	6.974	7.014	7.078
33	Probolinggo	56,66	3.436	3.470	3.503	3.534	3.570	3.627
34	Pasuruan	35,29	4.841	4.898	4.955	5.008	5.066	5.159
35	Mojokerto	16,46	6.630	6.689	6.749	6.804	6.906	7.071
36	Madiun	33,23	5.105	5.104	5.102	5.100	5.117	5.144
37	Surabaya	326,36	8.025	8.069	8.112	8.125	8.197	8.270
38	Batu			1.833	1.873	1.910	1.939	1.994
	Jawa Timur	46.335,79	761	767	774	780	787	796

Sumber : Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2006

Memperhatikan pada Tabel 5.2 halaman 125, dapat diketahui tingkat kepadatan penduduk yang tertinggi berada di wilayah Kota Surabaya. Hal ini dapat dipahami, sebab Kota Surabaya adalah merupakan ibu kota Provinsi Jawa Timur, yang menjadi pusat aktivitas berbagai kegiatan, baik kegiatan ekonomi, pemerintahan, politik dan sebagainya.

Kota Surabaya memiliki beban yang tinggi terhadap terjadinya arus urbanisasi dari daerah/wilayah lainnya. Perkembangan yang pesat dari Kota Surabaya ini mendorong wilayah-wilayah *hinterland* Kota Surabaya.. Misalnya: Gresik, Sidorajo, Mojokerto dan Jombang mengalami tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi juga.

Di samping Kota Surabaya, kota lain yang mempunyai tingkat kepadatan tinggi adalah Kota Malang. Sebagai kota yang sangat dikenal dengan sebutan Kota Pendidikan karena banyak perguruan-perguruan tinggi yang berada di Kota Malang. Tingginya kepadatan penduduk di Kota Malang ini lebih banyak disebabkan karena banyak pendatang-pendatang baik dari daerah lain maupun dari wilayah luar Pulau Jawa untuk keperluan menempuh pendidikan di Kota Malang.

5.1.3 Ketenagakerjaan

Ketenagakerjaan di Provinsi Jawa Timur adalah angkatan kerja penduduk yang sudah berusia 15 tahun ke atas. Mengenai jumlah angkatan kerja usia 15 tahun ke atas di Provinsi Jawa Timur mulai Tahun 2001 s.d 2006 menurut kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 5.3 halaman 129.

Pada Tahun 2001 ,jumlah angkatan kerja sebanyak 18.602.695 orang/jiwa atau 52,85% dari jumlah penduduk. Pada Tahun 2002, jumlah angkatan kerja sebanyak 18.199.976 orang/jiwa atau 51,99% dari jumlah penduduk. Angkatan kerja Tahun 2002 dibandingkan dengan angkatan kerja Tahun 2001, mengalami penurunan sebanyak 402.719 orang/jiwa atau turun 2,16%. Pada Tahun 2003, jumlah angkatan kerja sebanyak 18.088.856 orang/jiwa atau 50,71% dari jumlah penduduk. Angkatan kerja Tahun 2003, dibandingkan dengan angkatan kerja Tahun 2002, mengalami penurunan sebanyak 111.120 orang/jiwa atau turun 0,61%. Pada Tahun 2004, jumlah angkatan kerja sebanyak 18.422.308 orang/jiwa atau 50,91% dari jumlah penduduk. Angkatan kerja Tahun 2004, dibandingkan dengan angkatan kerja Tahun 2003, mengalami kenaikan 333.452 orang/jiwa atau turun 1,84%. Pada Tahun 2005, jumlah angkatan kerja sebanyak 19.335.190 orang/jiwa atau 53,27% dari jumlah penduduk. Angkatan kerja Tahun 2005, dibandingkan dengan angkatan kerja Tahun 2004, mengalami kenaikan 912.882 orang/jiwa atau naik 4,96%. Pada Tahun 2006, jumlah angkatan kerja sebanyak 19.244.959 orang/jiwa atau 52% dari jumlah penduduk. Angkatan kerja Tahun 2006, dibandingkan dengan jumlah angkatan kerja Tahun 2005, turun sebanyak 90.231 orang/jiwa atau turun 0,47%.

Di Provinsi Jawa Timur mengenai jumlah angkatan kerja di masing-masing sektor perekonomian selama kurun waktu dari Tahun 2001 s.d 2006 dapat dijelaskan sebagai berikut :

Tahun 2001 tingkat pengangguran 8,86% dan pada Tahun 2002 tingkat pengangguran menjadi 9,02% atau mengalami kenaikan 0,16%. Pada Tahun 2003, tingkat pengangguran sebesar 9,42% atau mengalami kenaikan 0,40% dibandingkan tingkat pengangguran Tahun 2002. Pada Tahun 2004, tingkat pengangguran sebesar 8,09% atau mengalami penurunan 1,33% dibandingkan tingkat pengangguran Tahun 2003. Pada Tahun 2005, tingkat pengangguran sebesar 8,93% atau mengalami kenaikan 0,84% dibandingkan tingkat pengangguran Tahun 2004. Pada Tahun 2006, tingkat pengangguran sebesar 8,21% atau mengalami penurunan 0,72% dibandingkan tingkat pengangguran Tahun 2005.

Dari Tahun 2001 s.d 2006, tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Timur berfluktuasi dari yang terendah 8,09% pada Tahun 2004 dan yang tertinggi pada Tahun 2003 sebesar 9,42%. Secara rata-rata tingkat pengangguran selama 6 (enam) tahun di Provinsi Jawa Timur sebesar 8,76% per tahunnya. Mengenai jumlah tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur menurut kabupaten/kota Tahun 2001 s.d 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.4 halaman 129, dan Mengenai jumlah tenaga kerja di masing-masing sektor perekonomian di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006 dapat dilihat pada Tabel 5.5 halaman 131.

Tabel 5.3
Jumlah Angkatan Kerja Usia 15 Tahun Ke Atas Provinsi Jawa Timur
Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Jiwa)

No.	Kabupaten	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pacitan	321.983	330.288	314.091	323.274	312.130	330.137
2	Ponorogo	469.073	465.249	437.612	470.009	503.892	468.608
3	Trenggalek	363.121	367.041	351.765	360.214	361.833	374.758
4	Tulungagung	520.990	497.356	510.392	515.257	547.778	534.171
5	Blitar	581.615	557.746	559.702	601.723	582.742	606.166
6	Kediri	785.121	758.620	788.154	788.360	794.444	796.032
7	Malang	1.263.544	1.268.412	1.226.094	1.251.728	1.292.133	1.279.359
8	Lumajang	522.991	523.580	531.493	518.553	519.928	521.408
9	Jember	1.100.225	1.124.834	1.045.200	1.097.802	1.135.881	1.097.415
10	Banyuwangi	824.326	798.066	812.913	804.784	884.956	820.917
11	Bondowoso	380.431	379.486	372.654	381.710	386.231	382.079
12	Situbondo	326.368	324.753	306.545	335.565	336.521	328.461
13	Probolinggo	526.633	521.074	498.828	512.801	540.161	560.305
14	Pasuruan	740.048	727.881	726.865	748.112	761.348	736.039
15	Sidoarjo	842.347	810.575	799.440	822.801	917.138	861.788
16	Mojokerto	494.293	485.784	469.638	488.400	500.795	526.852
17	Jombang	536.369	537.408	534.574	536.805	581.178	591.884
18	Nganjuk	517.948	482.977	512.571	527.997	528.150	538.051
19	Madiun	336.517	322.174	320.131	339.496	352.278	348.509
20	Magetan	353.117	349.446	335.196	355.690	355.150	370.108
21	Ngawi	433.926	411.681	417.209	436.080	457.902	446.764
22	Bojonegoro	626.743	609.208	590.139	618.260	640.001	676.113
23	Tuban	515.507	588.030	571.416	294.684	568.211	555.197
24	Lamongan	658.222	612.652	659.539	665.935	673.312	679.677
25	Gresik	524.246	529.436	494.781	541.321	509.035	546.661
26	Bangkalan	431.107	399.765	432.715	401.714	453.393	467.954
27	Sampang	400.796	359.445	418.836	407.889	397.663	420.146
28	Pamekasan	394.351	358.198	376.701	436.543	385.484	414.836
29	Sumenep	612.285	561.983	586.383	631.264	633.052	648.746
	Kota						
30	Kediri	134.195	152.290	124.721	133.460	129.163	131.347
31	Blitar	60.245	64.420	56.965	60.679	60.515	58.559
32	Malang	370.804	350.639	346.383	377.566	396.213	382.224
33	Probolinggo	89.065	85.949	82.873	90.560	95.978	89.970
34	Pasuruan	80.564	74.458	74.798	82.659	87.915	82.996
35	Mojokerto	56.192	53.344	51.745	57.885	58.650	59.341
36	Madiun	79.546	74.483	73.556	80.435	81.908	87.352
37	Surabaya	1.328.042	1.281.245	1.276.238	1.333.764	1.418.550	1.330.417
38	Batu				90.439	93.578	93.612
	Jawa Timur	18.602.695	18.199.976	18.088.856	18.422.308	19.335.190	19.244.959

Sumber : Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2006

Tabel 5.4
JumlahTingkat Pengangguran Terbuka Provinsi Jawa Timur Menurut
Kabupaten/Kota Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Persen)

No.	Kabupaten	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pacitan	4,34	3,58	4,95	4,09	5,53	3,58
2	Ponorogo	6,95	6,79	7,17	6,67	7,68	6,47
3	Trenggalek	6,49	6,18	6,00	6,37	7,92	6,05
4	Tulungagung	7,66	7,14	8,62	8,67	7,23	6,65
5	Blitar	6,37	6,12	7,47	6,63	6,03	5,63
6	Kediri	8,46	8,53	9,28	7,31	9,12	8,13
7	Malang	7,90	7,91	8,91	7,82	7,08	7,85
8	Lumajang	7,27	7,96	6,94	6,70	6,81	8,00
9	Jember	8,83	11,15	6,85	7,38	7,41	11,43
10	Banyuwangi	7,09	6,90	6,84	7,41	7,66	6,71
11	Bondowoso	4,13	3,10	5,51	4,52	4,49	3,08
12	Situbondo	5,98	6,10	5,47	6,23	6,10	6,03
13	Probolinggo	5,90	5,92	5,67	6,78	5,66	5,50
14	Pasuruan	8,44	8,99	8,97	7,90	7,48	8,89
15	Sidoarjo	9,81	9,99	8,48	8,98	12,25	9,40
16	Mojokerto	8,45	8,67	9,30	8,81	7,55	7,99
17	Jombang	11,10	10,88	12,14	10,72	12,30	9,53
18	Nganjuk	8,17	8,80	9,94	7,92	6,50	7,72
19	Madiun	11,62	12,44	11,19	10,20	12,82	11,50
20	Magetan	4,95	6,57	4,92	6,63	3,49	3,20
21	Ngawi	9,22	10,11	11,62	5,53	9,60	9,31
22	Bojonegoro	8,21	9,55	7,03	8,56	7,33	8,61
23	Tuban	8,18	6,40	8,39	8,67	8,73	8,78
24	Lamongan	8,01	10,11	7,10	6,76	7,03	9,12
25	Gresik	8,42	8,14	9,25	10,72	6,14	7,88
26	Bangkalan	13,03	14,34	13,38	11,64	13,16	12,68
27	Sampang	4,94	4,94	4,48	6,29	4,82	4,23
28	Pamekasan	6,42	6,90	6,63	4,33	8,35	5,96
29	Sumenep	6,72	7,54	6,10	6,67	6,80	6,53
	Kota						
30	Kediri	13,60	12,11	19,58	11,25	12,90	12,19
31	Blitar	12,06	9,17	15,64	10,58	14,86	10,09
32	Malang	14,33	15,60	15,70	11,73	14,38	14,31
33	Probolinggo	11,04	10,73	10,57	10,17	13,55	10,25
34	Pasuruan	13,51	15,07	11,70	11,30	16,00	13,52
35	Mojokerto	13,14	11,39	15,16	13,45	15,50	10,24
36	Madiun	16,23	18,03	18,38	12,56	16,84	15,38
37	Surabaya	10,84	10,05	13,05	9,40	12,07	9,68
38	Batu				8,00	8,15	8,77
	Jawa Timur	8,86	9,02	9,42	8,09	8,93	8,21

Sumber: Analisis Indikator Makro Provinsi Jawa Timur Tahun 2006

Tabel 5.5
Jumlah Tenaga Kerja Di Masing-Masing Sektor Perekonomian Provinsi Jawa Timur
Tahun 2001 s.d 2006

No.	Sektor	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
		Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen	Jumlah (Jiwa)	Persen
1	Pertanian	8.199.838	48,18	7808.491	47,18	8.512.709	49,06	7.819.892	46,81	8.547.035	44,02	8.030.313	43,65
2	Pertambangan dan Penggalian	97.009	0,57	140.679	0,85	102.375	0,59	95.222	0,57	133.972	0,69	122.953	0,67
3	Industri Pengolahan	2.147.820	12,62	2.125.075	12,84	2.103.017	12,12	2.091.541	12,52	2.667.793	13,74	2343.148	12,74
4	Listrik,Gas dan Air Bersih	22.125	0,13	26.481	0,16	36.438	0,21	36.752	0,22	38.833	0,20	41.474	0,23
5	Konstruksi	672.257	3,95	673602	4,07	650.686	3,75	688271	4,12	930.039	4,79	1.048.575	5,70
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	3.109.403	18,27	3005.557	18,16	3.105.941	17,90	3055455	18,29	3.741.512	19,27	3.325.949	18,08
7	Pengangkutan & Komunikasi	840.747	4,94	804.351	4,86	896.317	5,17	831.939	4,98	928.097	4,78	934.405	5,08
8	Keuangan,Persewaan,Jasa Pemerintah	187.211	1,10	173.779	1,05	140548	0,81	180421	1,08	240.762	1,24	240.745	1,31
9	Jasa-jasa	1.722.340	10,12	1.779.171	10,75	1.799.364	10,37	1.896086	11,35	2.139.671	11,02	2.261.610	12,29
10	Lainnya	20.423	0,12	13240	0,08	31.233	0,18	10023	0,06	48541	0,25	48759	0,27
	TOTAL	17.019.174	100,00	16.550.425	100,00	17.351.628	100,16	16705.602	100,00	19416255	100,00	18.397.931	100,00

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

5.1.4 Disparitas Pembangunan Wilayah

Provinsi Jawa Timur terdiri dari beberapa wilayah kabupaten dan kota. Jika dilihat kemajuan pembangunan dari masing-masing wilayah kabupaten/kota yang dicerminkan dengan tingkat PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonominya, maka akan terlihat adanya perbedaan kondisi dari masing-masing wilayah kabupaten/kota tersebut.

Beberapa wilayah kabupaten/kota mempunyai tingkat PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pada kuadran I), beberapa wilayah yang lain mempunyai tingkat PDRB per kapita yang tinggi. Tetapi tingkat pertumbuhan ekonominya rendah (pada kuadran II).

Ada juga wilayah kabupaten/kota yang termasuk pada kuadran III, yaitu tingkat PDRB per kapita rendah. Tetapi pertumbuhan ekonominya tinggi, selain itu beberapa wilayah kabupaten/kota ada yang termasuk pada kuadran IV, yaitu tingkat PDRB per kapita rendah, pertumbuhan ekonominya juga rendah. Secara lengkap hal itu dapat dilihat pada Tabel 5.6 halaman 133.

Memperhatikan pada Tabel 5.6 halaman 133, dapat diketahui bahwa pada Tahun 2003 jumlah wilayah kabupaten/kota yang mempunyai PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (pada kuadran I) berjumlah sekitar 6 (enam) kabupaten/kota. Sedangkan wilayah kabupaten/kota dengan PDRB per kapita rendah tetapi pertumbuhan ekonomi tinggi (pada kuadran II) berjumlah 8 (delapan) kabupaten/kota.

Tabel 5.6
Perbandingan PDRB/Kapita dan Pertumbuhan Ekonomi Antar
Kabupaten/Kota Dalam Kuadran Provinsi Jawa Timur
Tahun 2003 dan Tahun 2006

Kabupaten/Kota	Kuadran				2003		Kuadran				2006	
	I	II	III	IV	PDRB/Kap	Pertumb.	I	II	III	IV	PDRB/Kap	Pertumb.
Kota Kediri	I				104,11	5,33				IV	140,06	0,66
Kota Surabaya	I				27,92	5,11	I				44,04	6,99
Kota Malang	I				16,14	5,23	I				25,84	6,36
Kab.Sidoarjo	I				15,55	5,36	I				22,58	5,94
Kab. Gresik	I				13,99	5,62	I				21,37	6,75
Kab.Mojokerto	I				10,37	6,33	I				15,83	6,65
Kab Tulungagung		II			7,37	5,23		II			11,93	6,13
Kota Batu		II			6,61	5,28		II			10,21	6,25
Kota Pasuruan		II			6,09	5,00		II			9,12	6,20
Kab.Mojokerto		II			6,06	4,78		II			8,83	6,06
Kota Blitar		II			5,53	5,57		II			9,21	6,05
Kab. Jom bang		II			5,10	5,50		II			7,76	5,83
Kab. Pasuruan		II			4,53	5,00		II			9,12	6,20
Kab Nganjuk		II			4,39	5,11		II			6,94	6,22
Kota Madiun			III		6,84	4,71		II			10,12	6,24
Kab.Probolinggo			III		6,27	4,39			III		9,43	5,77
Kab Banyuwangi			III		6,24	4,41		II			9,96	5,94
Kab Malang			III		5,89	4,53		II			9,00	6,17
KabSitubondo			III		5,78	4,54			III		8,39	5,57
KabTuban			III		5,72	3,97		II			8,66	5,99
KabSumenep			III		5,47	3,52		II			7,95	5,84
Kab.Lumajang			III		5,39	4,08		II			8,38	5,81
Kab Magetan			III		5,17	3,79			III		7,82	5,12
Kab Blitar			III		5,04	4,77			III		7,38	5,65
Kab Bojonegoro			III		4,74	4,27		II			7,35	6,28
Kab.Jember			III		4,65	4,15			III		7,00	5,70
Kab. Madiun			III		4,35	3,33		II			6,27	5,81
Kab.Kediri			III		4,29	2,46			III		6,22	5,56
Kab Bangkalan			III		3,88	4,22			III		5,54	5,55
Kab Ngawi			III		3,77	3,32			III		5,40	5,63
Kab.Lamongan			III		3,76	4,15			III		5,96	5,59
Kab Ponorogo			III		3,60	4,26			III		5,64	5,40
Kab.Sampang			III		3,28	3,16			III		4,55	5,21
Kab Bondowoso			III		3,12	3,93			III		4,56	5,30
Kab Trenggalek			III		2,91	3,41			III		4,88	5,15
Kab Pamekasan			III		2,89	3,64		II			3,91	5,24
Kab.Pacitan			III		2,89	2,55		II			4,13	5,24
Kota Probolinggo				IV	9,30	4,51				IV	14,26	6,26
Jawa Timur												

Sumber : Analisa Indikator Makro Sosial dan Ekonomi Provinsi Jawa Timur Tahun 2001-2006

Keterangan :

1. Kuadran I : PDRB per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi tinggi
2. Kuadran II : PDRB per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi tinggi
3. Kuadran III : PDRB per kapita rendah, pertumbuhan ekonomi rendah
4. Kuadran IV : PDRB per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah

Selanjutnya kabupaten/kota yang PDRB per kapita rendah yang diikuti pertumbuhan ekonomi rendah (pada kuadran III) berjumlah 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. PDRB per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah (pada kuadran IV) berjumlah 1(satu) Kota Probolinggo.

Pada Tahun 2006, kondisi itu relatif tidak berubah secara signifikan meskipun ada perbaikan. Jumlah kabupaten/kota di kuadran I berjumlah 5 (lima), di kuadran II berjumlah 18 (delapan belas) kabupaten/kota, di kuadran III berjumlah 15 (lima belas) kabupaten/kota dan di kuadran IV berjumlah 2 (dua) kabupaten/kota.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur diwarnai dengan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Walaupun pertumbuhan riil sektor ini menunjukkan peningkatan dari Tahun 2001 s.d 2006.

Struktur ekonomi Provinsi Jawa Timur diwarnai dengan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dan sebaliknya, semakin meningkatnya peranan sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Memperhatikan kondisi yang demikian ini memberikan indikasi bahwa struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan terjadinya pergeseran dengan semakin meningkatnya dominasi sektor sekunder dan

tersier. Artinya fenomena pembangunan ekonomi yang selalu diwarnai dengan semakin menurun peranan sektor primer dan semakin meningkatnya peranan sektor sekunder dan sektor tersier benar-benar terjadi di Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat lebih jelas tentang struktur perekonomian Provinsi Jawa Timur, yang memperlihatkan PDRB Provinsi Jawa Timur Atas Dasar Harga Yang Berlaku serta komposisi masing-masing sektor dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006. Hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.7 halaman 136.

Memperhatikan pada Tabel 5.7 halaman 136, dapatlah diketahui bahwa secara keseluruhan terdapat 3 (tiga) sektor utama yang menopang perekonomian Provinsi Jawa Timur. Ketiga sektor tersebut adalah, sektor pertanian, industri dan perdagangan, hotel dan restoran.

Dari ketiga sektor tersebut, sektor Industri merupakan sektor yang menjadi handalan utama perekonomian Provinsi Jawa Timur dengan rata-rata sumbangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur mencapai 29,62% per tahun. Selanjutnya disusul oleh sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan sumbangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur mencapai rata-rata 27,28% per tahun.

Sektor pertanian di urutan berikutnya dalam sumbangan terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dengan sumbangan sebesar rata-rata 17,33% per tahun.

Tabel 5.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Yang Berlaku
Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006

No	Sektor/Sub Sektor	2001		2002		2003		2004		2005		2006	
		(000.000,-rupiah)	(%)	(000.000,-rupiah)	(%)	(000.000,- rupiah)	(%)	(000.000,- rupiah)	(%)	(000.000,- rupiah)	(%)	(000.000,- rupiah)	(%)
1.	Pertanian	46.239248,87	19,77	50.859664,01	19,04	54839041,42	18,24	59.949.649,39	17,58	69536.009,02	1724	80746.147,55	17,16
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.903.320,74	2,10	5.502.793,36	2,06	6.010.754,81	2,00	6.599.289,37	1,93	8.103.672,30	2,01	9.711.418,59	2,06
3.	Industri Pengolahan	69.376.693,20	29,66	78.291.432,43	29,31	88694.805,36	29,50	100.995.019,45	29,61	120974.195,01	2999	137.715.738,08	29,26
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	3.147.937,87	1,35	4.337293,33	1,62	5.279661,96	1,76	7.564.515,14	2,22	7.631.896,04	1,89	8.730422,33	1,86
5.	Konstruksi	9.073.502,29	3,88	10.171.321,29	3,81	11.242.688,35	3,74	12.549.767,24	3,68	14.540.117,46	3,60	16.280.066,79	3,46
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	57.473.541,06	24,57	67.734.175,39	25,35	78.394.106,46	26,08	91.106.530,40	26,71	109.587.965,52	2717	131.600.286,59	27,96
7.	Pengangkutan & Komunikasi	12.124.314,92	5,18	15.153.035,01	5,67	17.152.143,61	5,71	18.817.195,90	5,52	22309962,36	5,53	26.239.588,55	5,58
8.	Keuangan, Persewaan, Jasa Pemerintah	11.634437,43	4,97	12.791.995,45	4,79	13.802.873,93	4,59	15.117.262,90	4,43	18.254.725,93	453	21.305.473,16	4,53
9.	Jasa-jasa	19.908.558,91	8,51	22.316.006,29	8,35	25.193.782,90	8,38	28.366021,54	8,32	32.443.807,12	8,04	38.298.351,98	8,14
	TOTAL	233881.585,29	100,0	267.157.716,58	100,0	300.609857,97	100,0	341.065.251,33	100,0	403.392.350,76	100,0	470.627.493,61	100,0

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Dalam dimensi jangka panjang, kecenderungan ini akan tetap berlangsung jika memperhatikan tingkat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur. Untuk melihat pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur, maka dapat dilihat dari pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur pada saat harga konstan, hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.8 berikut ini :

Tabel 5.8
Produk Domestik Regional Bruto Pada Saat Harga Konstan
Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Juta Rupiah)

No.	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	40.533.877,14	41.354.488,14	42.143.435,26	43.331.493,13	44.700.984,17	46.451.473,55
2.	Pertambangan dan Penggalian	4.296.325,31	4.415.073,37	4.512.702,20	4.595.921,87	5.024.241,99	5.455.159,57
3.	Industri Pengolahan	61.850.431,56	61.396.901,69	64.133.626,56	67.520.434,83	70.635.868,95	72.786.972,17
4.	Listrik, Gas dan Air Bersih	2.650.100,48	3.144.025,77	3.631.942,87	4.171.615,50	4.429.541,76	4.610.041,67
5.	Konstruksi	8.202.906,17	8.293.319,45	8.447.765,37	8.604.401,30	8.903.497,41	9.030.294,53
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	53.475.477,92	57.926.650,32	62.512.781,39	68.295.968,36	74.546.735,68	81.739.125,02
7.	Pengangkutan & Komunikasi	10.833.961,42	12.245.296,15	12.953.457,60	13.830.439,67	14.521.814,32	15.504.939,80
8.	Keuangan, Persewaan, Jasa Pemerintah	10.533.820,46	10.891.211,34	11.122.626,55	11.783.343,03	12.666.393,27	13.611.228,97
9.	Jasa-jasa	18.071.669,72	18.785.422,86	19.426.120,74	20.095.274,48	20.945.649,24	22.048.439,03
	TOTAL	210.448.570,18	218.452.389,09	228.884.458,54	242.228.892,17	256.374.726,79	271.237.674,31

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Selanjutnya berdasarkan pada Tabel 5.8, dapat diketahui pertumbuhan masing-masing sektor ekonomi dan pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur yang dapat dilihat pada Tabel 5.9 halaman 138.

Tabel 5.9
Pertumbuhan Riil Sektor Ekonomi Provinsi Jawa Timur
Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Persen)

No	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1.	Pertanian	1,26	2,02	1,91	2,82	3,16	3,92
2.	Pertambangan dan Penggalian	2,68	2,76	2,21	1,84	9,32	8,58
3.	Industri Pengolahan	2,35	-0,73	4,46	5,28	4,61	3,05
4.	Listnk.Gas dan Air Bersih	3,37	18,64	15,52	14,86	6,13	4,07
5.	Konstruksi	0,89	1,10	1,86	1,85	3,48	1,42
6.	Perdagangan, Hotel dan Restoran	8,08	8,32	7,92	9,25	9,15	9,65
7.	Pengangkutan & Komunikasi	2,03	13,03	5,78	6,77	5,00	6,77
8.	Keuangan,Persewaan,Jasa Pemenntah	6,73	3,39	2,12	5,94	7,49	7,46
9.	Jasa-jasa	3,11	3,95	3,41	3,44	4,23	5,27
	TOTAL	3,76	3,80	4,78	5,83	5,84	5,80

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan pada Tabel 5.8 dan 5.9, dapatlah diketahui bahwa selama periode Tahun 2001 s.d 2006, perekonomian di Provinsi Jawa Timur tumbuh dengan rata-rata 4,97% per tahun. Jika dilihat dari sektor-sektor yang paling tinggi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Timur adalah sektor listrik, gas, air bersih dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Selama periode Tahun 2001 s.d 2006, kedua sektor tersebut tumbuh dengan rata-rata sebesar 10,43% dan 8,73% per tahun. Sektor industri pada periode yang sama hanya tumbuh dengan rata-rata 3,17% per tahun. Sektor yang paling lamban pertumbuhannya adalah sektor pertanian yang hanya tumbuh dengan rata-rata sebesar 2,51% per tahun pada periode yang sama.

Tingginya pertumbuhan sektor listrik, gas dan air bersih dapat dimaklumi karena sektor ini merupakan sektor yang paling padat modal yang biasanya investasinya sebagian besar dilakukan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah. Di lain pihak, *out-put* sektor ini merupakan kebutuhan pokok masyarakat, sehingga permintaannya sangat tinggi. Sektor lain yang pertumbuhannya tinggi adalah sektor perdagangan, hotel dan

restoran. Tingginya pertumbuhan sektor ini mencerminkan meningkatnya aktivitas perekonomian Provinsi Jawa Timur. Dalam dimensi jangka panjang, kondisi ini menandai bahwa terjadi kecenderungan perekonomian Provinsi Jawa Timur mengarah pada berkembangnya sektor tersier. Apalagi kalau memperhatikan dengan semakin melemahnya pertumbuhan sektor sekunder (sektor industri) dan sektor primer (sektor pertanian). Jika kondisi ini dihubungkan dengan tesis Rostow dengan tahap-tahap proses pembangunan, nampaknya proses pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur sudah sejalan dengan tesis Rostow tersebut. Menurut tesis Rostow seperti yang telah dijelaskan pada BAB 2. Tahap yang pertama dalam pembangunan ekonomi adalah pembangunan sektor pertanian, sehingga pada tahap awal ini sumbangan sektor pertanian menjadi dominan. Tahap yang kedua adalah tahap pembangunan dan pengembangan sektor sekunder (sektor industri) yang pada akhirnya dominasi sektor pertanian dalam pembentukan PDRB akan digantikan oleh sektor industri dan tahap berikutnya adalah semakin meningkatnya dominasi sektor tersier (sektor perdagangan dan sektor jasa) dalam perekonomian.

Kalau dilihat dari aspek tahapan saja, mungkin kecenderungan itu dapat dibenarkan, tetapi kalau memperhatikan lebih detail tentang tesis Rostow tersebut, maka masih banyak hal yang perlu direnungkan kembali. Menurut tesis Rostow, tahap-tahap pembangunan tersebut harus mampu menciptakan sinergitas antara sektor pertanian dengan sektor industri, tetapi kenyataan yang terjadi di Provinsi Jawa Timur ini malah terjadi

konflik kepentingan yang tajam antara sektor pertanian dengan sektor industri, bahkan sampai saat ini, sehingga kondisi ini menciptakan disparitas sektoral. Di sisi lain, kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur relatif stabil sejak Tahun 2001 s.d 2006. Disparitas sektoral antara sektor pertanian dengan sektor industri masing-masing dapat dilihat pada Tabel 5.10 dan Tabel 5.11 berikut ini :

Tabel 5.10
Variabel Makro Ekonomi Sektor Pertanian Di Provinsi Jawa Timur

Tahun	PDRB Sektor Pertanian ADK (Rp juta)	PDRB Sektor Pertanian ADB (Rp juta)	Kontribusi Sektor Pertanian (%)	Pertumbuhan Riil Sektor Pertanian (%)
2001	40,533,877.14	46,239,248.87	19.77	1.26
2002	41,354,488.14	50,859,664.01	19.04	2.02
2003	42,143,435.26	54,839,041.42	18.24	1.91
2004	43,331,493.13	59,949,649.39	17.58	2.82
2005	44,700,984.17	69,536,009.02	17.24	3.16
2006	46,451,473.55	80,746,147.55	17.16	3.92

Keterangan : ADK tahun 2000

Tabel 5.11
Variabel Makro Ekonomi Sektor Industri Di Provinsi Jawa Timur

Tahun	PDRB Sektor Industri ADK (Rp juta)	PDRB Sektor Industri ADB (Rp juta)	Kontribusi Sektor Industri (%)	Pertumbuhan Riil Sektor Industri (%)
2001	61,850,431.56	69,376,693.20	29.66	2.35
2002	61,396,901.69	78,291,432.43	29.31	-0.73
2003	64,133,626.56	88,694,805.36	29.50	4.46
2004	67,520,434.83	100,995,019.45	29.61	5.28
2005	70,635,868.95	120,974,195.01	29.99	4.61
2006	72,786,972.17	137,715,738.08	29.26	3.05

Keterangan : ADK tahun 2000

Memperhatikan pada Tabel 5.10 dan Tabel 5.11 halaman 140, pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dapatlah diketahui bahwa kontribusi sektor pertanian terhadap cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun dengan tingkat pertumbuhan yang tidak stabil. Sebaliknya pada periode yang sama kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur cenderung relatif stabil dengan tingkat pertumbuhan yang tidak stabil. Stabilitasnya kontribusi sektor industri terhadap pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur ini menunjukkan bahwa tingkat pertumbuhan sektor industri dengan pertumbuhan ekonominya relative proposional. Sebaliknya tingkat pertumbuhan sektor pertanian cenderung lebih kecil dibandingkan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, karena itu kontribusinya cenderung mengalami penurunan.

Disparitas pendapatan dapat dijelaskan melalui terjadinya disparitas produktivitas di sektor pertanian dengan sektor industri, seperti halnya yang terlihat pada Tabel 5.12 berikut ini :

Tabel 5.12
Tingkat Produktivitas Untuk Masing-Masing Sektor Ekonomi Atas
Dasar Harga Yang Berlaku Di Provinsi Jawa Timur
Tahun 2001 s.d 2006 (Dalam Rupiah)

No.	Sektor	2001	2002	2003	2004	2005	2006
1	Pertanian	5.639.044,19	6.513.379,35	6.442.019,98	7.666.301,45	8.135.687,88	10.055.168,15
2	Pertambangan dan Penggalian	50.545008,61	39115954,48	58.713.111,70	69.304.250,80	60.487.805,66	78.984.803,87
3	Industri Pengolahan	32.300981,09	36.841.726,73	42.175.030,14	48287372,54	45.346.170,04	58.773.811,16
4	Listrik, Gas dan Air Bersih	142.279677,74	163.788.879,95	144.894.394,86	205.825.945,25	196.531.198,72	210.503.504,12
5	Konstruksi	13.497.073,72	15.099.897,70	17.278208,46	18.233.758,56	15633879,29	15.525.896,37
6	Perdagangan, Hotel dan Restoran	18.483.786,46	22.536.313,70	25240050,10	29.817.663,95	29.289.753,85	39.567740,39
7	Pengangkutan dan Komunikasi	14.420.883,95	18.838834,05	19.136.247,12	22618480,32	24.038.395,08	28.081.601,18
8	Keuangan, Persewaan, Jasa Pemerintah	62.146.120,85	73.610.709,29	98.207544,26	83.788821,15	75.820.627,55	88.498.092,01
9	Jasa-jasa	11559.017,91	12.542.923,81	14001493,25	14.-860.303,25	15.162.988,67	16.934.109,76
	TOTAL	13.742240,68	16.142.045,69	17.324590,96	20.416220,34	20.776.012,20	25.580.457,59

Sumber : Diolah dari Tabel 5.8 dan 5.9

Memperhatikan pada Tabel 5.12 halaman 141, dapat diketahui bahwa terdapat kesenjangan yang tajam antara produktivitas sektor pertanian dengan sektor industri yang diperlihatkan dari nilai PDRB per kapita kedua sektor tersebut. PDRB per kapita sektor pertanian hanya rata-rata sebesar Rp 7.408.600,17 per tahun selama periode Tahun 2001 s.d 2006, sebaliknya di sektor industri rata-rata mencapai Rp 43.954.181,95 per tahun pada periode yang sama. Implikasi dari kondisi ini adalah tingkat pendapatan antara pekerja di sektor pertanian dengan pekerja di sektor industri juga mengalami kesenjangan yang cukup mencolok. Ketika wilayah-wilayah pertanian berada di wilayah pedesaan dan sebaliknya lokasi-lokasi industri berada di wilayah perkotaan, maka dengan demikian akan terjadi juga disparitas perkembangan wilayah pedesaan dengan perkotaan. Dengan penjelasan ini, maka berbagai aspek yang lain dalam dimensi disparitas ini akan dapat terungkap juga, misalnya disparitas pendapatan; serta disparitas desa-kota.

Pada akhirnya berbagai penjelasan di atas, menunjukkan bahwa sampai sejauh ini tingkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi-provinsi yang lain. Hal ini dapat dicermati dengan memperhatikan angka-angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari Provinsi Jawa Timur yang telah disepakati sebagai indikator untuk melihat tingkat kesejahteraan masyarakat.

Indek Pembangunan Manusia (IPM) sendiri merupakan indikator komposit dari indikator-indikator Indeks Harapan Hidup, Indeks Pendidikan,

serta Indeks Daya Beli (*Purchasing Power Parity/PPP*). Kondisi IPM di Provinsi Jawa Timur dapat dilihat pada Tabel 5.13 berikut ini :

Tabel 5.13
Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Jawa Timur
Tahun 2001 s.d 2006

Tahun	Indeks Harapan Hidup	Indeks Pendidikan	Indeks Daya Beli (PPP)	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
2001	68,25	68,70	47,28	63,89
2002	69,17	69,82	48,95	62,64
2003	69,67	70,02	51,29	63,66
2004	70,33	70,92	52,21	64,49
2005	71,59	72,24	56,79	66,84
2006	72,08	72,81	55,71	66,87

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan pada Tabel 5.13 tersebut, dapatlah diketahui bahwa tinggi rendahnya IPM Provinsi Jawa Timur dipengaruhi oleh tinggi rendahnya indeks harapan hidup, indeks pendidikan, serta indeks daya beli. Dari ketiga indeks pembentuk IPM ini, yang memberi sumbangan terhadap semakin tingginya IPM Provinsi Jawa Timur adalah indeks harapan hidup dan indeks pendidikan. Sebaliknya indeks pembentuk IPM yang terendah adalah indeks daya beli. Kondisi ini dapat dimaknai bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang bersumber dari pelayanan kesehatan dan pendidikan sudah relatif tinggi dibandingkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang bersumber dari bidang ekonomi yang ditunjukkan oleh indeks daya beli. Dengan kata lain kondisi ini dapat dibaca bahwa kinerja Pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam layanan

kesehatan dan pendidikan sudah cukup baik, tetapi kinerjanya dalam bidang pembangunan ekonominya masih belum optimal.

Meskipun demikian jika dibandingkan dengan IPM dari provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang lain, IPM Provinsi Jawa Timur ini ternyata paling rendah. Dengan demikian, tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur masih yang paling rendah dibandingkan dengan provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang lain. Lihat perbandingan IPM antara Provinsi Jawa Timur dengan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa yang lain, pada Tabel 5.14 berikut ini :

Tabel 5.14
Perbandingan IPM Provinsi Jawa Timur
Dengan Provinsi-provinsi di Pulau Jawa Yang Lain.

No	Provinsi	Tahun 1999	Tahun 2002	Tahun 2005
1	DKI Jakarta	72,5	75,6	75,8
2	Jawa Barat	64,6	65,8	69,1
3	Jawa Tengah	64,6	66,3	68,9
4	DI.Jogyakarta	68,7	70,8	72,9
5	Jawa Timur	61,8	64,2	66,3
6	Banten	-	66,6	67,9

Sumber : Indonesia Laporan Pembangunan Manusia (Bappenas,BPS,UNDP)

Selanjutnya jika memperbandingkan kondisi keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang dicerminkan oleh indikator IPM, maka hal ini dapat dilihat pada Tabel 5.15 halaman 145.

Tabel 5.15
Keberhasilan Pembangunan Daerah Dan Kesejahteraan Masyarakat
Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006

Tahun	Keberhasilan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Timur (%)	IPM
2001	3,76	63,89
2002	3,80	64,19
2003	4,78	64,94
2004	5,83	65,77
2005	5,84	66,26
2006	5,80	66,20

Sumber : BPS Provinsi Jawa Timur

Memperhatikan pada Tabel 5.15, dapatlah diketahui bahwa antara keberhasilan pembangunan daerah dengan tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan dengan IPM, terdapat pergerakan yang searah antara keduanya. Dengan kata lain semakin meningkatnya keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur selalu diikuti dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur, dan sebaliknya jika terjadi penurunan keberhasilan pembangunan daerahnya.

5.1.5 Potensi Sektor Pertanian dan Industri Masing-masing Wilayah Kabupaten/Kota dan Tingkat Kesejahteraan Masyarakatnya.

Pada hakikatnya keberhasilan pembangunan daerah sangat tergantung pada pengembangan dan pemanfaatan secara optimal terhadap faktor *endowment* yang dimiliki oleh suatu daerah. Pernyataan ini mengandung makna bahwa pembangunan daerah haruslah disesuaikan dengan potensi sumber daya, baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah.

Sejarah pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur sampai saat ini masih banyak menyisakan sejumlah permasalahan yang tidak kunjung terselesaikan. Pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur ini masih bercirikan salah satunya adalah masih terjadinya disparitas sektoral, yaitu terjadinya kesenjangan antara sektor pertanian dengan sektor industri dengan berbagai implikasinya, baik berupa kesenjangan tingkat produktivitas sektor pertanian dengan sektor industri yang berdampak pada terjadinya kesenjangan yang mencolok pendapatan pekerja di sektor pertanian dengan pekerja di sektor industri. Padahal hampir 70% masyarakat di Provinsi Jawa Timur ini bekerja pada sektor pertanian. Sementara itu yang bekerja di sektor industri hanya sekitar 12,76% saja. Dengan kata lain fenomena ini menunjukkan bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama ini masih diselimuti sebuah fenomena yang disebut sebagai fenomena “pertumbuhan tanpa transformasi struktural” (*growth without structural transformations*). Oleh karena itu tidaklah mengejutkan jika sampai saat ini masih terjadi disparitas pembangunan wilayah di Provinsi Jawa Timur.

Kalau diperhatikan secara cermat, hal itu lebih banyak disebabkan karena ada faktor yang terlupakan dalam proses pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, yaitu masalah pengembangan dan pemanfaatan secara optimal terhadap potensi (faktor *endowment*) yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Pembangunan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur haruslah mempertimbangkan faktor *endowmentnya* agar tercapai efisiensi pembangunan dan tercapainya keseimbangan pertumbuhan antar wilayah kabupaten/kota serta secara agregat akan memperkuat struktur ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur. Sebab bagaimanapun juga pembangunan ekonomi pada hakikatnya merupakan upaya terencana dalam mengelola sumber daya yang terbatas untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Memperhatikan penjelasan di atas, dapatlah diketahui bahwa peranan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota mempunyai peran yang kuat dalam menentukan keberhasilan pembangunan di Provinsi Jawa Timur yang ditunjukkan dengan semakin meningkatnya tingkat kesejahteraan masyarakat di masing-masing wilayah kabupaten/kota yang ada di Provinsi Jawa Timur. Untuk mengidentifikasi hubungan antara potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya, maka diperlukan data dan informasi yang berkaitan dengan potensi sumber daya yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota, dalam hal ini adalah potensi di sektor pertanian dan industri, seperti yang diperlihatkan pada Tabel 5.16 halaman 148.

Tabel 5.16
Kontribusi Sektor Pertanian dan Industri Terhadap Pembentukan PDRB Harga Konstan yang Berlaku
Masing-Masing Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 s.d 2006

PDRB	Sektor Pertanian						Sektor Industri					
	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kabupaten /Kota												
Pacitan	466,291.00	531,768.29	582,592.74	641,661.05	696,639.57	812,010.62	37,652.86	42,656.82	49,656.88	57,604.97	64,800.29	81,183.87
Ponorogo	695,653.72	808,241.73	887,380.67	938,316.42	1,002,163.71	1,189,838.97	184,630.07	197,771.55	233,618.32	271,366.31	328,719.28	416,286.76
Trenggalek	506,841.48	578,394.60	629,841.78	661,050.28	700,541.91	813,338.96	127,993.26	140,193.03	157,959.38	177,507.74	205,008.74	244,897.14
Tulungagung	1,013,190.31	1,132,195.05	1,232,234.21	1,312,735.94	1,400,602.62	1,634,215.16	804,572.63	977,143.96	1,140,559.20	1,266,582.54	1,455,086.76	1,759,807.03
Blitar	2,003,527.41	2,229,169.48	2,488,560.60	2,775,722.53	3,113,270.73	3,590,738.60	98,376.89	118,129.98	128,484.96	135,802.10	153,251.30	189,529.40
Kediri	1,817,516.07	2,016,263.89	2,193,325.19	2,320,838.74	2,463,027.99	2,757,631.17	751,230.22	852,190.03	940,630.93	1,075,046.67	1,350,205.69	1,491,310.39
Malang	3,014,578.84	3,542,094.88	3,879,784.90	4,227,815.98	4,599,893.23	5,279,402.66	1,532,462.21	1,845,098.71	2,165,722.61	2,431,665.83	2,887,979.37	3,549,576.31
Lumajang	1,319,457.47	1,501,391.46	1,670,668.57	1,827,240.44	2,266,222.64	2,715,303.87	644,951.75	735,520.67	876,877.41	976,123.54	1,098,474.02	1,365,288.51
Jember	3,276,064.44	3,777,130.55	4,171,608.64	4,489,548.20	5,147,576.87	6,381,975.55	538,387.11	614,525.45	701,225.87	791,655.07	905,446.51	1,088,276.98
Banyuwangi	3,335,654.57	3,814,859.23	4,130,958.61	4,462,788.19	4,806,472.37	5,497,821.65	454,689.73	485,816.80	529,421.06	566,797.42	612,396.69	713,335.37
Bondowoso	767,059.51	888,115.13	982,097.07	1,050,936.21	1,115,600.65	1,283,313.06	107,210.15	122,719.84	150,641.67	179,379.92	207,472.70	270,011.92
Situbondo	769,618.14	897,994.11	999,680.14	1,115,192.26	1,252,529.59	1,526,529.14	281,669.96	308,829.37	332,443.22	348,456.55	383,076.32	484,590.67
Probolinggo	1,776,133.40	1,976,843.68	2,154,784.19	2,299,171.23	2,411,949.10	2,690,949.95	603,369.60	658,198.10	745,579.73	848,400.27	987,714.82	1,171,303.16
Pasuruan	1,244,697.00	1,478,162.10	1,664,516.34	1,786,596.24	1,912,193.02	2,249,307.85	1,276,193.45	1,480,266.70	1,714,257.08	1,920,998.15	2,276,824.96	2,862,462.04
Sidoarjo	896,111.22	1,083,968.38	1,181,773.51	1,203,818.31	1,356,410.21	1,561,976.00	10,436,103.08	11,752,575.05	13,174,589.72	14,752,749.32	17,433,642.18	20,581,280.43
Mojokerto	949,869.35	1,111,377.82	1,230,232.27	1,286,660.18	1,424,585.55	1,668,905.01	1,420,610.57	1,603,454.95	1,846,977.71	2,125,552.19	2,503,942.58	3,041,072.97
Jombang	1,531,517.13	1,516,984.06	1,519,717.30	1,512,242.38	1,531,669.06	1,558,515.97	394,798.85	408,718.56	425,948.22	460,784.68	483,164.36	518,175.16
Nganjuk	1,146,182.62	1,266,186.58	1,362,755.69	1,439,240.70	1,549,484.78	1,818,627.45	290,433.05	338,573.19	378,482.93	40,260.38	45,195.51	555,482.23
Madura	701,548.11	837,832.37	967,092.68	1,019,321.86	1,086,525.03	1,219,646.92	56,212.84	64,833.59	79,217.28	92,948.07	108,344.78	142,850.32
Magetan	827,798.04	963,077.07	1,082,413.47	1,126,228.54	1,186,245.49	1,391,360.91	160,519.67	182,912.77	210,370.08	237,365.62	274,765.53	358,910.71
Ngawi	854,346.66	1,025,750.11	1,137,578.77	1,198,931.67	1,315,845.03	1,456,345.85	132,518.98	154,398.99	180,145.08	206,008.65	226,660.12	260,468.55
Bojonegoro	1,567,290.65	1,837,943.67	2,018,554.83	2,127,500.32	2,311,577.95	2,696,451.14	248,763.32	278,955.30	327,883.91	376,825.10	430,908.19	513,070.53
Tuban	1,280,008.89	1,446,258.07	1,561,457.61	1,648,486.65	1,784,688.75	1,842,379.14	705,995.41	867,533.54	1,050,008.50	1,233,854.48	1,447,758.87	1,711,357.73
Lamongan	1,613,945.76	1,848,195.98	2,015,180.66	2,110,618.90	2,240,834.09	2,413,434.54	172,920.74	192,098.61	216,497.15	237,540.68	269,428.88	316,536.78
Gresik	1,162,168.44	1,379,746.36	1,572,551.25	1,734,013.66	2,008,397.70	2,319,399.11	4,500,188.73	5,326,784.96	6,363,897.42	7,152,858.62	7,973,334.34	9,435,332.04
Bangkalan	940,553.47	1,105,132.45	1,202,492.93	1,281,957.94	1,374,113.59	1,569,625.84	90,630.67	106,055.12	124,689.76	146,188.98	165,986.90	209,737.92
Sampang	1,002,654.50	1,190,367.18	1,332,983.47	1,468,034.13	1,601,125.37	1,868,188.02	17,608.67	19,865.23	22,648.30	25,718.49	28,738.08	33,914.61
Pamekasan	832,257.08	997,198.07	1,117,970.92	1,265,366.40	1,418,127.95	1,684,936.89	16,544.63	18,777.65	22,523.03	25,806.55	28,241.59	34,932.57
Sumenep	2,144,678.45	2,469,318.55	2,723,785.84	3,046,280.25	3,403,104.31	3,969,117.28	115,924.52	123,954.55	138,488.64	158,264.90	167,172.07	188,193.69
Kota Kediri	35,940.74	44,599.11	49,503.95	53,931.56	59,155.65	71,752.80	13,445,956.34	15,145,211.30	16,081,237.28	18,996,995.03	21,000,136.69	24,631,798.02
Kota Blitar	47,493.16	59,830.46	65,285.13	70,555.98	75,312.22	90,121.74	51,023.72	62,576.48	70,941.48	76,491.95	84,015.86	103,798.75
Kota Malang	62,334.78	68,559.25	70,737.89	73,344.46	77,011.87	89,573.98	3,022,504.33	3,708,972.41	4,187,359.41	4,551,822.44	5,138,270.48	5,998,701.39
Kota Probolinggo	116,324.49	150,883.65	168,938.28	190,549.88	223,322.75	258,305.38	300,658.52	301,436.36	309,592.80	305,036.39	347,511.79	382,561.83
Kota Pasuruan	37,722.26	47,228.57	54,341.88	61,657.74	70,232.37	82,917.76	112,219.84	136,354.54	160,136.36	185,153.07	212,067.72	261,971.24
Kota Mojokerto	9,555.50	13,310.59	14,082.45	15,229.27	15,785.00	17,343.65	126,820.11	151,545.33	184,070.45	204,553.34	232,285.66	266,543.27
Kota Madiun	20,619.49	24,258.22	27,492.03	29,458.78	31,372.02	36,604.03	167,511.45	193,181.30	229,511.83	264,801.38	310,918.41	366,342.85
Kota Surabaya	177,732.01	118,817.53	129,013.48	135,023.04	148,481.44	173,466.18	16,968,336.43	19,515,123.96	22,410,706.75	25,108,884.62	28,376,127.08	34,785,261.62
Kota Batu	90,419.53	199,233.94	220,568.38	243,972.40	265,992.10	308,803.93	72,942.51	81,972.32	95,759.56	97,884.72	107,739.80	134,800.14
Jawa Timur	40,057,155.69	45,978,682.22	49,518,449.31	54,232,038.23	57,292,044.29	68,589,672.58	60,431,836.47	69,314,727.05	78,138,731.97	88,109,336.71	100,312,814.92	120,550,952.90

Sumber : BPS Jawa Timur

Memperhatikan pada Tabel 5.16 halaman 148, dapat diolah lagi untuk memperbandingkan potensi riil sektor pertanian dan industri dari masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan mempergunakan metode Analisis *Loqatient Quotient* (LQ). Untuk lebih jelasnya hasil pengolahan data berdasarkan Analisis LQ ini, dapat dilihat pada Tabel 5.17 halaman 150.

Memperhatikan pada Tabel 5.17 halaman 150, dapat diketahui potensi sektor-sektor ekonomi pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur. Selanjutnya dengan menggabungkan hasil perhitungan nilai LQ sektor pertanian dan industri untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM), maka hubungan antara potensi sumber daya alam masing-masing wilayah kabupaten/kota dengan tingkat kesejahteraan masyarakatnya akan dapat teridentifikasi. Dengan melihat pada Tabel 5.17 halaman 150 tersebut akan dapat diketahui beberapa kecenderungan yang terjadi : Pertama, adalah teridentifikasinya hubungan yang negatif antara sektor pertanian dengan sektor industri di Provinsi Jawa Timur. Dari Tabel 5.17 halaman 150 tersebut dapatlah diketahui terjadinya kecenderungan bahwa wilayah kabupaten/kota yang mempunyai nilai LQ sektor pertanian yang tinggi akan diikuti dengan rendahnya nilai LQ sektor industri. Hal ini mencerminkan bahwa sektor pertanian dan sektor industri tidak dapat berkembang secara bersamaan pada satu wilayah kabupaten/kota.

Tabel 5.17
Nilai LQ Sektor Pertanian Dan Industri Serta Nilai IPM
Masing-masing Wilayah Kabupaten/Kota di Jawa Timur
Tahun 2005

No.	Kabupaten /Kota	Nilai LQ Sektor Pertanian	Nilai LQ Sektor Industri	Nilai IPM
1	Pacitan	2,36	0,14	67.02
2	Ponorogo	1,67	0,34	65.15
3	Trenggalek	1,93	0,33	68.69
4	Tulungagung	0,99	0,62	69.59
5	Blitar	2,75	0,08	68.46
6	Kediri	2,01	0,63	67.90
7	Malang	1,69	0,65	65.92
8	Lumajang	2,13	0,62	62.25
9	Jember	2,65	0,26	60.05
10	Banyuwangi	2,57	0,19	64.52
11	Bondowoso	2,61	0,32	58.27
12	Situbondo	1,88	0,34	59.14
13	Probolinggo	1,83	0,46	58.01
14	Pasuruan	1,50	1,10	63.09
15	Sidoarjo	0,24	1,84	72.33
16	Mojokerto	1,19	1,24	68.83
17	Jombang	1,82	0,35	69.03
18	Nganjuk	1,74	0,31	67.03
19	Madiun	1,93	0,13	66.55
20	Magetan	1,92	0,28	68.75
21	Ngawi	2,14	0,22	64.64
22	Bojonegoro	1,99	0,22	64.09
23	Tuban	1,37	0,73	64.36
24	Lamongan	2,40	0,19	66.06
25	Gresik	0,68	1,59	71.00
26	Bangkalan	2,09	0,16	60.03
27	Sampang	3,07	0,03	53.83
28	Pamekasan	3,40	0,04	60.05
29	Sumenep	3,25	0,09	61.24
30	Kota Kediri	0,01	2,40	71.57
31	Kota Blitar	0,59	0,39	73.19
32	Kota Malang	0,03	1,25	72.42
33	Kota Probolinggo	0,60	0,51	68.55
34	Kota Pasuruan	0,34	0,61	68.96
35	Kota Mojokerto	0,06	0,56	73.22
36	Kota Madiun	0,14	0,84	73.59
37	Kota Surabaya	0,01	1,13	74.21
38	Kota Batu	1,08	0,27	69.51

Sumber : Diolah dari Tabel 5.16

Kedua, terdapat kecenderungan bahwa wilayah-wilayah yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian yang ditunjukkan dengan tingginya nilai *LQ* sektor pertanian adalah wilayah-wilayah yang jauh dari pusat Provinsi Jawa Timur yang pada umumnya bercirikan wilayah dengan ketidak cukupan infrastruktur (*lack of infrastructure*), misalnya wilayah kabupaten/kota di Pulau Madura. Sebaliknya wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi pada pengembangan sektor industri yang ditunjukkan dengan tingginya nilai *LQ* sektor industri, pada umumnya adalah wilayah-wilayah yang merupakan *hinterland* dari wilayah pusat, Provinsi Jawa Timur (Kota Surabaya), misalnya Sidoarjo, Gresik. Yang Ketiga, terdapatnya kecenderungan bahwa wilayah-wilayah kota mempunyai nilai IPM yang relatif tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten. Hal ini menunjukkan bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat di wilayah kota relatif lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah kabupaten. Keempat, terdapatnya kecenderungan bahwa wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor industri mempunyai nilai IPM yang lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian. Hal ini bermakna bahwa tingkat kesejahteraan masyarakat pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian. Kalau dicermati kondisi ini lebih banyak dipengaruhi oleh adanya kebijakan dalam prioritas pengembangan sektor industri

dibandingkan sektor pertanian selama ini. Dengan menetapkan sektor industri sebagai prioritas pembangunan, maka sektor industri pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang dikembangkan sebagai wilayah industri akan mampu berkembang pesat, sehingga mampu memberikan dampak terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dengan nilai IPM yang tinggi pada masing-masing wilayah tersebut. Dan sebaliknya dengan tidak diprioritaskannya sektor pertanian selama ini, maka banyak wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian tetap pada kondisi yang tidak menguntungkan, sehingga pada akhirnya tingkat kesejahteraan masyarakatnya tidak mampu untuk meningkat. Padahal kalau memperhatikan pada Tabel 5.17 halaman 150, hampir sebagian besar wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur ini mempunyai potensi dalam pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika hasil pembangunan Provinsi Jawa Timur selama ini menyebabkan terjadinya disparitas sektoral utamanya antara sektor pertanian dengan sektor industri, serta terjadinya disparitas pembangunan wilayah.

5.1.6 Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

Asumsi yang sangat penting di dalam *PLS* adalah linieritas hubungan antar variabel. Pengujian asumsi linieritas dilakukan dengan metode *Curve Fit*, hasilnya disajikan pada Lampiran 3 halaman 225. Rujukan yang digunakan adalah prinsip *parsimony*, yaitu bilamana seluruh model yang digunakan sebagai dasar pengujian signifikan atau *non-*

signifikan berarti model dikatakan linier. Spesifikasi model yang digunakan sebagai dasar pengujian adalah model linier, kuadratik, kubik, *inverse*, *logarithmic*, *power*, *S*, *compound*, *growth* dan eksponensial. Hasil pengujian linieritas hubungan antar variabel disajikan secara ringkas dapat dilihat pada Tabel 5.18 berikut ini.

Tabel 5.18
Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

Variabel Independen	Variabel Dependen	Hasil Pengujian ($\alpha = 0,05$)	Keterangan
Pertumbuhan sektor pertanian	Keberhasilan pembangunan daerah	Model linier signifikan	Linier
Pertumbuhan sektor industri	Keberhasilan pembangunan daerah	Semua Model <i>Non-</i> signifikan	Linier
Pertumbuhan sektor pertanian	Kesejahteraan masyarakat	Model linier signifikan	Linier
Pertumbuhan sektor industri	Kesejahteraan masyarakat	Semua Model <i>Non-</i> signifikan	Linier
Keberhasilan pembangunan daerah	Kesejahteraan masyarakat	Model linier signifikan	Linier

Memperhatikan pada Tabel 5.18, menunjukkan bahwa semua hubungan antar variabel yang terdapat di dalam model struktural adalah linier, sehingga asumsi linieritas pada analisis *PLS* adalah terpenuhi.

5.1.7 *Goodness of Fit Model*

Pemeriksaan *goodness of fit* digunakan untuk mengetahui apakah model hasil analisis cukup baik untuk menjelaskan fenomena yang dikaji. Hasil analisis *goodness of fit* model dengan *software Smart PLS*, secara lengkap disajikan pada Lampiran 4 halaman 235. Pengujian *goodness of fit* model diperoleh nilai *Q-Square predictive relevance* :

$$\begin{aligned}
 Q^2 &= 1 - (1 - R_1^2)(1 - R_2^2) \\
 &= 1 - (1 - 0.985)(1 - 0.985) = 0.9998
 \end{aligned}$$

Hal ini mengindikasikan bahwa model adalah baik, karena variabel-variabel yang terlibat dalam model mampu menjelaskan variabel yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 99,98%. Sisanya 0,02% merupakan faktor lain yang turut mempengaruhi kesejahteraan masyarakat yang belum dimasukkan ke dalam model, termasuk di dalamnya adalah *error*. Dengan demikian model hasil analisis layak dilakukan *inferensi* guna pembuktian hipotesis.

5.1.8 Hasil Pengujian Hipotesis

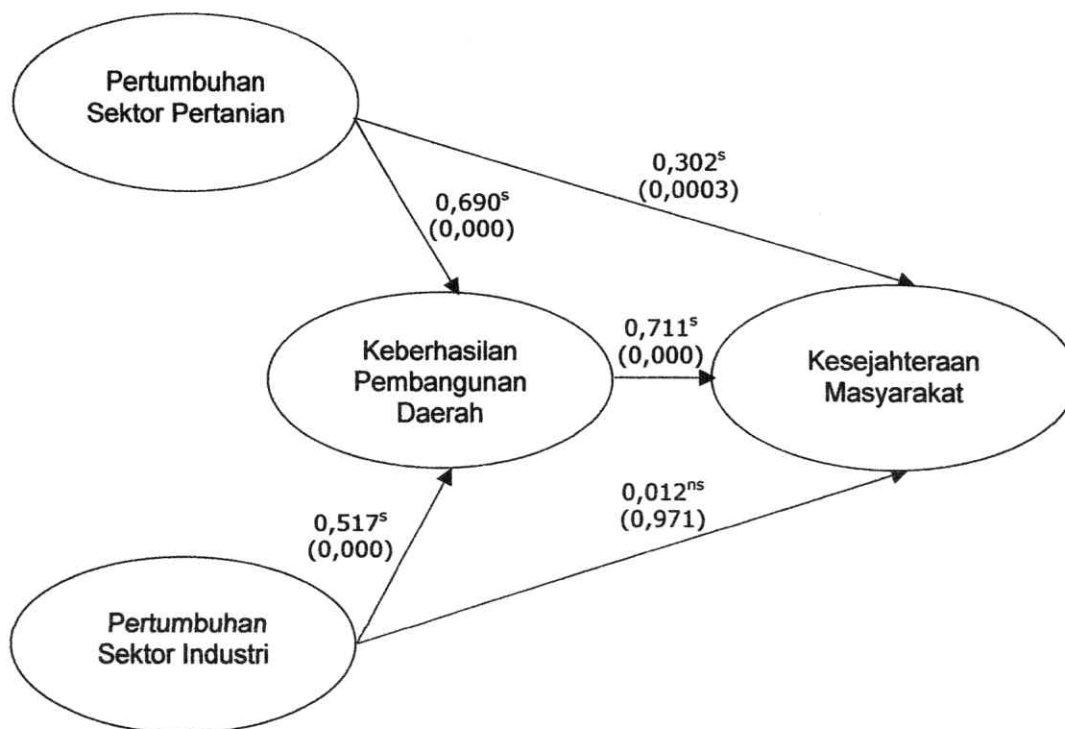
Pengujian koefisien jalur, dilakukan dengan uji t pada analisis *PLS* dan dihitung menggunakan *software Smart PLS*, secara lengkap disajikan pada Lampiran 5 halaman 237. Hasil pengujian hipotesis tersebut secara rinci dapat dilihat pada Tabel 5.19 berikut ini.

Tabel 5.19
Hasil Pengujian Hipotesis Pengaruh Langsung

Hubungan Variabel	Koefisien Jalur	<i>p-value</i>	Keputusan Uji Hipotesis
Prt Sk Pert → Keberhasilan pembangunan daerah	0,690	0,0000	Signifikan
Prt Sk Idst → Keberhasilan pembangunan daerah	0,517	0,0000	Signifikan
Prt Sk Pert → Kesejahteraan	0,302	0,0003	Signifikan
Prt Sk Idst → Kesejahteraan	0,012	0,971	<i>Non- signifikan</i>
Keberhasilan pembangunan daerah → Kesejahteraan	0,711	0,0000	Signifikan

Keterangan: 0,0000 = *p-value* < 0,01

Hasil koefisien jalur dan pengujian hipotesis juga dapat dilihat pada diagram jalur seperti ditunjukkan pada Gambar 5.1 sebagai berikut :



Gambar 5.1
Diagram Jalur Hasil Pengujian Hipotesis

Berdasarkan hasil analisis pada Tabel 5.19 halaman 154 dan Gambar 5.1 dapat diperoleh hasil pengujian hipotesis sebagai berikut :

1. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Analisis dengan *PLS* menghasilkan koefisien jalur ($0,690$) dengan $P < 0,01$ sehingga pengujian hipotesis tersebut dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pertumbuhan sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.

2. Pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Analisis dengan *PLS* menghasilkan koefisien jalur (0,517) dan $P < 0,01$ sehingga pengujian hipotesis tersebut dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pertumbuhan sektor industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Analisis dengan *PLS* menghasilkan koefisien jalur (0,302) dan $P < 0,01$ sehingga pengujian hipotesis tersebut dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif pertumbuhan sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
4. Pertumbuhan sektor industri berpengaruh *non-signifikan* terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Analisis dengan *PLS* menghasilkan koefisien jalur (0,012) dan $P = 0,971$ sehingga pengujian hipotesis tersebut dikatakan *non-signifikan*. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh *non-signifikan* pertumbuhan sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.
5. Keberhasilan pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Analisis dengan *PLS* menghasilkan koefisien jalur (0,711) dan $P < 0,01$ sehingga pengujian hipotesis tersebut dikatakan signifikan. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat pengaruh signifikan positif keberhasilan pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

BAB 6

PEMBAHASAN

6.1 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Tabel 5.19 halaman 154, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan, bahwa pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur, dengan nilai koefisien jalur (0,690) dan nilai probabilitas (0,000), berarti signifikan/bermakna ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil studi membuktikan bahwa hipotesis kesatu yang menyatakan, pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan/bermakna, terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur adalah diterima atau terbukti benar.

Nilai koefisien jalur sebesar positif 0,690 bermakna, *other thing being equal*, setiap terjadi kenaikan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1% akan mengakibatkan meningkatnya keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,690%. Dan sebaliknya setiap penurunan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1% akan mengakibatkan menurunnya keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,690%.

Hasil studi ini mendukung/sejalan dengan pendapat Yotopoulos and Nugent (1976) yang menyatakan bahwa, sektor pertanian walaupun menghasilkan pendapatan per kapita yang lebih rendah dibandingkan sektor industri, tetapi dengan banyaknya jumlah penduduk yang bekerja di sektor pertanian mengakibatkan sektor ini berperan dalam pembentukan

PDB/PDRB, dan oleh karena itu berpengaruh secara signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah (pertumbuhan PDB/PDRB).

Meskipun pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur cenderung mengalami penurunan dari tahun ke tahun, tetapi kondisi ini tidak berarti bahwa peranan pertumbuhan sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur tidak berpengaruh secara signifikan. Penurunan pertumbuhan sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur memang merupakan fenomena yang wajar dalam setiap pembangunan ekonomi. *Chenery and Taylor (1968)*, melakukan penelitian tentang peranan sektor primer (pertanian) dan sektor sekunder (industri) serta sektor tersier (jasa) dalam pembentukan *GNP* dari beberapa negara yang sedang melakukan pembangunan ekonominya. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa selama proses pembangunan ekonomi, terjadi kenaikan sumbangan sektor industri dan sektor jasa dan semakin menurunnya sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan *GNP* negara-negara yang sedang berkembang ekonominya.

Anderson (1987) menyatakan bahwa dalam perekonomian kecil terbuka (*small open economic*) dengan adanya barang yang diperdagangkan (*tradable goods*) dan yang tidak diperdagangkan (*non-tradable goods*), sumbangan sektor pertanian dalam pembentukan PDB/PDRB akan mengalami penurunan jika permintaan barang-barang yang tidak diperdagangkan elastisitas pendapatannya bersifat elastis, karena permintaannya akan meningkat lebih cepat dibandingkan

meningkatnya harga karena barang-barang tersebut lebih bebas untuk diperdagangkan pasar dunia. Sedangkan Martin and Warr (1993) memberi penjelasan dari sisi penawarannya, dengan menyatakan bahwa penurunan sektor pertanian lebih banyak disebabkan karena adanya ketidak simetrisan pertumbuhan dalam faktor *endowment* dan adanya perbedaan produktivitas pertumbuhan sektoral. Adanya perbedaan derajat perubahan teknik produksi antara sektor-sektor akan mempengaruhi komposisi *out-put* agregat, dan pertumbuhan faktor *endowment*.

Hasil studi ini mengindikasikan bahwa adanya pengaruh pertumbuhan sektor pertanian yang signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur dapat terjadi melalui keterkaitan sektor pertanian dengan sektor-sektor yang lain. Sektor pertanian adalah merupakan sektor yang dapat menunjang pada pengembangan sektor-sektor yang lain terutama sektor industri, melalui apa yang disebut sebagai *backward and forward linkages*. Pertumbuhan sektor pertanian mungkin meningkatkan permintaan bahan-bahan setengah jadi, misalnya pupuk, insektisida dan mesin-mesin yang termasuk barang-barang *non-* pertanian; atau mungkin juga meningkatkan *supply* bahan baku pertanian kepada sektor-sektor *non-* pertanian. Kedua aspek ini dikenal sebagai *backward and forward linkages*. Di samping itu juga pembangunan sektor pertanian dengan seluruh pekerjaannya, akan meningkatkan pendapatan mereka yang pada gilirannya akan meningkatkan permintaan produk-produk *non-* pertanian. Meningkatnya

permintaan terhadap barang-barang *non-pertanian* akan menciptakan pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur dari Tahun 2001 s.d 2006 (Tabel 5.10 halaman 140), cenderung mengalami kenaikan. Pada Tahun 2001, pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1,26%, Tahun 2002 sebesar 2,02%, Tahun 2003 sebesar 1,91%, Tahun 2004 sebesar 2,82%, Tahun 2005 sebesar 3,16%, dan Tahun 2006 sebesar 3,92%.

Dalam hal ini peranan pertumbuhan sektor pertanian selama 6 (enam) tahun mempengaruhi pertumbuhan PDRB Provinsi Jawa Timur sehingga mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Hubungan sektor pertanian dengan PDRB Provinsi Jawa Timur adalah positif. Berarti pertumbuhan pada sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Timur. Semakin tinggi tingkat pertumbuhan sektor pertanian, maka pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Timur akan semakin meningkat pula. Sebaliknya, terjadinya penurunan pertumbuhan (negatif) maka pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Timur akan turun (negatif).

Dari aspek produktivitasnya, sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur memiliki tingkat produktivitas yang paling rendah dibandingkan sektor ekonomi yang lainnya. Hal ini disebabkan antara lain, penurunan tingkat kesuburan tanah-tanah pertanian, kurangnya pemupukan, pengobatan hama, dan bencana alam (banjir) yang setiap tahun selalu melanda daerah-daerah di Provinsi Jawa Timur. Selain itu, menurut

penelitian Lane and Robertson (2003), faktor-faktor yang mempengaruhi pesatnya pertumbuhan sektor industri dan melambannya pertumbuhan sektor pertanian selama proses pembangunan ekonominya, adalah karena terjadinya perbedaan investasi di antara kedua sektor tersebut yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat produktivitas faktor-faktor produksi diantara kedua sektor tersebut. Selanjutnya Lane and Robertson menjelaskan, bahwa metode produksi yang dipergunakan oleh sektor pertanian adalah padat tenaga kerja (*labor intensive*), sebaliknya metode produksi yang dipergunakan di sektor industri adalah padat modal yang disertai dengan investasi sumber daya manusia yang dilakukan secara intensif (*physical and human investment intensive*). Pada kondisi yang seperti ini, dapat dipastikan terjadi perbedaan tingkat produktivitas diantara kedua sektor tersebut, dan jika terjadi perpindahan tenaga kerja dari sektor pertanian ke sektor industri karena di sektor pertanian terjadi surplus tenaga kerja, maka hal itu akan meningkatkan pertumbuhan di sektor industri dan secara bersamaan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Hasil ini bertentangan dengan penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh Syrquin (1986), Martin and Mitra (1998), Jogersen *et al.* (1987), serta Lewis *et al.* (1988), yang kesemuanya memperoleh hasil penelitian bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri.

6.2 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Keberhasilan Pembangunan Daerah di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Tabel 5.19 halaman 154, dari hasil pengujian hipotesisnya menunjukkan, bahwa pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur adalah signifikan, dengan nilai koefisien jalur (0,517) dan nilai probabilitas (0,000), berarti signifikan/bermakna ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil pengolahan data ini membuktikan, bahwa hipotesis yang kedua yang menyatakan pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur adalah diterima atau terbukti benar.

Koefisien jalur bertanda positif menandakan adanya hubungan yang searah antara pertumbuhan sektor industri dengan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Dalam hal ini, bila terjadi pertumbuhan pada sektor industri, maka keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur akan meningkat juga. Sebaliknya, bila terjadi penurunan pertumbuhan sektor industri, maka keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur akan mengalami penurunan.

Dengan koefisien jalur (0,517) hal ini bermakna, *other thing being equal*, bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan sektor industri sebesar 1%, akan mengakibatkan meningkatnya keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,517%, dan sebaliknya setiap penurunan pertumbuhan sektor industri sebesar 1% akan mengakibatkan

penurunan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,517%.

Hasil studi ini sejalan dengan apa yang dinyatakan oleh Yotopoulos and Nugent (1976), bahwa bagi penganut paham industrialisasi (*industrial fundamentalism*) menyatakan pengembangan sektor industri dalam suatu pembangunan ekonomi akan mempercepat pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan per kapita riil dalam masyarakat, karena sektor industri mempunyai *backward and forward linkages* yang lebih besar dibandingkan sektor pertanian dalam suatu perekonomian. Oleh karena itu tidak mengherankan jika teori-teori pertumbuhan yang telah berkembang pada umumnya basis analisisnya adalah pengembangan sektor industri. Sejak terjadi Revolusi Industri di Inggris pada abad ke 18, semua orang melihat terjadi perubahan yang luar biasa pada perekonomian Inggris pada saat itu. Pertumbuhan ekonomi Inggris meningkat dengan pesat, tingkat pertumbuhan produktivitas tenaga kerja juga meningkat dengan cepat, tenaga kerja di sektor pertanian berkurang secara signifikan. Kondisi ini mendorong berkembangnya berbagai teori tentang pertumbuhan dan sebab-sebab pertumbuhan. Sektor industri kemudian dianggap sebagai *leading sector* yang patut dipertimbangkan dalam pembangunan ekonomi, yang kemudian berkembang adalah munculnya anggapan bahwa pembangunan ekonomi analog dengan industrialisasi.

Dilihat dari sumbangan riil sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi (PDRB) Provinsi Jawa Timur, rata-rata setiap tahunnya

merupakan penyumbang kedua terbesar setelah sektor perdagangan, hotel dan restoran bagi PDRB Provinsi Jawa Timur (Tabel 5.7 halaman 136). Fenomena semakin meningkatnya kontribusi sektor industri dalam setiap proses pembangunan ekonomi yang seperti ini memang seringkali dialami oleh negara-negara yang sedang berkembang, termasuk Indonesia dalam konteks ini adalah Provinsi Jawa Timur. Misalnya dalam bukunya Kuznet (1971), yang berjudul *Economic Growth of Nations, Total Output and Production Structure*, menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur pada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonominya selalu ditandai dengan : adanya pergeseran penurunan peranan sektor pertanian dan produk-produk primer lainnya seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan. Sebaliknya terjadi peningkatan peranan sektor industri dan jasa dalam perekonomian yang sedang mengalami pembangunan ekonominya.

Dari sisi produktivitas riil, sektor industri di Provinsi Jawa Timur menempati urutan keempat setelah sektor listrik, gas dan air bersih, dan sektor keuangan, persewaan dan jasa pemerintah serta sektor pertambangan dan penggalian. Meskipun demikian jika dibandingkan dengan sektor pertanian, produktivitas sektor industri di Provinsi Jawa Timur ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian. Hasil ini sesuai dengan penelitian dari Krueger *et al.* (1992) yang menyatakan bahwa di banyak negara yang sedang berkembang bahwa produktivitas dan pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian menyebabkan kebijakan dan strategi

pembangunan ekonomi yang diambil lebih memprioritaskan sektor industri ketimbang sektor pertanian. Sebaliknya hasil ini bertentangan dengan penelitian-penelitian lain yang dilakukan oleh Syrquin (1986), Martin and Mitra (1998), Jogersen *et al.* (1987), serta Lewis *et al.* (1988), yang kesemuanya memperoleh hasil penelitian bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri.

6.3 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Pertanian Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Tabel 5.19 halaman 154, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan, bahwa pengaruh pertumbuhan dari sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, signifikan dengan nilai koefisien jalur (0,302) dan nilai probabilitas (0,0003), berarti signifikan/bermakna ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil ini jelas membuktikan bahwa, hipotesis ke tiga yang menyatakan, pertumbuhan sektor pertanian berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur adalah dapat diterima atau terbukti kebenarannya.

Koefisien jalur pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap kesejahteraan masyarakat yang bertanda positif, berarti meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian akan diikuti oleh adanya peningkatan pada kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur. Demikian juga sebaliknya jika terjadi penurunan pertumbuhan sektor pertanian maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan kesejahteraan masyarakat

(IPM) di Provinsi Jawa Timur. Dengan nilai koefisien jalur (0,302), bermakna, *other thing being equal*, bahwa setiap terjadi kenaikan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1%, akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 0,302%. Sebaliknya setiap penurunan pertumbuhan sektor pertanian sebesar 1% akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat (IPM) Provinsi Jawa Timur sebesar 0,302%.

Jumlah tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur yang bekerja di sektor pertanian berfluktuasi dari Tahun 2001 s.d 2006, namun menempati urutan pertama dibandingkan sektor ekonomi lainnya. Persentase tenaga kerja di sektor pertanian rata-rata setiap tahunnya dari Tahun 2001 s.d 2006 (6 tahun) sebesar 46,50%, yang dalam hal ini merupakan sektor ekonomi yang padat karya (*capital intensive*).

Peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang dalam hal ini diukur oleh IPM, terjadi peningkatan dari tahun ke tahun dalam kurun waktu (6 tahun), tidak terlepas dari peningkatan peran dari sektor pertanian. Hasil studi ini mendukung/sejalan dengan pendapat Yotopoulos and Nugent (1976), bahwa walaupun sektor pertanian pada kenyataannya pendapatan per kapitanya masih rendah, bila produktivitas di sektor ini mampu ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan pendapatan dari sebagian besar masyarakat. Peranan sektor pertanian dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat yang diindikasikan dengan semakin meratanya distribusi pendapatan dalam masyarakat dan yang dicerminkan dengan semakin meningkatnya IPM adalah lebih signifikan

dibandingkan dengan sektor industri. Sektor pertanian bagaimanapun juga merupakan sektor yang terbesar dalam hal jumlah tenaga kerjanya. Di banyak referensi seringkali dikatakan bahwa di sektor pertanian terjadi surplus tenaga kerja. Oleh karena itu dengan keberhasilan pembangunan di sektor pertanian akan meningkatkan pendapatan mayoritas masyarakat yang dengan demikian akan cenderung mengarah pada terjadinya pemerataan pendapatan dalam masyarakat dan semakin meningkatnya IPM.

6.4 Pengaruh Pertumbuhan Sektor Industri Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Tabel 5.19 halaman 154, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan, pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur tidak terbukti. Dengan nilai koefisien jalur (0,012) dan nilai probabilitas (0,8206), berarti hasil tersebut tidak signifikan/tidak bermakna ($P > 0,05$). Berdasarkan hasil studi tersebut kemudian membuktikan bahwa hipotesis keempat yang menyatakan, pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur adalah ditolak untuk diterima atau tidak terbukti kebenarannya.

Sektor industri yang merupakan penyumbang kedua terbesar terhadap PDRB Provinsi Jawa Timur, ternyata tidak mampu berpengaruh secara signifikan/bermakna terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini dikarenakan rendahnya tingkat penyerapan tenaga kerja di sektor industri karena alasan sifat-sifat teknologinya. Rata-rata penyerapan tenaga kerja

di sektor industri selama 6 (enam) tahun, sebesar 12,70% per tahunnya atau menempati urutan ke 3 (tiga) setelah sektor pertanian dan sektor perdagangan, hotel dan restoran. Rendahnya peranan pertumbuhan sektor industri terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, tidak terlepas dari sifat industrinya yang padat modal, sehingga tidak mampu melakukan redistribusi pendapatan dalam masyarakat. Lebih dari itu keberadaan sektor industri di Provinsi Jawa Timur justru menimbulkan konflik dengan sektor pertanian yang merupakan sektor utama di mana masyarakat Provinsi Jawa Timur bekerja dan menggantungkan hidupnya, sehingga semakin mendesak berkembangnya sektor-sektor yang lain. Karena itu dengan semakin berkembangnya sektor industri di Provinsi Jawa Timur pada akhirnya menekan perkembangan sektor pertaniannya, karena lahan-lahan yang semestinya dipergunakan untuk sektor pertanian "tergusur" dan digantikan menjadi lahan sektor industri. Lebih dari itu perkembangan sektor industri cenderung menghasilkan dampak polusi yang mencemari lahan-lahan sektor pertanian (sub sektor perikanan) yang sebagian besar menjadi hajat hidup masyarakat pesisir di Provinsi Jawa Timur. Akibatnya di Provinsi Jawa Timur, berkembangnya sektor industri tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakatnya.

Hasil studi ini tidak sejalan dengan pendapat Yotopoulos and Nugent (1976), yang menyatakan bahwa peningkatan sumbangan sektor industri terhadap PDB/PDRB akan mengakibatkan terjadinya peningkatan pula pada pendapatan per kapita masyarakat atau akan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat/IPM. Dengan kata lain apa yang disinyalir oleh Yotopoulos and Nugent, bahwa meningkatnya sumbangan sektor industri akan meningkatkan pendapatan per kapita melalui proses "*trickle down effect*", tidak terjadi pada kasus perekonomian Provinsi Jawa Timur. Hasil studi ini juga tidak sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Cheney and Taylor (1968), yang menyatakan bahwa selama terjadinya proses pembangunan ekonomi, sumbangan sektor industri terhadap *GNP* akan meningkat terus dan akan diikuti oleh adanya peningkatan kesejahteraan masyarakat. Kasus perekonomian Provinsi Jawa Timur tidak menunjukkan terjadinya kecenderungan itu.

6.5 Pengaruh Keberhasilan Pembangunan Daerah Terhadap Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi Jawa Timur

Berdasarkan pada Tabel 5.19 halaman 154, dari hasil pengujian hipotesis menunjukkan, pengaruh keberhasilan pembangunan daerah terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur signifikan. Dengan nilai koefisien jalur (0,711) dan nilai probabilitas (0,000) berarti signifikan/bermakna ($P < 0,05$). Berdasarkan hasil ini membuktikan bahwa hipotesis kelima yang menyatakan, bahwa keberhasilan pembangunan daerah berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur adalah diterima atau terbukti kebenarannya.

Koefisien jalur bertanda positif menandakan, bahwa semakin meningkat keberhasilan pembangunan, maka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur akan semakin meningkat pula. Demikian juga

sebaliknya, semakin menurun keberhasilan pembangunan, maka kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur akan semakin menurun juga. Dengan nilai koefisien jalur (0,711) mengandung makna, *other thing being equal*, bahwa setiap kenaikan 1% keberhasilan pembangunan akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat (IPM) di Provinsi Jawa Timur sebesar 0,711. Dan sebaliknya setiap penurunan keberhasilan pembangunan sebesar 1% akan menurunkan tingkat kesejahteraan masyarakat/IPM Provinsi Jawa Timur sebesar 0,711.

Keterkaitan antara keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur sebagaimana tertera pada Tabel 5.15 halaman 145. Pada Tabel 5.15, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2001 sebesar 3,76, dengan IPM sebesar 63,89. Pada Tahun 2002, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur naik menjadi 3,80, dengan IPM naik menjadi 64,19. Pada Tahun 2003, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur naik menjadi 4,78, dengan IPM naik menjadi 64,94. Pada Tahun 2004, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur naik menjadi 5,83, dengan IPM naik menjadi 65,77. Pada Tahun 2005, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur naik menjadi 5,84, dengan IPM naik menjadi 66,26. Pada Tahun 2006, pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur turun menjadi 5,80, dengan IPM yang turun juga menjadi 66,20.

Berdasarkan hal ini, dapat diketahui hubungan antara pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur dengan pertumbuhan IPM adalah searah. Artinya pada saat pertumbuhan ekonomi daerah

Provinsi Jawa Timur naik dari Tahun 2001 s.d 2006, kesejahteraan masyarakat/IPM juga mengalami kenaikan dan pada Tahun 2006 pertumbuhan ekonomi daerah Provinsi Jawa Timur turun, kesejahteraan masyarakat/IPM juga turun.

6.6 Hubungan Sektor Pertanian Dengan Sektor Industri Di Provinsi Jawa Timur

Dalam berbagai referensi hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri dapat dikategorikan dalam 3 (tiga) kategori hubungan, yaitu hubungan positif, hubungan negatif serta tidak berhubungan satu dengan lainnya. Dikatakan hubungan antara sektor pertanian dengan industri adalah positif jika terdapat keterkaitan yang saling mendukung di antara kedua sektor tersebut. Artinya berkembangnya sektor pertanian akan diikuti dengan berkembangnya sektor industri seperti yang dinyatakan dalam tesis Rostow. Berkembangnya sektor pertanian akan menghasilkan ketersediaan produksi bahan-bahan primer yang cukup baik untuk keperluan konsumsi maupun untuk keperluan bahan baku di sektor industri sehingga harga bahan-bahan primer tersebut menjadi terjangkau baik bagi masyarakat maupun bagi industri. Lebih dari itu berkembangnya sektor pertanian akan mendorong munculnya industri-industri yang mendukung sektor pertanian misalnya industri pupuk, industri mesin-mesin pertanian yang pada giliran berikutnya akan menstimulasi berkembangnya industri mesin-mesin yang termasuk barang-barang *non-pertanian*, baik melalui "*forward linkage*"

maupun "*backward linkage*". Sehingga dengan demikian berkembangnya sektor pertanian akan memacu perkembangan sektor industri.

Dikatakan hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri negatif jika berkembangnya sektor yang satu menyebabkan sektor yang lain terkorbankan. Kondisi ini akan terjadi manakala terjadi "persaingan" dalam penggunaan faktor produksi di antara kedua sektor tersebut. Misalnya persaingan dalam penggunaan faktor produksi tenaga kerja karena keterbatasan dalam ketersediaan tenaga kerja; atau juga terjadinya persaingan dalam penggunaan faktor produksi tanah; persaingan dalam penggunaan faktor produksi modal (investasi); adanya perbedaan kemajuan teknologi di antara kedua sektor yang menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat produktivitas faktor produksi. Kesemuanya akan menyebabkan satu sama lainnya dapat bersifat "saling meniadakan". Implikasinya adalah, jika sektor pertanian yang akan dikembangkan, maka konsekuensinya adalah sektor industri akan mengalami perkembangan yang lambat. Sebaliknya jika sektor industri yang akan dikembangkan, maka pertumbuhan sektor pertanian akan melambat.

Yang terakhir adalah bahwa tidak terdapat hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Dalam hal ini bermakna bahwa perkembangan kedua sektor tersebut, baik sektor pertanian maupun sektor industri lebih banyak dipengaruhi oleh variabel-variabel eksternal selain kedua sektor itu.

Dalam konteks hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri, Gopinath *et al.* (1996), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa

terdapat hubungan dan interaksi yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri. Mereka menemukan hubungan antara sektor pertanian dengan industri pengolahan makanan. Meningkatnya produktivitas di sektor pertanian akan diikuti dengan semakin murahya harga *input* di sektor industri pengolahan makanan. Dan dengan semakin murahya harga *input* tersebut, maka permintaannya akan mengalami peningkatan. Selain itu menurut pandangan *agricultural fundamentaslim* sektor pertanian adalah merupakan sektor yang dapat menunjang pengembangan sektor-sektor yang lain terutama sektor industri, melalui apa yang disebut sebagai *backward and forward linkages*.

Hasil-hasil penelitian tersebut bertolak belakang dengan hasil penelitian di Provinsi Jawa Timur ini. Di Provinsi Jawa Timur, hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri mempunyai sifat hubungan negatif. Artinya berkembangnya sektor industri diikuti dengan semakin melambatnya perkembangan sektor pertanian. Kondisi ini ditandai oleh beberapa indikator tentang kedua sektor tersebut di Provinsi Jawa Timur. Pertama, semakin meningkatnya kontribusi pertumbuhan riil sektor industri dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur dan sebaliknya semakin menurunnya kontribusi pertumbuhan riil sektor pertanian dalam pembentukan PDRB Provinsi Jawa Timur. Kedua, tingkat produktivitas sektor industri lebih besar dibandingkan sektor pertanian. Ketiga, rata-rata kontribusi pertumbuhan riil sektor industri lebih tinggi dibandingkan sektor pertanian. Salah satu faktor yang paling menonjol yang menyebabkan hubungan antara sektor pertanian dengan sektor industri di Provinsi Jawa

Timur mempunyai hubungan yang negatif adalah faktor adanya persaingan dalam penggunaan lahan antara sektor pertanian dengan sektor industri. Penetapan pantai utara Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu zona pengembangan industri menyebabkan lahan-lahan untuk sektor pertanian (sub sektor perikanan) menjadi terkorbankan karena dampak lingkungan (polusi) yang ditimbulkan oleh industri. Selain itu berkembangnya industri property kenyataannya mengurangi jumlah lahan yang tersedia untuk sektor pertanian secara signifikan karena terjadinya alih fungsi lahan-lahan tersebut. Konsekuensi dari kondisi yang seperti ini, maka kebijakan strategi pembangunan akan dihadapkan pada pilihan antara prioritas pembangunan sektor pertanian atau sektor industri.

6.7 Implikasi Kebijakan

Dari berbagai penjelasan terhadap hasil studi ini, maka terdapat beberapa hal yang dapat dijadikan dasar dalam menganalisis implikasi kebijakannya. Pertama, adalah bahwa sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur ternyata sangat berpengaruh baik terhadap keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur maupun terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakatnya. Kedua, adalah bahwa ternyata pertumbuhan sektor industri berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur, tetapi tidak berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Ketiga, tingkat keberhasilan pembangunan daerah akan berpengaruh secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur.

Implikasi dari kondisi ini adalah bahwa pemilihan prioritas strategi pembangunan di Provinsi Jawa Timur dengan menempatkan sektor industri sebagai sektor prioritas pembangunan, tidak akan menghasilkan peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur secara optimal. Tesis yang dibangun oleh Krueger *et al.* (1992) yang menyatakan bahwa di banyak negara yang sedang berkembang, tengah berkembang, bahwa produktivitas dan pertumbuhan produktivitas sektor industri lebih tinggi dibandingkan dengan sektor pertanian menyebabkan kebijakan dan strategi pembangunan ekonomi yang diambil lebih memprioritaskan sektor industri ketimbang sektor pertanian ternyata tidak berlaku di Provinsi Jawa Timur.

Dari hasil studi ini telah terlihat bahwa sektor industri di Provinsi Jawa Timur hanya berpengaruh secara signifikan terhadap meningkatnya keberhasilan pembangunan daerah, tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Meskipun pada akhirnya pengaruh keberhasilan pembangunan daerah terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat signifikan, hal ini bermakna bahwa pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, hanyalah merupakan pengaruh yang tidak langsung. Dengan demikian, selama ini pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur memang dapat meningkatkan keberhasilan pembangunan daerah, tetapi tidak mempunyai pengaruh langsung terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Kalau memperhatikan pola

pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini, nampaknya hasil ini dapat dimengerti.

Gambaran pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini memang mengandung implikasi yang sangat berlawanan dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Kenyataannya, pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur yang diharapkan dapat memberikan "*trickle-down effect*" ternyata malah mengakibatkan "*trickle-up effect*" hasil-hasil pertumbuhan sehingga memperhebat apa yang disebut "*vicous dualism*" atau kesenjangan antara kaya dengan yang miskin seperti yang disinyalir oleh ILO (Arief, 1993 : 19).

Pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur selama ini memang mempunyai beberapa karakteristik yang kurang menguntungkan dalam aspek peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Karakteristik yang pertama, adalah bahwa pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur kurang memperhatikan "*faktor endowment*" sebagai akibat pola perencanaan yang masih sentralistik peninggalan kebijakan pemerintahan Orde Baru. Misalnya penetapan daerah Pantai Utara Provinsi Jawa Timur sebagai salah satu zona pengembangan industri oleh pemerintahan Orde Baru saat itu. Padahal wilayah tersebut sangat berpotensi dalam bidang pengembangan sektor pertanian terutamanya dalam sub sektor perikanan yang merupakan mata pencaharian utama dari penduduk setempat. Pengembangan sektor industri pada daerah tersebut mengakibatkan semakin menurunnya

produksi sub sektor perikanan yang pada giliran berikutnya akan mengakibatkan menurunnya pendapatan nelayan dan petani budidaya ikan. Hal ini disebabkan karena arah pengembangan sektor industri di daerah tersebut bukanlah industri yang mendukung pengembangan sektor pertanian (sub sektor perikanan), tetapi justru pengembangan industri berat yang sangat berpotensi menghasilkan polusi. Sehingga dengan demikian menciptakan konflik kepentingan dalam penggunaan lahan antara sektor industri dengan sektor pertanian. Karakteristik yang kedua, adalah selama ini arah pengembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur adalah penggunaan teknologi padat modal yang diharapkan dapat menciptakan "*interindustry linkage*" dan "*externalities*". Tetapi hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penggunaan teknologi padat modal ini justru menciptakan kegagalan dalam proses penyerapan tenaga kerja di Provinsi Jawa Timur dan tidak menciptakan "*interindustry linkage*" dan "*externalities*" dalam perekonomian di Provinsi Jawa Timur. Kondisi ini sejalan dengan apa yang disinyalir oleh Adelman dan Morris (1973) yang menyatakan bahwa teknologi padat modal ini yang dimaksudkan untuk menimbulkan "*interindustry linkage*" dan "*externalities*" ternyata telah turut menyebabkan terjadinya ketidak seimbangan regional (disparitas pembangunan daerah seperti yang terjadi di Provinsi Jawa Timur) dan ketidak seimbangan manfaat yang dapat diraih oleh penduduk dari proses pertumbuhan, sehingga ratusan juta manusia di negara-negara sedang berkembang tersiksa oleh proses pembangunan. Karakteristik yang ketiga, adalah pembangunan sektor industri di Provinsi Jawa Timur

selama ini seringkali melupakan aspek-aspek tata ruang. Meskipun alokasi ruang untuk masing-masing kegiatan telah ditetapkan oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota melalui Peraturan Daerah (Perda), tetapi seringkali implementasinya tidak konsisten. Pelanggaran-pelanggaran terhadap tata ruang yang telah ditetapkan seringkali terjadi, yang berakibat terjadinya penumpukkan kegiatan dalam satu lokasi. Lokasi industri dan permukiman menjadi satu yang pada akhirnya menciptakan kerawanan wilayah permukiman dari ancaman polusi industri. Lebih dari itu, ruang-ruang yang sudah ditetapkan diperuntukkan bagi pengembangan sektor pertanian pada akhirnya diubah fungsinya menjadi ruang untuk kegiatan industri, sehingga lahan yang tersedia bagi pengembangan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur semakin sempit.

Implikasi dari pembangunan sektor industri yang seperti itu adalah bahwa perkembangan sektor industri di Provinsi Jawa Timur hanya memberi sumbangan terhadap peningkatan keberhasilan pembangunan saja, tetapi tidak memberi sumbangan yang signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur. Di sisi yang lain, pertumbuhan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur yang jelas terbukti berpengaruh secara signifikan baik terhadap keberhasilan pembangunan daerah maupun kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur, justru selama ini hanya dinilai lebih "*inferior*" dibandingkan dengan sektor industri dan oleh karena itu disadari atau tidak oleh para pembuat kebijakan, bahwa semua kebijakan yang ditujukan untuk pengembangan sektor industri malah membuat peranan sektor pertanian

dalam kerangka keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur semakin menurun. Padahal seperti diketahui bersama, bahwa hampir 70% penduduk di Provinsi Jawa Timur ini bekerja pada sektor pertanian. Dengan semakin termarginalnya sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, berarti semakin banyak penduduk menjadi termarginalisasi.

Secara teori, interaksi antara sektor pertanian dengan sektor industri dalam konteks strategi pembangunan, dapat dicerminkan dengan strategi pertumbuhan versus strategi pemerataan (*growth vs equity*). Fenomena pertentangan antara titik berat pertumbuhan ekonomi dengan pemerataan pendapatan sudah sejak lama menjadi bahan perdebatan dalam kalangan ahli-ahli pembangunan ekonomi. Sebab antara keduanya, pertumbuhan dan pemerataan, mempunyai sifat "*trade-off*" satu sama lainnya. Artinya, jika strategi mempercepat pertumbuhan ekonomi diutamakan, maka tujuan pemerataan pendapatan akan terkorbankan. Sebaliknya jika tujuan pemerataan pendapatan diutamakan, maka pertumbuhan ekonominya akan melambat. Kondisi ini disebabkan karena untuk mempercepat pertumbuhan ekonomi yang tinggi, maka sektor-sektor yang harus dibangun adalah sektor-sektor yang mempunyai produktivitas yang tinggi yang dapat dicapai dengan melalui penggunaan teknologi padat modal dan padat teknologi. Sektor-sektor ini biasanya dikenal dengan sektor modern atau juga sektor industri. Penggunaan teknologi yang seperti ini pada sektor modern atau industri, akan mengakibatkan tingkat penyerapan tenaga kerjanya rendah. Sehingga dengan demikian upaya pemerataan pendapatan menjadi terkorbankan.

Sebaliknya jika tujuan pemerataan diutamakan maka sektor-sektor yang harus dikembangkan adalah sektor-sektor dengan teknologi padat karya. Sektor-sektor yang mempergunakan teknologi padat karya ini biasanya dikenal dengan sektor tradisional atau juga sektor pertanian. Penggunaan teknologi padat karya ini akan mampu menyerap tenaga kerja yang banyak, oleh karena itu meskipun sektor ini mempunyai produktivitas yang rendah tetapi jumlah tenaga kerja yang dipergunakan adalah banyak, sehingga upaya pemerataan pendapatan dapat dicapai melalui penggunaan teknologi ini.

Berdasarkan hal itu, jika strategi yang dipilih adalah untuk mempercepat keberhasilan pembangunan, maka implikasinya adalah menetapkan sektor industri sebagai sektor prioritas pembangunan. Sebaliknya jika strategi yang dipilih adalah untuk pemerataan pendapatan, maka implikasinya adalah menetapkan sektor pertanian sebagai prioritas pembangunan.

Persoalan yang dihadapi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur saat ini adalah bagaimana strategi pembangunan ekonomi Provinsi Jawa Timur ke depan. Akankah masih memberikan prioritas pembangunan kepada sektor industri ataukah dilakukan reorientasi strategi pembangunan ekonominya? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, maka yang perlu dilakukan adalah menilai hasil-hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur secara obyektif selama ini.

Hasil-hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur melalui pemilihan strategi pembangunan dengan mengedepankan pertumbuhan

ekonomi selama ini dapat dijelaskan melalui beberapa aspek seperti yang dapat dijelaskan berikut ini.

Dilihat dari aspek perubahan struktur ekonomi di Provinsi Jawa Timur, hasil pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur selama ini telah membawa perubahan struktur ekonomi yang signifikan pada perekonomian di Provinsi Jawa Timur, yaitu dari dominasi sektor pertanian ke dominasi sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran. Namun demikian yang perlu dilihat lebih jauh lagi adalah bahwa pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur sampai saat ini masih bercirikan terjadinya fenomena pertumbuhan tanpa disertai transformasi struktural (*growth without structural transformation*), artinya adanya pertumbuhan ekonomi yang pesat yang diikuti terjadinya perubahan komposisi sektoral PDRB secara drastis dari dominasi sektor pertanian menjadi dominasi sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran, tetapi di lain pihak komposisi tenaga kerja tetap didominasi sektor pertanian yang berakibat titik balik transformasi struktural (*structural transformation turning point*) tidak pernah tercapai. Pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur selama Tahun 2001 s.d 2006, sebesar 4,97% rata-rata per tahun. Pada periode yang sama rata-rata sumbangan sektor pertanian terhadap pembentukan PDRB di Provinsi Jawa Timur 17,33% per tahun sementara itu sektor industri dan perdagangan, hotel dan restoran mencapai 56,9%. Sebaliknya pada periode yang sama jumlah tenaga kerja di sektor pertanian rata-rata mencapai 49,65% dan sektor industri serta

perdagangan, hotel dan restoran hanya sebesar 31,09% dari jumlah tenaga kerja menurut lapangan usaha.

Dilihat dari aspek pemerataan pembangunan daerahnya, selama ini pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur masih belum memberikan hasil-hasil pembangunan yang merata di antara daerah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur atau dengan kata lain masih terjadi disparitas pembangunan daerah. Seperti yang terlihat pada Tabel 5.6 halaman 133. Tahun 2003 jumlah wilayah kabupaten/kota yang mempunyai PDRB per kapita dan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (kuadran I) berjumlah sekitar 6 (enam) kabupaten/kota, sedangkan wilayah kabupaten/kota dengan PDRB per kapita rendah tetapi pertumbuhan ekonomi tinggi (kuadran II) berjumlah 8 (delapan) kabupaten/kota. Selanjutnya kabupaten/kota yang berada di kuadran III (PDRB per kapita rendah yang diikuti pertumbuhan ekonomi rendah) berjumlah 23 (dua puluh tiga) kabupaten/kota. Dan yang berada di kuadran IV (PDRB per kapita tinggi, pertumbuhan ekonomi rendah) berjumlah 1 (satu) kabupaten/kota. Pada Tahun 2006, kondisi itu relatif tidak berubah secara signifikan meskipun ada perbaikan. Jumlah kabupaten/kota pada kuadran I berjumlah 6 (enam), kuadran II berjumlah 16 (enam belas) kabupaten/kota, kuadran III berjumlah 15 (lima belas) kabupaten/kota dan kuadran IV berjumlah 1 (satu) kabupaten/kota.

Dilihat dari aspek kemiskinan penduduk di Provinsi Jawa Timur, sampai dengan Tahun 2006 jumlah penduduk miskin di Provinsi Jawa Timur masih berjumlah 19,94% dari jumlah total penduduk di Provinsi Jawa Timur yang berjumlah 37,4 juta jiwa. Ini artinya sampai dengan

Tahun 2006, satu di antara lima orang di Provinsi Jawa Timur termasuk golongan orang miskin.

Sementara itu jika dilihat dari profil sektor industri di Provinsi Jawa Timur, memang terbukti bahwa meskipun kelompok industri logam, mesin, elektronika dan aneka yang tergolong sebagai industri besar walaupun memberikan sumbangan nilai tambah yang besar terhadap perekonomian Provinsi Jawa Timur tetapi tingkat penyerapan tenaga kerjanya relatif jauh lebih kecil dibandingkan penyerapan tenaga kerja pada industri kecil dan dagang kecil. Sampai dengan Tahun 2006, tingkat penyerapan tenaga kerja dari industri kecil dan dagang kecil di Provinsi Jawa Timur mencapai 59% dari jumlah total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri, sebaliknya kelompok industri logam, mesin, elektronika dan aneka hanya menyerap tenaga kerja sebesar 9% dari jumlah total tenaga kerja yang bekerja di sektor industri. Angka ini masih lebih rendah dibandingkan dengan jumlah tenaga kerja yang diserap oleh kelompok industri kimia, agro dan hasil hutan, yaitu sebesar 32%. Berdasarkan hal ini, jelaslah bahwa pembangunan sektor industri dalam skala besar di Provinsi Jawa Timur ternyata memang tidak mampu memberikan lapangan kerja yang memadai. Oleh karena itu tidak mengejutkan jika kemudian tingkat pengangguran terbuka di Provinsi Jawa Timur masih relatif tinggi, yaitu 8,19% dari jumlah total angkatan kerja yang ada di Provinsi Jawa Timur.

Kondisi yang demikian ini pada akhirnya menempatkan tingkat kesejahteraan masyarakat di Provinsi Jawa Timur yang diukur dari indikator Indeks Pembangunan Manusia (IPM) paling rendah dibandingkan

dengan beberapa provinsi lainnya di Pulau Jawa. Pada Tahun 2005, IPM Provinsi DKI Jakarta mencapai 75,8. Selanjutnya IPM Provinsi DI Yogyakarta 72,9; Provinsi Jawa Barat 69,1; Provinsi Jawa Tengah 68,9; Provinsi Banten 67,9 sedangkan IPM Provinsi Jawa Timur pada Tahun yang sama adalah 66,3

Berdasarkan hal itu, pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur ke depan memerlukan reorientasi strategi pembangunan. Pilihan-pilihan terhadap strategi pembangunan ekonomi akan dihadapkan beberapa pilihan yang menyangkut tentang pilihan strategi pembangunan berimbang (*balanced growth*) ataukah strategi pembangunan yang tidak berimbang (*un-balanced growth*). Pilihan terhadap strategi pembangunan berimbang dengan pembangunan tidak berimbang membawa konsekuensi terhadap besar kecilnya kebutuhan investasi. Pembangunan berimbang memerlukan kebutuhan investasi yang sangat besar karena pembangunan dilakukan secara serempak untuk semua sektor. Pembangunan tidak berimbang tidak memerlukan biaya investasi yang besar karena ada *leading sector* yang akan dibangun terlebih dahulu. *Leading sector* ini diharapkan mempunyai *backward and forward linkages* kepada sektor-sektor yang lain. Dengan segala keterbatasan dana pembangunan yang ada, maka pilihan strategi pembangunannya adalah strategi pembangunan yang tidak berimbang. Dalam hal ini diperlukan penetapan *leading sector* pembangunannya.

Untuk menetapkan *leading sector* pembangunannya, pilihan berikutnya yang dihadapi adalah pilihan terhadap sektor-sektor yang akan

dikembangkan terlebih dahulu dibandingkan sektor lainnya. Dalam banyak referensi memberi opsi antara sektor pertanian (*agricultural fundamentalism*) dengan sektor industri (*industrial fundamentalism*). Implikasi atas pilihan ini adalah, jika sektor pertanian yang dipilih, maka *out-come* pembangunan akan cenderung menghasilkan pemerataan pendapatan (*equity*) katimbang menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*growth*). Sebaliknya jika pilihannya sektor industri, maka *out-come* pembangunan akan cenderung menghasilkan pertumbuhan ekonomi yang tinggi (*growth*) katimbang pemerataan pendapatan (*equity*). Dengan demikian hal ini berarti akan dihadapkan pilihan antara mengutamakan pertumbuhan ekonomi (*growth*) ataukah mengutamakan pemerataan pendapatan (*equity*). Adanya “*trade-off*” antara pilihan pertumbuhan ekonomi (*growth*) yang dicapai melalui pembangunan sektor industri dengan pemerataan pendapatan (*equity*) yang dicapai melalui pembangunan sektor pertanian, melahirkan pilihan ketiga yaitu pertumbuhan dengan pemerataan (*growth with equity*) yang dapat dicapai melalui pembangunan kombinasi kedua sektor (pertanian dengan industri) secara terpadu, terkait dan saling mendukung. Meskipun harus ditentukan terlebih dahulu sektor prioritasnya.

Memperhatikan berbagai isu pembangunan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur yang telah dijelaskan di atas, maka pilihan strategi pembangunan yang ideal bagi Provinsi Jawa Timur adalah strategi pembangunan yang tidak berimbang dengan menetapkan sektor pertanian sebagai *leading sector* yang disertai dengan pembangunan

sektor industri yang mendukung sektor pertanian (*equity with growth*) yang harus dilaksanakan secara konsisten dalam perumusan kebijakan-kebijakan pembangunannya.

Pertimbangan yang lain yang mendasari pemilihan terhadap sektor pertanian sebagai *leading sector* strategi pembangunan Provinsi Jawa Timur ke depan adalah adanya kenyataan bahwa dari hasil penelitian ini, pengaruh sektor pertanian terhadap pertumbuhan ekonomi dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat Provinsi Jawa Timur, jauh lebih baik dibandingkan pengaruh sektor industrinya. Dari perbandingan besarnya nilai pengaruh antara sektor pertanian dengan sektor industri terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur, dapatlah diketahui bahwa nilai pengaruh yang ditunjukkan dari nilai koefisien jalurnya, sektor pertanian bernilai sebesar 0,690, sedangkan sektor industri bernilai sebesar 0,517. Ini artinya pengaruh pertumbuhan sektor pertanian terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur lebih besar dibandingkan pengaruh pertumbuhan sektor industri terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Dengan demikian pemilihan sektor pertanian sebagai "*leading sector*" pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur akan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi daerah di Provinsi Jawa Timur lebih tinggi dibandingkan jika membangun sektor industrinya.

Selanjutnya jika memperbandingkan pengaruh antara pertumbuhan sektor pertanian dengan pertumbuhan sektor industri terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur

juga terlihat bahwa sektor pertanian berpengaruh lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri. Dari perhitungannya, sektor pertanian berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur, sebaliknya sektor industri justru tidak berpengaruh secara signifikan terhadap tingkat kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur. Berdasarkan pertimbangan inilah, kiranya sangat tepat jika menetapkan sektor pertanian sebagai *"leading sector"* pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur ke depan.

Jika sektor pertanian dijadikan sektor prioritas dalam strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur ke depan, maka yang perlu diperhatikan adalah pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang mana pembangunan sektor pertanian akan dilaksanakan. Bagaimanapun juga pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur akan berhasil jika dilaksanakan pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian.

Jika mengadopsi hasil perhitungan nilai LQ sektor pertanian dan industri pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seperti yang terlihat pada Tabel 5.16 halaman 148 di BAB 5, maka implikasi kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan industri di Provinsi Jawa Timur dapat dibaca dari dua dimensi, yaitu dimensi potensi sektoral dan dari dimensi potensi regionalnya.

A. Dari Dimensi Potensi Sektoral

Potensi pengembangan sektor pertanian untuk wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur (dengan nilai $LQ > 2$) adalah terdapat pada wilayah Kabupaten Pacitan, Kabupaten Blitar, Kabupaten

Kediri, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jember, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Bangkalan, sedangkan wilayah kabupaten/kota yang mempunyai nilai $LQ > 3$ adalah Kabupaten Sampang, Kabupaten Pamekasan, Kabupaten Sumenep, sedangkan potensi pengembangan sektor industri berada pada wilayah-wilayah kabupaten/kota : Kota Kediri, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Gresik, Kota Malang, Kabupaten Mojokerto, serta Kota Surabaya. Nilai LQ sektor industri untuk masing-masing wilayah sebesar > 1 , kecuali Kota Kediri dengan nilai LQ sebesar 2,40.

B. Dari Dimensi Potensi Regional (Wilayah)

Dari dimensi potensi regional, maka sudut tinjauannya adalah memperlihatkan potensi-potensi sektor pertanian dan industri yang dapat dikembangkan di masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) di Provinsi Jawa Timur.

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2006, di Provinsi Jawa Timur telah ditetapkan 9 (sembilan) Sub Wilayah Pengembangan (SWP) yaitu: SWP GKS Plus, SWP Malang Raya, SWP Madiun dan sekitarnya, SWP Kediri dan sekitarnya, SWP Probolinggo dan sekitarnya, SWP Blitar, SWP Jember dan sekitarnya, SWP Banyuwangi dan sekitarnya serta SWP Madura dan sekitarnya.

SWP GKS Plus, yang meliputi wilayah-wilayah : Surabaya, Gresik, Bangkalan, Sidoarjo (New Surabaya Metropolitan Areas), Pasuruan,

Mojokerto, Jombang, Lamongan, Tuban dan Bojonegoro dengan wilayah pusat pertumbuhannya Kota Surabaya.

SWP Malang Raya meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Malang, Kota Malang dan Kota Batu, dengan pusat pertumbuhan Kota Malang.

SWP Madiun dan sekitarnya meliputi wilayah-wilayah : Kabupaten Madiun, Ponorogo, Magetan, Pacitan, Ngawi dengan pusat pertumbuhan Kota Madiun.

SWP Kediri dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Kediri, Kota Kediri, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Trenggalek dan Kabupaten Tulungagung, dengan wilayah pusat pertumbuhan Kota Kediri.

SWP Blitar terdiri dari Kabupaten Blitar dan Kota Blitar dengan pusat pertumbuhan Kota Blitar.

SWP Probolinggo dan sekitarnya yang meliputi Kabupaten Probolinggo, Kota Probolinggo, Kabupaten Lumajang dengan wilayah pusat pertumbuhan Kota Probolinggo.

SWP Jember dan sekitarnya yang meliputi wilayah-wilayah Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Situbondo dengan wilayah pusat pertumbuhannya Kabupaten Jember.

SWP Banyuwangi hanya 1 (satu) kabupaten dengan pusat pertumbuhan di Banyuwangi.

SWP Madura yang meliputi Sampang, Pamekasan, Sumenep dengan wilayah pusat pertumbuhannya Pamekasan.

Berdasarkan pada Tabel 5.16 halaman 148, selanjutnya dapat diketahui karakteristik perekonomian untuk masing-masing Sub Wilayah

Pengembangannya (SWP) berdasarkan potensi pengembangan sektor pertanian dan industri dari masing-masing wilayah kabupaten/kota yang termasuk dalam masing-masing SWP. Sehingga dengan demikian arahan kebijakan pembangunan bagi masing-masing SWP ini dapat ditentukan.

Untuk SWP GKS Plus, perekonomiannya dicirikan dengan menonjolnya perkembangan sektor industri yang relatif tinggi dibandingkan SWP yang lain. Berdasarkan hal itu, maka arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah pengembangan sektor industri.

Untuk SWP Malang Raya, perekonomiannya bercirikan dengan kuatnya perkembangan sektor industri dan sektor pertanian. Oleh karena itu arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah dengan mengembangkan sektor industri dan sektor pertanian yang mengarah pada keterkaitan antara sektor industri dan pertanian (agro industri)

Untuk SWP Madiun dan sekitarnya, perekonomiannya didukung oleh kuatnya sektor pertanian. Berdasarkan hal itu maka arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah pengembangan sektor pertanian.

Untuk SWP Kediri dan sekitarnya, perekonomian sangat didominasi oleh kuatnya sektor industri dan sektor pertanian. Oleh karena itu, arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah dengan mengembangkan kedua sektor ini secara sinergis.

Untuk SWP Probolinggo dan sekitarnya, perekonomiannya dicirikan dengan kuatnya sektor pertanian, sehingga dengan demikian arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah pengembangan sektor pertanian.

Untuk SWP Blitar, sektor yang sangat menonjol dalam perekonomian SWP ini, yaitu sektor pertanian. Berdasarkan hal ini maka kebijakan pembangunan di SWP ini adalah dengan pengembangan sektor pertanian.

Untuk SWP Jember perekonomiannya didukung oleh kuatnya sektor pertanian. Oleh karena itu, arahan kebijakan pembangunan di SWP ini adalah pengembangan sektor pertanian.

Yang terakhir adalah SWP Madura. SWP Madura ini perekonomiannya bercirikan dengan kuatnya sektor pertanian. Berdasarkan kondisi ini arahan kebijakan pembangunan di SWP Madura ini adalah dengan pengembangan sektor pertanian.

Penjelasan di atas, hanya menyangkut arahan kebijakan pembangunan SWP yang berkaitan dengan sektor pertanian dan industri. Meskipun tidak dipungkiri bahwa masing-masing SWP tersebut, mempunyai potensi di sektor-sektor yang lain. Penjelasan tentang pengembangan sektor-sektor yang lain selain sektor pertanian dan industri pada masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan (SWP) dalam konteks penelitian tidak dijelaskan.

Jika sektor pertanian dijadikan sektor prioritas dalam strategi dan kebijakan pembangunan Provinsi Jawa Timur ke depan, maka yang perlu diperhatikan adalah pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang mana pembangunan sektor pertanian akan dilaksanakan. Bagaimanapun juga pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur akan berhasil jika

dilaksanakan pada wilayah-wilayah kabupaten/kota yang berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian.

Jika kemudian dilakukan pemetaan terhadap potensi sektor pertanian dan industri pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur, maka akan terlihat seperti Tabel 6.1 halaman 196.

Memperhatikan pada Tabel 6.1 tersebut, dapatlah dijelaskan arahan kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah kabupaten/kota sesuai dengan potensi (faktor *endowment*) yang dimiliki oleh masing-masing wilayah kabupaten/kota sebagai berikut :

Untuk SWP GKS Plus, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP GKS Plus adalah sebagai berikut :

Kota Surabaya, sesuai dengan peran dan fungsinya sebagai ibukota Provinsi Jawa Timur, maka arahan kebijakan pembangunan ekonominya diprioritaskan pada pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Sidoarjo, diarahkan pada pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa untuk menyanggah wilayah pusat Satuan Wilayah Pengembangan GKS Plus yaitu Kota Surabaya, karena kedekatan jarak antara Kabupaten Sidoarjo dengan Kota Surabaya.

Demikian juga dengan Kabupaten Gresik yang mempunyai kedekatan dengan Kota Surabaya, maka arahan kebijakan pengembangan Kabupaten Gresik akan sama dengan wilayah Kabupaten

Sidoarjo, yaitu pengembangan sektor industri, sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Bangkalan, kebijakan pengembangannya adalah sektor pertanian dan diarahkan sebagai wilayah pusat perdagangan (*logistic base*) untuk produk-produk pertanian. Karena wilayah ini mempunyai kedekatan dengan SWP Madura yang mempunyai potensi pengembangan sektor pertanian. Dengan demikian Kabupaten Bangkalan ini nantinya diharapkan dapat menjadi wilayah intermediasi antara wilayah pengembangan industri (Kota Surabaya) dengan wilayah pengembangan pertanian (Kabupaten Pamekasan, Sumenep dan Sampang).

Kota Pasuruan tidak mempunyai kekuatan baik dalam pengembangan sektor pertanian maupun sektor industri, karena itu wilayah ini diarahkan untuk pengembangan sektor-sektor yang lain yang diharapkan sebagai wilayah penyanggah Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Pasuruan, wilayah ini mempunyai potensi baik dalam pengembangan sektor pertanian maupun industri, oleh karena itu arahan kebijakan pengembangan wilayah Kabupaten Pasuruan adalah pengembangan sektor pertanian dan sektor industri. Hanya saja perlu dipertimbangkan, karena berkembangnya industri di Kabupaten Pasuruan pada umumnya industri-industri yang tidak mempunyai keterkaitan dengan sektor pertanian, maka pembagian atau pemisahan wilayah pengembangan antara sektor pertanian dengan sektor industri harus dipertegas lagi untuk mencegah konflik kepentingan antara kedua sektor tersebut.

Kondisi yang terjadi baik di Kota maupun Kabupaten Mojokerto sama dengan kasus yang terjadi di Kota dan Kabupaten Pasuruan. Oleh karena itu arahan kebijakan pengembangan antara Kota dan Kabupaten Mojokerto sama dengan Kota dan Kabupaten Pasuruan.

Kabupaten Jombang arahan kebijakan pengembangannya adalah pada sektor pertanian. Di samping itu perlu dilakukan pengembangan pada sektor-sektor yang lain, untuk menopang pengembangan sektor pertanian.

Kabupaten Lamongan, arahan kebijakan pengembangan wilayah ini adalah sektor pertanian, di samping sektor-sektor yang lain terutamanya pada sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Oleh karena itu konsep pengembangan sektor industri yang dikenal dengan "Gelangan" (Gresik, Lamongan, Tuban) perlu dikaji ulang. Mengingat wilayah pesisir (pantai utara) wilayah Kabupaten Lamongan sangat berpotensi dalam pengembangan sub sektor perikanan serta keberadaan tempat wisata WBL. Pengembangan industri di lokasi ini tentu akan sangat tidak menguntungkan. Dan oleh karena itu sebaiknya lokasi ini nantinya dikembangkan sebagai pusat logistik untuk produk-produk perikanan atau industri-industri yang bersifat menunjang pengembangan sub sektor perikanan.

Kabupaten Bojonegoro sebenarnya sangat berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian. Namun perkembangan sektor pertambangan dan energi yang demikian pesat pada wilayah Kabupaten Bojonegoro akhir-akhir ini akan secara otomatis diikuti oleh berkembangnya sektor industri. Oleh karena itu, perlu diwaspadai dan

diantisipasi agar berkembangnya sektor industri di wilayah ini nantinya tidak akan menimbulkan konflik kepentingan dengan sektor pertanian yang pada akhirnya akan sangat menekan perkembangan sektor pertaniannya. Di samping itu pada wilayah Kabupaten Bojonegoro perlu dikembangkan juga sebagai wilayah "*logistic base*" untuk produk-produk pertambangan karena hal itu akan sangat diperlukan bagi berkembangnya sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Bojonegoro.

Kabupaten Tuban mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian serta sektor pertambangan dan energi. Kekuatan dalam potensi di sektor pertambangan dan energi di Kabupaten Tuban kenyataannya telah mendorong berkembangnya sektor industri di Kabupaten Tuban, yaitu adanya relokasi Pabrik Semen Gresik ke Kabupaten Tuban. Perkembangan sektor industri ini kenyataannya telah mendorong perkembangan pada sektor-sektor lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut arahan kebijakan pengembangan Kabupaten Tuban adalah pengembangan sektor pertanian dan sektor industri, dengan tetap konsistensi pada pemisahan wilayah pengembangan sektor pertanian dan sektor industri.

Tabel 6.1
Arahan Kebijakan Pengembangan Masing-masing Kabupaten/kota
Berdasarkan Potensi Sektoralnya

No.	Kabupaten/Kota	Potensi Sektoral		
		Sektor Pertanian	Sektor Industri	Sektor Lainnya
I	SWP GKS PLUS :			
1	Kota Surabaya	0	x	x
2	Kabupaten Sidoarjo	0	x	x
3	Kabupaten Gresik	0	x	x
4	Kabupaten Bangkalan	x	0	x
5	Kota Pasuruan	0	0	x
6	Kabupaten Pasuruan	x	x	x
7	Kota Mojokerto	0	0	x
8	Kabupaten Mojokerto	x	x	x
9	Kabupaten Jombang	x	0	x
10	Kabupaten Lamongan	x	0	x
11	Kabupaten Bojonegoro	x	0	x
12	Kabupaten Tuban	x	0	x
II	SWP MALANG RAYA :			
1	Kota Malang	0	x	x
2	Kabupaten Malang	x	0	x
3	Kota Batu	x	x	x
III	SWP MADIUN :			
1	Kota Madiun	0	0	x
2	Kabupaten Madiun	x	0	x
3	Kabupaten Ponorogo	x	0	x
4	Kabupaten Pacitan	x	0	x
5	Kabupaten Magetan	x	0	x
6	Kabupaten Ngawi	x	0	x
IV	SWP KEDIRI :			
1	Kota Kediri	0	x	x
2	Kabupaten Kediri	x	0	x
3	Kabupaten Nganjuk	x	0	x
4	Kabupaten Trenggalek	x	0	x
5	Kabupaten Tulungagung	0	0	x
V	SWP BLITAR :			
1	Kota Blitar	0	0	x
2	Kabupaten Blitar	x	0	0
VI	SWP PROBOLINGGO :			
1	Kota Probolinggo	0	0	x
2	Kabupaten Probolinggo	x	0	x
3	Kabupaten Lumajang	x	0	x
VII	SWP JEMBER :			
1	Kabupaten Jember	x	0	x
2	Kabupaten Situbondo	x	0	x
3	Kabupaten Bondowoso	x	0	x
VIII	SWP BANYUWANGI :			
1	Kabupaten Banyuwangi	x	0	x
IX	SWP MADURA :			
1	Kabupaten Pamekasan	x	0	x
2	Kabupaten Sampang	x	0	x
3	Kabupaten Sumenep	x	0	x

Sumber : Diolah dari Tabel 5.17

Keterangan : 0 menunjukkan potensi sektor yang relatif lebih lemah dibandingkan sektor lainnya
 x menunjukkan potensi sektor yang relatif lebih kuat dibandingkan sektor lainnya.

Untuk SWP Malang Raya, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP Malang Raya adalah sebagai berikut :

Kota Malang sebagai pusat SWP Malang Raya, telah berkembang sebagai kota industri, wisata dan perdagangan serta jasa-jasa. Keberadaan industri rokok di Kota Malang telah memperkuat potensi industrinya dan tidak menciptakan konflik kepentingan dengan sektor pertaniannya serta lingkungan. Selain itu, berkembang pesatnya pendidikan di Kota Malang dan sebagai daerah wisata kenyataannya telah mendorong perkembangan sektor-sektor yang lainnya. Berdasarkan kondisi tersebut, arahan kebijakan pembangunan Kota Malang adalah tetap pada pengembangan "*green industry*" agar tidak terjadi konflik kepentingan dengan Kota Malang sebagai kota wisata.

Kabupaten Malang, berdasarkan potensi yang dimiliki, arahan kebijakan pembangunannya adalah dengan pengembangan pada sektor pertanian. Selain itu sektor jasa-jasa juga perlu mendapat perhatian, karena memang wilayah ini mempunyai potensi dalam pengembangan pariwisata. Pengembangan kedua sektor di Kabupaten Malang pada akhirnya akan menciptakan basis usaha di bidang agro-wisata yang saat ini sudah banyak berkembang di Kabupaten Malang.

Demikian juga dengan Kota Batu yang mempunyai tipe yang sejenis dengan Kabupaten Malang. Sehingga arahan pengembangan Kota Batu di samping pengembangan agro-wisata, juga perlu diarahkan untuk pengembangan agro-industri, dengan pertimbangan berlimpahnya

produk-produk pertanian yang merupakan bahan baku untuk usaha agro-industri di Kota Batu.

Untuk SWP Madiun, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP Madiun secara umum adalah pengembangan pada sektor pertanian. Karena hampir semua wilayah yang berada di sub-wilayah pengembangan Madiun mempunyai potensi pada sektor pertanian, kecuali Kota Madiun.

Kota Madiun sebagai pusat sub-wilayah pengembangan, arahan kebijakan pembangunannya diarahkan untuk dikembangkan sebagai "wilayah penyanggah" dari wilayah-wilayah yang lain. Untuk mencapai hal tersebut, maka perlu dikembangkan "*logistic base*" di Kota Madiun bagi produk-produk pertanian beserta proses produksinya. Di samping itu, sektor-sektor yang perlu dikembangkan adalah sektor perdagangan, hotel dan restoran, serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Madiun, arahan kebijakan pembangunannya adalah pengembangan pada sektor pertanian, karena dari perhitungan *LQ* nya, wilayah Kabupaten Madiun sangat berpotensi dalam pengembangan sektor pertanian. Di samping itu sektor-sektor yang layak untuk dikembangkan di Kabupaten Madiun adalah sektor konstruksi dan jasa-jasa.

Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi dalam pengembangan sektor pertanian. Oleh karena itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Ponorogo adalah pengembangan pada sektor pertanian. Selain itu di Kabupaten Ponorogo mempunyai potensi yang kuat dalam

sektor pertambangan dan penggalian dengan keberadaan kandungan batu gips yang besar pada wilayah Kabupaten Ponorogo. Berkaitan dengan hal tersebut, arahan kebijakan pembangunannya selain pengembangan sektor pertanian adalah pengembangan industri kerajinan yang dapat memanfaatkan batu gips tersebut. Karena selama ini bahan baku batu gips tersebut hanya dijual dan dibawa keluar daerah lain dalam bentuk bahan baku. Sehingga nilai tambah olahannya akan dinikmati oleh daerah lain.

Kabupaten Pacitan dengan kekuatan potensi sektoral yang tidak jauh berbeda dengan Kabupaten Ponorogo, arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Pacitan sama dengan Kabupaten Ponorogo, yaitu pengembangan sektor pertanian dan sub sektor industri Kecil dan kerajinan yang mampu memanfaatkan potensi batu gips yang ada di Kabupaten Pacitan.

Kabupaten Magetan mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian dan dikenal juga sebagai pusat industri kecil dan kerajinan dari kulit. Oleh karena itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Magetan adalah pengembangan di sektor pertanian serta revitalisasi industri kecil dan kerajinan dari kulit.

Kabupaten Ngawi mempunyai potensi yang kuat dalam sektor pertanian. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Ngawi adalah pengembangan pada sektor pertanian, di samping itu perlu dikembangkan juga sektor jasa-jasa untuk menunjang perkembangan sektor pertanian.

Untuk SWP Kediri, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP Kediri adalah sebagai berikut :

Kota Kediri sebagai pusat SWP, Kota Kediri tidak mempunyai kekuatan potensi dalam pengembangan sektor pertanian, namun sebaliknya Kota Kediri dengan keberadaan industri rokok terkenal, mempunyai potensi dalam pengembangan sektor industri dan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kota Kediri adalah pengembangan sektor industri yang mendukung pengembangan sektor pertanian untuk menyanggah wilayah sekitarnya serta mendorong semakin berkembangnya sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa.

Kabupaten Kediri mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Kediri adalah dengan pengembangan sektor pertanian di samping sektor jasa-jasa.

Kabupaten Nganjuk jika dilihat dari nilai *LQ* nya mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan kondisi tersebut, maka arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Nganjuk adalah sektor pertanian. Selain itu, berdasarkan pertimbangan geografis Kabupaten Nganjuk, maka kebijakan pengembangan sektor perdagangan, hotel dan restoran serta sektor jasa-jasa perlu menjadi bahan pemikiran.

Kabupaten Trenggalek mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian, berdasarkan hal itu arahan kebijakan pengembangan Kabupaten Trenggalek adalah dengan mengembangkan sektor pertanian.

Kabupaten Tulungagung jika dilihat dari nilai *LQ* nya tidak mempunyai kekuatan potensi dalam pengembangan sektor pertanian dan industri. Namun Kabupaten Tulungagung mempunyai potensi dalam sektor pertambangan dan penggalian dengan adanya tambang batu marmer yang demikian besar di kabupaten ini. Berdasarkan hal itu, maka arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Tulungagung adalah dengan melakukan revitalisasi industri kecil dan kerajinan yang dapat memanfaatkan sumber daya alam yang terdapat pada Kabupaten Tulungagung, yaitu batu marmer.

Untuk SWP Blitar, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP Blitar adalah sebagai berikut:

Kota Blitar, sebagai pusat SWP Blitar berkembang menjadi kota jasa utamanya jasa keuangan. Hal ini disebabkan karena Kota Blitar ini menjadi pengeksport tenaga kerja wanita yang terbesar di Provinsi Jawa Timur. Dengan banyaknya transaksi keuangan (pengiriman uang tenaga kerja wanita di luar negeri ke Kota Blitar) mendorong meningkatnya sektor keuangan di Kota Blitar dan mendorong perekonomian lokal Kota Blitar. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kota Blitar adalah mendorong semakin berkembangnya sektor jasa.

Kabupaten Blitar, mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Produk-produk pertanian yang terbesar dari Kabupaten Blitar adalah buah rambutan dan nanas. Namun kelemahan pokok pada umumnya adalah terjadinya fenomena "*supply respon*", yaitu pada saat musim panen, produknya berlimpah yang pada akhirnya mendorong harga produk pertanian jatuh. Tentunya kondisi kurang menguntungkan bagi petani. Berdasarkan kondisi yang seperti ini, arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Blitar adalah dengan mengembangkan sektor industri di bidang pengolahan produk-produk pertanian utamanya untuk buah rambutan dan nanas (agro-industri), di samping tetap fokus pada peningkatan produktivitas budidaya buah rambutan dan nanas.

Untuk SWP Probolinggo, arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten/kota yang berada di SWP Probolinggo adalah sebagai berikut :

Kota Probolinggo, sebagai pusat SWP Probolinggo, tidak mempunyai potensi dalam sektor pertanian dan Industri. Kalau dicermati dari komposisi sektoralnya dari PDRB Kota Probolinggo, sektor pengangkutan dan komunikasi merupakan sektor yang sangat dominan dalam perekonomian Kota Probolinggo. Kondisi ini tidak terlepas dari berkembangnya perusahaan angkutan yang ada di Kota Probolinggo. Oleh karena itu arahan kebijakan pembangunan Kota Probolinggo pada hakikatnya haruslah diarahkan pada peningkatan fungsi wilayah penyanggah bagi wilayah-wilayah yang lain dalam satu SWP Probolinggo.

Kabupaten Probolinggo berpotensi kuat dalam sektor pertanian dengan produk-produk yang menonjol adalah mangga. Rendahnya teknologi pasca panen menciptakan kondisi yang tidak menguntungkan bagi petani mangga di wilayah Kabupaten Probolinggo. Berdasarkan kondisi tersebut, arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Probolinggo adalah pengembangan sektor pertanian terutama dalam meningkatkan produksi mangga dan meningkatkan teknologi pasca panen. Di samping sektor-sektor tersebut yang perlu dikembangkan adalah sektor pariwisata, hotel dan restoran serta sektor jasa.

Kabupaten Lumajang mempunyai potensi yang kuat dalam sektor pertanian. Beberapa produk pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Lumajang ini adalah cengkeh, tebu, jambu mente dan kelapa. Berdasarkan kondisi ini, arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Lumajang adalah mengembangkan sektor pertanian dengan tetap mengacu pada upaya meningkatkan produktivitas produk-produk pertanian yang menjadi potensi utama Kabupaten Lumajang.

Untuk SWP Jember, pada umumnya wilayah-wilayah yang termasuk dalam SWP Jember adalah mempunyai potensi yang kuat dalam sektor pertanian. Untuk arahan kebijakan pembangunan masing-masing wilayah kabupaten yang berada di SWP Jember adalah sebagai berikut :

Kabupaten Jember, produk pertanian yang menjadi unggulan yang menjadikan Kabupaten Jember sebagai wilayah yang sangat berpotensi dalam sektor pertanian adalah tembakau. Di Provinsi Jawa Timur, produk

tembakau yang terbesar ada di Kabupaten Jember. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Jember adalah mengembangkan sektor pertanian yang memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan teknologi pasca panen untuk produk pertanian tembakau. Dengan begitu produk tembakau ini akan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Selain itu di Kabupaten Jember perlu diarahkan untuk dikembangkan sebagai wilayah "*logistic base*" untuk produk pertanian tembakau wilayah Provinsi Jawa Timur bagian timur. Mengingat wilayah-wilayah yang terdapat dalam SWP Jember semua berpotensi dalam produk pertanian tembakau.

Kabupaten Situbondo, berpotensi kuat dalam sektor pertanian dengan produk-produk pertanian yang terbesar adalah tembakau, tebu dan kelapa. Oleh karena itu, arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Situbondo ini adalah pengembangan pada teknologi pasca panen dan peningkatan produktivitas produk-produk pertanian yang menjadi potensi Kabupaten Situbondo.

Kabupaten Bondowoso, mempunyai tipikal geografis yang sama dengan Kabupaten Situbondo karena kedekatan di antara dua wilayah tersebut. Berdasarkan hal itu arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Bondowoso akan sama dengan Kabupaten Situbondo seperti yang telah dijelaskan.

SWP Banyuwangi hanya terdiri dari satu wilayah yaitu Kabupaten Banyuwangi. Kabupaten ini dikenal sebagai "lumbung padi" nya Provinsi Jawa Timur. Arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Banyuwangi adalah membentuk Kabupaten Banyuwangi sebagai sentra

pengembangan (*logistic base*) produk-produk pertanian untuk wilayah Provinsi Jawa Timur bagian timur. Mengingat secara geografis, SWP-SWP yang berdekatan dengan SWP Banyuwangi adalah semua mempunyai potensi yang kuat dalam sektor pertanian. Berdasarkan hal itu maka salah satu kebijakan yang penting yang perlu dipertimbangkan adalah dengan mengembangkan pelabuhan Tanjung Wangi sebagai pelabuhan yang diperuntukkan khusus untuk jalur distribusi produk-produk pertanian ke wilayah-wilayah yang lain.

SWP Madura secara umum mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Arah-an kebijakan pembangunan untuk masing-masing wilayah kabupaten yang termasuk dalam SWP Madura adalah sebagai berikut :

Kabupaten Pamekasan, mempunyai potensi yang kuat dalam pengembangan sektor pertanian dengan produksi yang sangat berpotensi di Kabupaten Pamekasan ini adalah padi dan tembakau. Seperti halnya Kabupaten Jember, maka arah-an kebijakan pembangunan Kabupaten Pamekasan adalah mengembangkan sektor pertanian yang memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan teknologi pasca panen untuk produk pertanian tembakau dan padi. Dengan begitu produk tembakau ini akan dapat dijual dengan harga yang lebih tinggi lagi. Selain itu di Kabupaten Pamekasan perlu diarahkan untuk dikembangkan sebagai wilayah "*logistic base*" untuk produk pertanian tembakau wilayah Jawa Timur bagian utara. Mengingat wilayah-wilayah yang terdapat dalam SWP Madura semua berpotensi dalam produk pertanian tembakau dan Kabupaten Pamekasan merupakan pusat SWP Madura.

Kabupaten Sampang, sama halnya dengan Kabupaten Pamekasan, yang mempunyai produk-produk pertanian tembakau dan padi di samping jambu mente sebagai produk pertanian yang sangat berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sampang. Berdasarkan hal itu, maka arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Sampang adalah dengan mengembangkan sektor pertanian yang memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan teknologi pasca panen untuk produk pertanian tembakau dan padi serta jambu mente.

Kabupaten Sumenep jika dibandingkan dengan Kabupaten Pamekasan dan Sampang mempunyai lebih banyak keragaman produk pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan. Produk-produk pertanian yang berpotensi untuk dikembangkan di Kabupaten Sumenep adalah padi, jagung, ubi kayu, kacang hijau, jambu mente, kelapa serta tembakau. Oleh karena itu tidak mengherankan jika Kabupaten Sumenep mempunyai potensi yang sangat kuat dalam pengembangan sektor pertanian. Berdasarkan hal itu, maka arahan kebijakan pembangunan Kabupaten Sumenep adalah dengan mengembangkan sektor pertanian yang memfokuskan pada peningkatan produktivitas dan teknologi pasca panen untuk produk pertanian yang menjadi potensi Kabupaten Sumenep seperti disebutkan di atas. Dengan demikian Kabupaten Sumenep nantinya akan menjadi wilayah berkembang agro-industri yang sangat signifikan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Sumenep khususnya dan Provinsi Jawa Timur pada umumnya. Apalagi dengan selesainya Jembatan Suramadu yang menjadi sarana bagi kemudahan jalur distribusi barang dan jasa antara wilayah Madura dan Jawa.

Jika mengadopsi hasil perhitungan nilai *LQ* sektor pertanian dan industri pada masing-masing wilayah kabupaten/kota di Provinsi Jawa Timur seperti yang terlihat pada Tabel 5.17 halaman 150, maka implikasi kebijakan pembangunan antara sektor pertanian dan industri di Provinsi Jawa Timur dapat dibaca dari 2 (dua) dimensi, yaitu dimensi potensi sektoral dan dimensi potensi regional.

6.8 Keterbatasan Studi

Dalam penyusunan Disertasi ini terdapat keterbatasan-keterbatasan, antara lain :

1. Obyek studi masih terbatas wilayah Provinsi Jawa Timur saja dan belum mencakup secara keseluruhan Provinsi di Indonesia.
2. Variabel eksogen yang digunakan terbatas pada sektor pertanian dan sektor industri dari 9 (sembilan) variabel sektor ekonomi. Memang ke dua sektor inilah yang selalu menjadi bahan perdebatan dalam setiap upaya pembangunan ekonomi, karena kedua sektor ini mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pembangunan ekonomi suatu negara.
3. Otonomi daerah sudah berjalan selama 6 (enam) tahun, maka data yang digunakan dalam studi ini dibatasi pada 6 (enam) tahun sepanjang era pelaksanaan otonomi daerah.

BAB 7

PENUTUP

7.1 Kesimpulan

Mengacu pada hasil analisis dan pembuktian hipotesis pada BAB 5 serta pembahasan pada BAB 6, maka dalam studi ini dapat ditarik kesimpulan dan saran sebagai berikut :

1. Kontribusi pertumbuhan riil sektor pertanian, mempunyai pengaruh yang bermakna/signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Koefisien jalur yang bertanda positif, berarti semakin meningkatnya pertumbuhan sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya kenaikan pada keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya terjadinya pertumbuhan yang negatif pada sektor pertanian, maka akan mengakibatkan penurunan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
2. Kontribusi pertumbuhan riil sektor industri, mempunyai pengaruh yang bermakna/signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Koefisien jalur yang bertanda positif, berarti semakin meningkatnya pertumbuhan sektor industri akan mengakibatkan terjadinya kenaikan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya terjadinya pertumbuhan yang negatif pada sektor industri, maka akan mengakibatkan penurunan keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur.
3. Kontribusi pertumbuhan riil sektor pertanian berpengaruh bermakna/signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat/IPM di

Provinsi Jawa Timur. Koefisien jalur pertumbuhan sektor pertanian bertanda positif, berarti setiap terjadi pertambahan pada pertumbuhan sektor pertanian akan mengakibatkan kenaikan pada kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur. Sebaliknya terjadinya penurunan pada pertumbuhan sektor pertanian akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada tingkat kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur.

4. Kontribusi pertumbuhan riil sektor industri mempunyai pengaruh langsung yang tidak bermakna/signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur. Namun, pertumbuhan sektor industri akan berpengaruh secara bermakna/signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat jika melalui variabel keberhasilan pembangunan daerah.
5. Keberhasilan pembangunan daerah mempunyai pengaruh yang bermakna/signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur. Koefisien jalur dari keberhasilan pembangunan daerah bertanda positif, hal ini menandakan naiknya keberhasilan pembangunan daerah di Provinsi Jawa Timur akan mengakibatkan kenaikan pada kesejahteraan masyarakat/IPM. Sebaliknya, terjadinya penurunan pada keberhasilan pembangunan daerah, maka akan mengakibatkan terjadinya penurunan pada kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur.
6. Kontribusi pertumbuhan riil sektor pertanian yang berpengaruh terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan

masyarakat/IPM, sejalan dengan pendapat Yotopoulos *and* Nugent. Sedangkan pertumbuhan sektor industri yang berpengaruh signifikan terhadap keberhasilan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat/IPM, sejalan dengan pendapat Yotopoulos *and* Nugent dan Lane *and* Robertson.

7. Secara terintegrasi dapat disimpulkan, bahwa pertumbuhan sektor pertanian baik secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh yang signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat/IPM di Provinsi Jawa Timur, sedangkan pertumbuhan sektor industri belum memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan di Provinsi Jawa Timur untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakatnya. Dengan demikian bagi Pemerintah Provinsi Jawa Timur melalui hasil studi ini akan memberikan kontribusi dalam penyusunan kebijakan pembangunan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat.

7.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil studi, maka dikemukakan saran sebagai berikut :

1. Ke depan, Pemerintah Provinsi Jawa Timur harus melakukan reorientasi strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur, karena strategi dan kebijakan pembangunan yang memberi prioritas pembangunan pada sektor industri yang selama ini diadopsi oleh Pemerintah Provinsi Jawa Timur terbukti gagal dalam meningkatkan kesejahteraan sebagian besar masyarakat Provinsi

Jawa Timur. Hasil penelitian ini memberi petunjuk bahwa pembangunan sektor pertanian relatif lebih menguntungkan dibandingkan dengan pembangunan sektor industri dalam kerangka pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur.

2. Untuk mengimplementasikan pembangunan sektor pertanian di Provinsi Jawa Timur, hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur mendorong peningkatan produktivitas sektor pertanian. Dalam jangka pendek, dapat dilakukan dengan penggunaan/penerapan teknologi yang lebih maju, kemudahan pengadaan pupuk dan dilakukannya penyuluhan kepada petani yang lebih intensif lagi. Dalam jangka panjang, dapat dilakukan pengembangan agro-industri di masing-masing Satuan Wilayah Pengembangan yang mempunyai potensi dalam pengembangan sektor pertanian dari proses sampai ke pamasarannya. Oleh karena itu pada masing-masing wilayah tersebut perlu dikembangkan pula *"logistic base"* untuk produk-produk pertanian, sehingga dengan demikian terjadinya fenomena *"supply response"* pada produk-produk pertanian dapat diminimalisir.
3. Demi keberhasilan sektor industri dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat/IPM, hendaknya Pemerintah Provinsi Jawa Timur lebih mendorong pertumbuhan industri berskala kecil dan menengah yang banyak menyerap tenaga kerja, dan terutamanya diarahkan pada industri-industri yang mempunyai sifat *"forward linkage"* dan *"backward linkage"* terhadap sektor pertanian. Pengembangan industri yang bersifat padat modal dan mempunyai sifat berlawanan dengan

keberadaan sektor pertanian hendaknya dikembangkan pada Satuan-Satuan Wilayah Pengembangan yang tidak mempunyai potensi untuk pengembangan sektor pertanian.

4. Bagi peneliti selanjutnya, hendaknya ada penambahan variabel eksogen dari sektor ekonomi yang berpengaruh pada keberhasilan pembangunan daerah Provinsi Jawa Timur serta kesejahteraan masyarakat/IPM. Dengan menambah variabel eksogen dalam penelitian berikutnya, maka diharapkan akan menambah informasi tentang peranan sektor-sektor yang berpengaruh dalam pembangunan ekonomi di Provinsi Jawa Timur. Sehingga penetapan strategi dan kebijakan pembangunan ekonomi akan semakin komprehensif.

DAFTAR PUSTAKA

- Ackoff, R.L. 1984, *On the nature of development and planning*, In: Korten, D.C. & Klauss, R. (eds.), *People-centred development. Contributions toward theory and planning frameworks*. Connecticut : Kumarian, 195-197.
- Adelman, Irma. 1984. Beyond Exported Growth. *World Development*. 12(9):937-949 : World Bank.
- _____, 1999, *The Role Of Government in Economic Development, Working Paper No.890*, Department of Agricultural and Resource Economics and Policy, Division of Agricultural and Natural Resource : University Of California at Berkeley.
- Adelma, Irma and Cynthia T. 1973, *Economic Growth and Social Equity in Developing Countries*. California : Stanford University Press.
- Aghion, Philippe. 2001, Comment, dalam Meier, Gerald M and Joseph E. Stiglitz, (eds), 2001, *Frontiers of Development Economics, The Future in Perspective* : World Bank and Oxford University Press.
- Anderson, K. 1987, On why Agriculture Declines with Economic Growth. *Agricultural Economics* 1, pp : 195-207.
- Arief, Sritua. 1993, *Pemikiran Pembangunan dan Kebijakan Ekonomi*. Jakarta : Lembaga Riset Pembangunan.
- Arsyad, Lincoln. 1999, *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta : STIE YKPN.
- Atkinson, Anthony B. 1970, On the Measurement on Inequality, *Journal of Economic Theory*, September 1970,2(3), pp : 244-63
- Badan Pusat Statistik. 2001, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2000*, Surabaya : BPS
- _____. 2002, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2001*, Surabaya : BPS
- _____. 2003. *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2002*. Surabaya : BPS
- _____. 2004 *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2003*. Surabaya : BPS

- _____. 2005, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2004*. Surabaya : BPS
- _____. 2006, *Provinsi Jawa Timur Dalam Angka, 2005*. Surabaya : BPS
- Banoewidjojo, Moeljadi. 1983, *Pembangunan Pertanian*. Surabaya : Kerjasama antara Openi Malang dan Usaha Nasional.
- Boeke, J.H. 1953, *Economics and Economic Policy in Dual Societies*. New York : Institute of Pacific Relation.
- Campfens, H. (ed.). 1997. *Community development around the world: practice, theory, research and training*. London : University of Toronto.
- Chambers, R. 1997, *Whose reality counts? Putting the first last*. London : Intermediate Technology Publications.
- Cheema, G.S. and Rondenelli, D.A. (eds.). 1983, *Decentralization and development. Policy implementation in developing countries*. Beverley Hills: Sage.
- Chenery, H.B and L.J. Taylor. 1968, Development Patterns : Among Countries and Over Time, *Review Economic Statistic*, 50 (November), 391-416.
- David, Paul A, and J.G. Goddard Lopes. 2001, *Knowledge, Capabilities and Human Capital Formation in Economic Growth*, Working Paper 01/13, June. New Zealand :Trasury.
- Dorward, Andrew, Jonathan Kydd, Jamie Morrison and Collin Poulton. 2005, Institutions, Markets and Economic Co-ordination: Linking Development Policy to Theory and Praxis, *Development and Change* 36(1): 1-25, *Institute of Social Studies, Blackwell Publishing*. Toronto
- Eckaus, R.S. 1955, The Factor Proportions Problem in Underdeveloped Countries, *American Economic Review*, 45, pp : 539-565.
- Engel, R.F and C.W.J.Granger. 1987, Co-integration and Error Correction: Representation, Estimation and Testing, *Econometrica* 55, pp. 251-76.
- Fane, G and T. Condon. 1996, Trase Reform in Indonesia, 1987-1995, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 32(3):33-54, Indonesia : Project The Australian National University Press.

- Fei, John C.H. and Gustav Ranis. 1964, *Development of The Labor Surplus Economy: Theory and Policy*. : Richard A. Irwin, Homewood, Illinois.
- Galor, O. and Zeira, J. 1993, "Income Distribution and Macroeconomics", *Review of Economic Studies*, 60, 35-52.
- Garcia, J.G. 1997, *Trade and Price Policies: Incentives or Disincentives for Indonesian Agriculture?*, Jakarta : The World Bank , RSI.
- Gopinath et al. 1996, Competitiveness of U.S. Food Processing: Benefit from Primary Agriculture, *American Journal of Agriculture Economics* 78(4), pp 1044-55.
- Gran, G. 1983. *Development by people. Citizen construction of a just world*, New York : Praeger.
- Gujarati, Damodar N. 2003, *Basic Econometrics, International Edition*. New York : McGraw-Hill Higher Education.
- Hagen, Everett E. 1980, *The Economics of Development, Third Edition*. New York : Richard D. Irwin, Inc.
- Haines, R. 2000, *Development Theory* In: Swanepoel, H. & De Beer, F. (eds.). *Introduction to development studies 2nd ed*. Halfway House : International Thompson.
- Halim, Abdul. 2001, *Bunga Rampai Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : Unit Penerbit dan Percetakan (UPP) AMP YKPN.
- Hartarto. 1985, Menumbuhkan Pohon Industri dan Keterkaitannya, *Prisma* 14 (5) : 65-70. Jakarta : LP3ES.
- _____. 2006, *Industrialisasi Serta Pembangunan Sektor Pertanian Dan Jasa Menuju Visi Indonesia 2030*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.
- Hayami, Y. and V. Ruttan. 1985, *Agricultural Development: An International Perspective*. Baltimore : John Hopkins University Press.
- Hirschmann, A.O. 1958, *The Strategy of Economic Development*, New Haven : Yale University Press.
- Hoff, Karla and Joseph E Stiglitz, 2001, Modern Economic Theory and Development, dalam Meier, Gerald M and Joseph E. Stiglitz, (eds), 2001, *Frontiers of Development Economics, The Future in Perspective* : World Bank and Oxford University Press, 389 – 459.

- Jorgeson, D.W, Gollop, F, and Fraumeni. 1987, *Productivity and U.S. Economic Growth*. Cambridge : Harvard University Press.
- Kilkenny, Maureen. 2004, *Geography, Agriculture, and Rural Development, Plenary Address*. London : The Agricultural Economics Society 78th Annual Conference.
- Kothari, R. 1993, *Poverty, human consciousness and the amnesia of development*. London : Zed Books.
- Koutsoyiannis, A. 1977, *Theory of Econometrics, Second Edition*, Hongkong : MacMillan Publisher LTD.
- _____. 1982, *Modern Microeconomic Theory*. Hongkong : MacMillan Publisher LTD.
- Krueger, A, Schiff, M and Valdes, A. 1992, *The Political Economy of Agriculture Pricing Policy: A Synthesis of the Economics of Developing Countries*. Baltimore : John Hopkin University Press.
- Kuhnen, Frithjof. 1987, Causes of Underdevelopment and Concepts for Development, An Introduction to Development Theory, *The Journal of Institute of Development Studies, Vol VIII*.
- Kuznet, Simon. 1971, *Economic Growth of Nations, Total Output and Production Structure*. Cambridge : The Belknap Press of Harvard University Press.
- Lane, John S London and Peter E Robertson. 2003, Accumulation and Productivity Growth in Industrializing Economies, *Paper prepared for the Royal Economic Society Conference University of Warwick*, April.
- Layard, P.R.G and A.A.Walter. 1978, *Microeconomic Theory*. New York : McGraw-Hill Book Company.
- Lewis, W.A. 1954, Economic Development with Unlimited Surplus Supplies of Labor, *Manschester School of Social Science Vol. 22*, pp.139 – 191.
- _____.1965, *The Theory of Economic Growth*. London : Mac Millan.
- Lewis, P, Martin,W. and Savage, C. 1988, Capital and Investment in The Agricultural Economy, *Quartely Review of the Rural Economy*, Vol 22, No.1, pp 48 – 53.

- Madnany, G.M.K. 1983, *Intoduction to Econometrics, Principles and Application, second edition*. New Delhi : Oxford & IBH Publishing Co.
- Manan, Bagir dan Kunjana Magnar. 1994, *Beberapa Masalah Hukum Tata Negara Indonesia*, Bandung Alumni.
- Mangkoesoebroto, Guritno. 1988, *Ekonomi Publik Bagian 1, Suatu Analisis Teoritis*. Yogyakarta : PAU Studi Ekonomi, UGM.
- Martin, W and D.Mitra. 1998, *Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing, Development Research Group, World Bank and Department of Economics*. Washington D.C : Florida International University.
- Martin, W. and Warr, P.G. 1993. Explaining the Relative Decline of Agriculture: A supply-side analysis for Indonesia, *World Bank Economic Review* 7(3), 381-401)
- Matsuyama, Kinomori. (1992), Agricultural Productivity, Comparative Advantage and Economic Growth, *Journal of Economic Theory*, 58: 317-334.
- McClelland, D.C. 1961, *The Achieving Society*, Princenton, NJ : van Nostrand
- Meier, Gerarld M. 1970, *Leading Issues in Economic Development, Second Edition*. Hongkong : Oxford University Press.
- _____. 2001, Introductions: Ideas For Development, dalam, Meier, Gerald M and Joseph E. Stiglitz, (eds), 2001, *Frontiers of Development Economics, The Future in Perspective* : World Bank and Oxford University Press, pp 1 – 12.
- Mosher, A.T. 1966, *Getting Agricultural Moving, Essential for Development and Modernization*, New York, Washington, London : Frederick A Praeger Publisher,
- _____. 1969, *Creating A Progressive Rural Structure, to Serve a Modern Agriculture.*, New York, N.Y. 10020 : The Agriculture Development Council, Inc (Saduran ke dalam bahasa Indonesia oleh Ir. Rochim Wirjomidjojo dan Dr. Ir. Sudjanadi, CV Yasaguna, Jakarta 1986).
- _____. 1971, *To Creat A Modern Agriculture, Organization and Planning.*, New York, N.Y. 10020 : The Agricultur Development Council, Inc.

- _____. 1987, *Menggerakkan dan Membangun Pertanian*, Jakarta : CV Yasaguna
- Mursinto. 2004, *Derajat Desentralisasi Fiskal dan Tingkat Kemandirian Keuangan Pada Era Otonomi Daerah Pemerintahan Kabupaten dan Kota di Provinsi Jawa Timur*, *Disertasi*, Tidak Dipublikasikan. Surabaya : Pascasarjana Unair
- Myrdall, G, 1957, *Economic Theory and Underdeveloped Region*. London : Cambridge.
- Nicholson. 1985, *Microeconomics Theory, Basic Principle and Extension*. Sydney The Dryden Press International Edition.
- Nurkse, Ragnar. 1964, *Masalah Pembentukan Modal Di Negara-Negara Jang Sedang Membangun*, terjemahan, Bhratara, Djakarta.
- Perroux, F. 1957, *Note sur la Notion de 'Pole de Croissan'*, *Economic Apliquee*, 8, in Hagen, E.E, 1980, *The Economics of Development*. New York : Richard D Irwin, Inc.
- Prebisch, R. 1959, *The Role of Commercial Policies in Underdeveloped Countries*, *American Economic Review* 49, pp 251-273.
- Ranis, Gustav. 2033, *Is Dualism Worth Revisiting?*, Centre Discussion Paper No.870, Economic Growth Centre, Yale University.
- Ratto, Jorn and Ragnar Torvik. 2003, *Interactions between Agriculture and Industry : Theoretical Analysis of the Consequences of Discriminating Agriculture in Sub-Saharan Africa*, *Review of Development Economics* 7 (1) : 138 – 151.
- Rostow, W.W. 1960, *The Stage of Economic Growth*. Cambridge : Massachussets.
- Rosenstein-Rodan, P.N. 1970, *The Theory of The Big Push*, in Meier, G.M, *Leading Issues in Economic Development, Studies in International Poverty*. Hongkong : Oxford University Press.
- Sadli, M. 1987, *Pembentukan Kebijakan Ekonomi di Masa Orde Baru: Berbagai Dilema dan Resolusinya*, dalam Esmara, Hendra (penyunting), *Teori Ekonomi dan Kebijakan Pembangunan, Kumpulan Esei untuk Menghormati Sumitro Djojohadikusumo*, Gramedia, Jakarta.
- Salim, E. 1997. *Recollection of My Career*. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 33 (1):45-73, Indonesia Project, The Australian National University.

- Radianto. 1987, *Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Kenaf di Kabupaten Gresik Jawa Timur*, Skripsi (tidak diterbitkan), Departemen Pertahanan Keamanan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Cabang Jawa Timur, Fakultas Pertanian, Surabaya,
- Schuurman, F.J. 1993, *Development theories in the 1990s* In: Schuurman, F.J. (ed.). *Beyond the impasse. New directions in development theory*. London: Zed Books: 1-48.
- Sen, Amartya. 1992, *Inequality Reexamined*. New York : Russel Sage Foundations.
- _____.1999, *Development As Freedom*. New York : Alfred A. Konpf.
- Simatupang, P. 1997, *Akselerasi Pembangunan Pertanian dan Pedesaan Melalui Strategi Keterkaitan Berspektrum Luas*, Pusat Penelitian Sosial Ekonomi, Bogor : Institut Pertanian Bogor.
- Sipayung, T. 1999, *Pengaruh Kebijakan Makro Ekonomi Terhadap Sektor Pertanian dalam Pembangunan Ekonomi Indonesia Suatu Pendekatan Sisi Penawaran*, Disertasi Doktor (tidak dipublikasikan), Institut Pertanian Bogor.
- Smith, Adam. 1937, *An Inquiry Into The Nature and Causes Of The Wealth Of Nation*. New York : The Modern Library.
- Soehoed, A.R. 1988, *Deflections on Industrialization and Industrial Policy in Indonesia*, *Bulletin of Indonesian Economic Studies* 24(2):43-57, Indonesia Project, The Australian National University.
- Spalding, N. L. 1990. *The relevance of basic needs for political and economical development*, *Studies in Comparative and International Development* 25(3): 90 -115.
- Stiglitz, Joseph E. 1989, *Market, Market Failures, and Development*, *American Economic Review* 79 (2, May): 197 – 203.
- Sumodiningrat, Gunawan. 1993, *Ekonometrika Pengantar*. Yogyakarta : BPFE.
- Sundaram. 2002, *State and Market in Economic Development: Southeast Asian Industrial Policy in Comparative East Asian Perspective*, paper presented, in International Seminar: *Promoting Growth and Welfare: Structural Changes And The Role of Institution In Asia*, Santiago, Chili and Rio de Janeiro, April 29 – May 03.

- Syrquin, M. 1986, *Productivity Growth and Factor Reallocation*, in Chenery, H, Robinson and Syrquin M, eds, *Industrialization and Growth a Comparative Study*. New York : Oxford University Press.
- Temple, Jonathan and Ludger Wobmann.. 2004, *Dualism and Cross-Country Growth Regression, Discussion Paper No 04/560*, Department of Economics University of Bristol, United Kingdom, September, 2004)
- Timmer, C.P. 1969, The Turnip, the New Husbandry and the English Agricultural Revolution, *Quarterly Journal of Economics*. 83:375-395.
- _____.1988, The Agricultural Transformation. In H. Chenery and T.N. Srinivasan (Eds.), *Handbook of Development Economics*, Volume I, page 275-331. Amsterdam : North Holland.
- Todaro, Michael P. 2000, *Pembangunan Ekonomi di Dunia Ketiga*, Edisi Ketujuh, (terjemahan). Jakarta : Erlangga.
- UNDP. 2006, *Human Development Report 2006*. New York : UNDP.
- Varian, Hal R. 1987, *Intermediate Microeconomics, A Modern Approach, Fourth Edition*. New York : W.W.Norton & Company.
- Wang, S. 1996, US Trade Laws Concerning Nonmarket Economics Revisited for Fairness and Consistency, *Emory International Law Review*, Vol 10, No 2.
- Wie, T.K. 1990. Perubahan ke Arah Industrialisasi Berorientasi Ekspor: Peluang dan Tantangan, *Prisma* 19 (3):29-43, LP3ES, Jakarta.
- Yotopoulos, Pan, A. and Jeffrey B.Nugent. 1976, *Economics of Development, Empirical Investigations*. New York : Harper & Row Publisher.

Lampiran 1

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini saya :

Nama : Sambari Halim Radianto

NIM : 090315280.D

Program Studi : Ilmu Ekonomi

Alamat/No. Telp : 031-70954888 / 08123034888

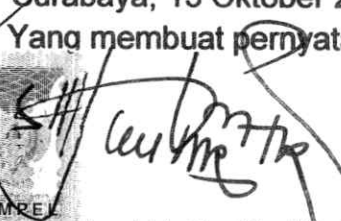
Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Disertasi saya ini adalah asli dan benar-benar hasil karya sendiri, dan bukan hasil karya orang lain dengan mengatas namakan saya, serta bukan merupakan hasil peniruan atau penjiplakan (plagiarism) dari hasil karya orang lain. Disertasi ini belum pernah diajukan untuk gelar akademik baik di Universitas Airlangga, maupun di perguruan tinggi lainnya;
2. Dalam Disertasi ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan;
3. Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan apabila di kemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar yang telah diperoleh karena karya tulis Disertasi ini, serta sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Surabaya, 13 Oktober 2008

Yang membuat pernyataan,




Sambari Halim Radianto
NIM. 090315280.D

Lampiran 2

PETA TEORI

No.	Penulis dan Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Gopinath, et al. (1996) dalam penelitiannya dengan judul <i>Competitiveness of U.S. Food Processing: Benefit from Primary Agriculture</i> .	Terdapat hubungan dan interaksi yang erat antara sektor pertanian dan sektor industri. Mereka menemukan hubungan antara sektor pertanian dengan Industri pengolahan makanan. Meningkatkan produktivitas di sektor pertanian akan diikuti dengan semakin murahya harga input di sektor industri pengolahan makanan. Dan dengan semakin murahya harga input tersebut, maka permintaannya akan mengalami peningkatan.
2.	Kuznet (1971) dalam penelitiannya dengan judul <i>Economic Growth of Nations, Total Output and Production Structure</i> , meneliti tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur pada negara-negara yang melakukan pembangunan ekonominya.	a. Adanya pergeseran penurunan peranan sektor pertanian dan produk-produk primer lainnya seperti pertambangan, kehutanan dan perikanan. Dan sebaliknya terjadi peningkatan peranan sektor industri dan jasa-jasa dalam perekonomian yang sedang mengalami pembangunan ekonominya. b. Bahwa awal pertumbuhan ekonomi yang terjadi selalu ditandai dengan meningkatnya akumulasi modal secara fisik (<i>physical capital accumulations</i>).

Lanjutan.....

3. Martin dan Mitra (1998) dalam penelitiannya dengan judul *Productivity Growth and Convergence in Agriculture and Manufacturing, Development of Research Group, World Bank and Department of Economics*, meneliti pertumbuhan total produktivitas antara Sektor Pertanian dan Sektor Industri dengan menggunakan sampel besar dari banyak negara pada berbagai tingkat pembangunan ekonominya.
 - a. Sektor pertanian lebih produktif dibandingkan sektor industri.
 - b. Di samping itu diketahui pula bahwa pertumbuhan produktivitas sektor pertanian lebih besar dibandingkan dengan pertumbuhan produktivitas sektor industri.
4. Syrquin (1986) dalam penelitiannya dengan *Productivity Growth and Factor Reallocation, in Chenery, H, Robinson and Syrquin M, eds, Industrialization and Growth: a Comparative Study*, melakukan penelitian untuk membandingkan produktivitas total dari faktor produksi (*Total Factor Productivity*) antara Sektor Pertanian dengan Sektor Industri

Produktivitas tenaga kerja di sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan dengan sektor industri selama tahap yang penting dari proses pertumbuhan.
5. Jogersen, Gollop and Fraumeni (1987) dalam penelitiannya dengan judul *Productivity and U.S. Economic Growth*, melakukan penelitian dengan menggunakan pendekatan fungsi biaya untuk setiap sektor di Amerika Serikat dan mengestimasi tingkat pertumbuhan produktivitas sektoral.

Pertumbuhan produktivitas pada sektor pertanian lebih cepat dibandingkan sektor-sektor yang lainnya.

Lanjutan.....

6. Lewis, Martin and Savage (1988) dalam penelitiannya dengan judul *Capital and Investment in The Agricultural Economy*, melakukan penelitian dengan mempergunakan model fungsi produksi untuk menghitung pertumbuhan produktifitas Sektor Pertanian dan Sektor Industri serta Sektor Jasa di Australia.
Pertumbuhan produktifitas sektor pertanian lebih tinggi dibandingkan kedua sektor yang lain.
7. Djoko Mursinto (2004) dalam penelitiannya yang berjudul "Pengaruh Derajat Desentralisasi Fiskal Dan Tingkat Kemandirian Keuangan Terhadap Kategori Pemerintahan Kabupaten Dan Kota pada awal Otonomi Daerah Di Provinsi Jawa Timur"
Satu diantara hasil penelitiannya yaitu bahwa derajat desentralisasi fiskal yang menunjukkan kemampuan keuangan daerah masih rendah dan hubungan antara Pemerintah Pusat dan daerah bersifat konsultatif. Model derajat desentralisasi fiskal tidak dapat dipakai sebagai ukuran tingkat kemandirian daerah pada awal otonomi daerah.
8. Sambari Halim Radianto (1987) dalam penelitiannya yang berjudul "Optimalisasi Penggunaan Tenaga Kerja Dalam Usahatani Kenaf di Kabupaten Gresik Jawa Timur"
Hasil penelitiannya yaitu bahwa salah satu faktor rendahnya produktifitas tenaga kerja di sektor pertanian adalah karena rendahnya tingkat pengetahuan dan ketrampilan petani sehingga penggunaan tenaga kerja dalam usahatani tidak dapat optimal.

Lampiran 3 Hasil Pengujian Asumsi Linieritas

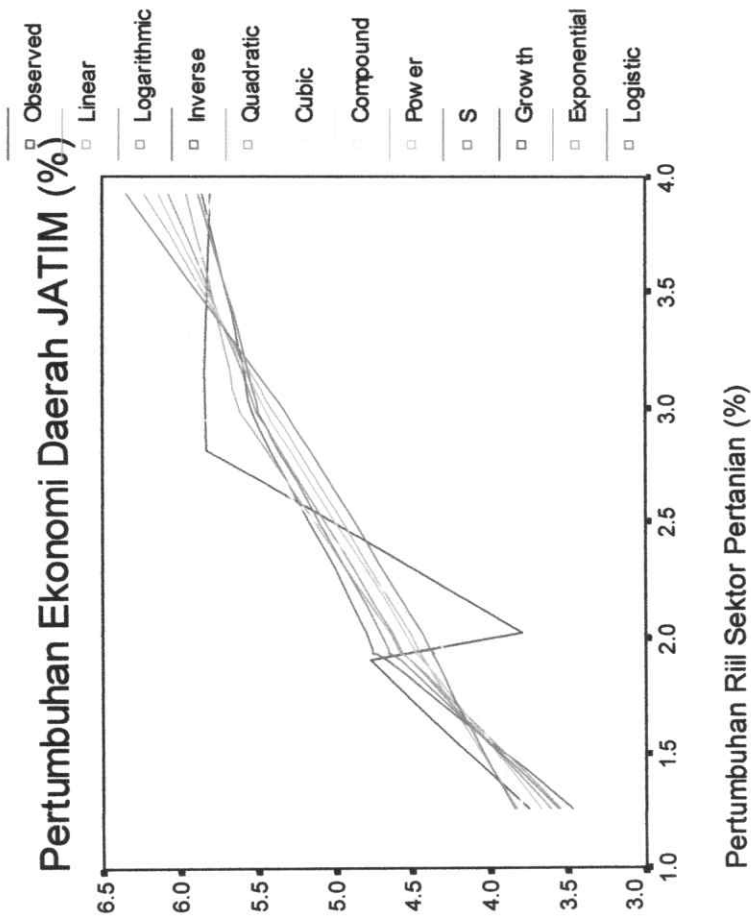
Curve Fit

MODEL: MOD_1.

Independent: P_R_PERT

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
PRT_EKNM	LIN	.748	4	11.89	.026		2.7048	.9000		
PRT_EKNM	LOG	.774	4	13.70	.021		3.1182	2.1619		
PRT_EKNM	INV	.738	4	11.28	.028		6.9897	-4.4289		
PRT_EKNM	QUA	.796	3	5.85	.092		1.0188	2.3705	-.2833	
PRT_EKNM	CUB	.860	2	4.09	.203		7.0012	-5.7649	3.0942	-.4343
PRT_EKNM	COM	.738	4	10.92	.030		3.0432	1.2064		
PRT_EKNM	POW	.762	4	12.82	.023		3.3129	.4523		
PRT_EKNM	S	.733	4	10.98	.030		2.0096	-.9305		
PRT_EKNM	GRO	.732	4	10.92	.030		1.1129	.1877		
PRT_EKNM	EXP	.732	4	10.92	.030		3.0432	.1877		
PRT_EKNM	LGS	.732	4	10.92	.030		.3286	.8289		

Lanjutan.....



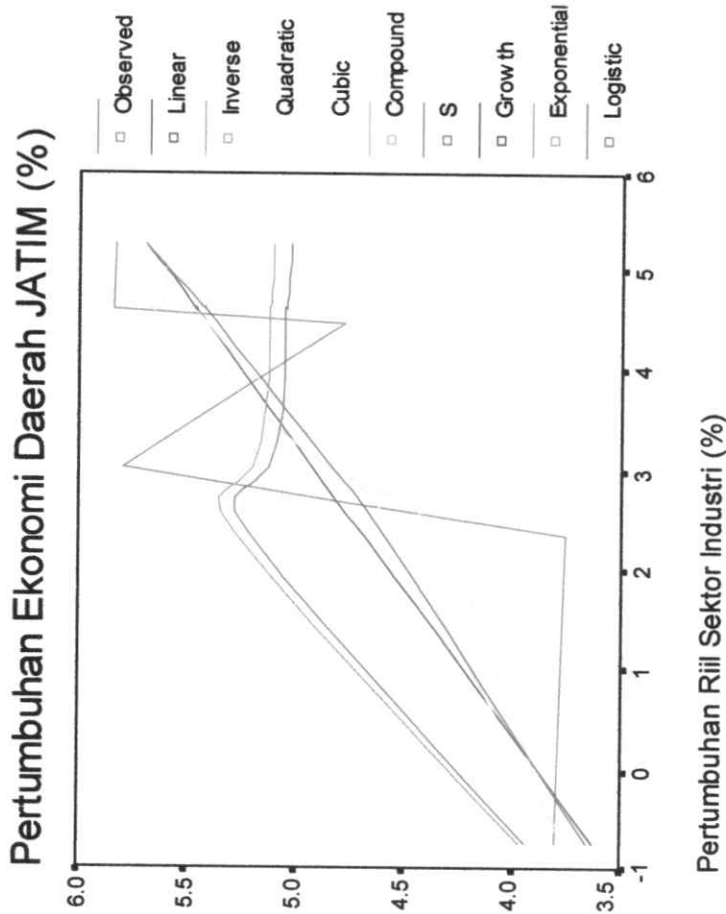
Lanjutan.....

MODEL: MOD_2.
Independent Variable: P_R_IDS Minimum value: -.73
The independent variable contains non-positive values. Models LOGARITHMIC
and POWER cannot be calculated.

Independent: P_R_IDS											
Dependent Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3		
PRT_EKNM LIN	.563	4	5.15	.086	3.8789	.3437					
12 PRT_EKNM LOG											
PRT_EKNM INV	.240	4	1.26	.324	4.9666	.7262					
PRT_EKNM QUA	.577	3	2.05	.275	3.8809	.2074	.0306				
PRT_EKNM CUB	.605	2	1.02	.530	3.4305	-.1937	.3550	-.0455			
PRT_EKNM COM	.583	4	5.59	.077	3.8620	1.0765					
12 PRT_EKNM POW											
PRT_EKNM S	.246	4	1.30	.317	1.5845	.1551					
PRT_EKNM GRO	.583	4	5.59	.077	1.3512	.0737					
PRT_EKNM EXP	.583	4	5.59	.077	3.8620	.0737					
PRT_EKNM LGS	.583	4	5.59	.077	.2589	.9289					

Notes: 12 Independent variable has non-positive values.

Lanjutan.....



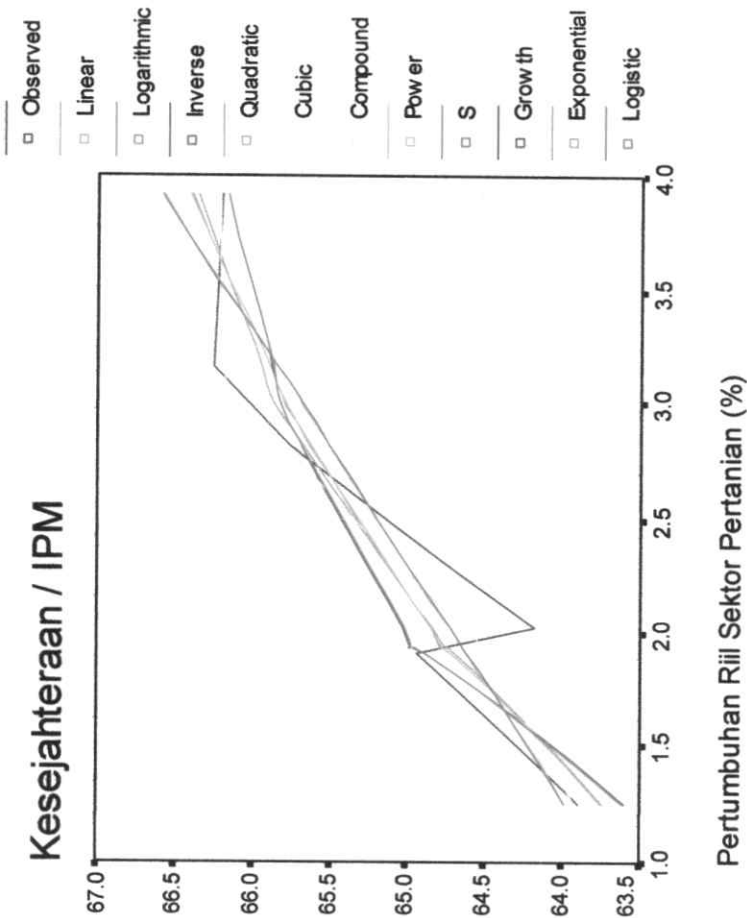
Lanjutan.....

MODEL: MOD_3

Independent: P_R_PERT

Dependent	Mth	Rsqr	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
KSJHTR	LIN	.849	4	22.45	.009		62.7539	.9763		
KSJHTR	LOG	.866	4	25.93	.007		63.2157	2.3295		
KSJHTR	INV	.820	4	18.28	.013		67.3798	-4.7557		
KSJHTR	QUA	.880	3	11.05	.041		61.3524	2.1986	-.2355	
KSJHTR	CUB	.920	2	7.70	.117		66.1629	-4.3431	2.4804	-.3492
KSJHTR	COM	.848	4	22.26	.009		62.7907	1.0151		
KSJHTR	POW	.866	4	25.90	.007		63.2364	.0358		
KSJHTR	S	.821	4	18.39	.013		4.2109	-.0731		
KSJHTR	GRO	.848	4	22.26	.009		4.1398	.0150		
KSJHTR	EXP	.848	4	22.26	.009		62.7907	.0150		
KSJHTR	LGS	.848	4	22.26	.009		.0159	.9851		

Lanjutan.....



Lanjutan.....

MODEL: MOD_4.

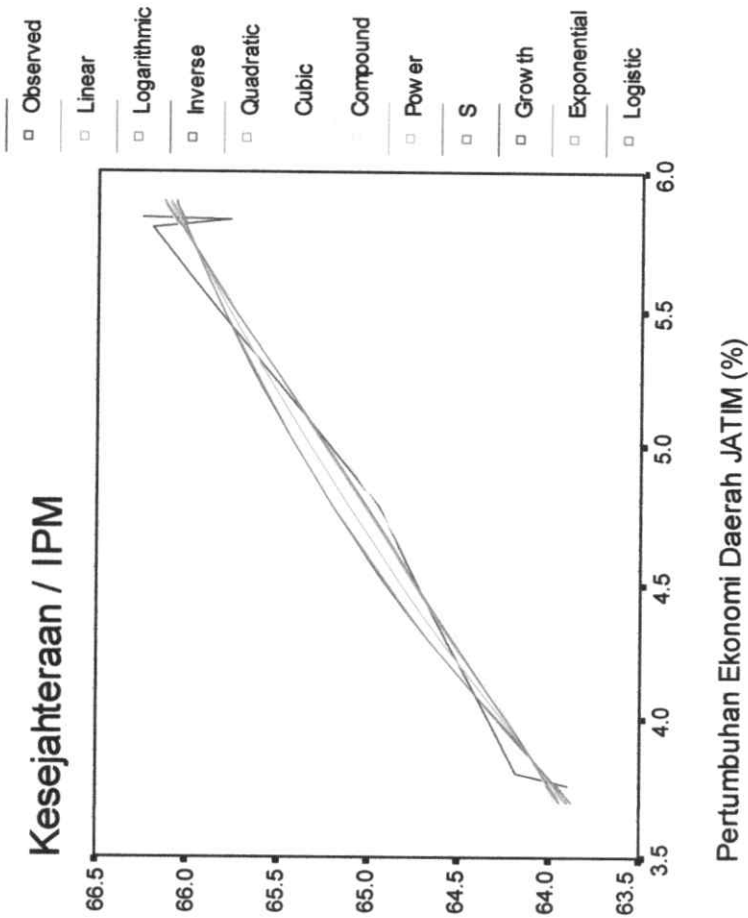
Independent: PRT_EKNM

Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
KSJHTR	LIN	.964	4	107.99	.000		60.2401	1.0002		
KSJHTR	LOG	.960	4	95.51	.001		57.7085	4.7326		
KSJHTR	INV	.952	4	78.71	.001		69.7972	-21.9610		
KSJHTR	QUA	.965	3	41.55	.007		61.8318	.3144	.0711	
9 KSJHTR	CUB	.965	3	41.55	.007		61.8318	.3144	.0711	
KSJHTR	COM	.965	4	110.34	.000		60.4092	1.0155		
KSJHTR	POW	.961	4	98.10	.001		58.1033	.0727		
KSJHTR	S	.953	4	80.99	.001		4.2480	-.3376		
KSJHTR	GRO	.965	4	110.34	.000		4.1011	.0154		
KSJHTR	EXP	.965	4	110.34	.000		60.4092	.0154		
KSJHTR	LGS	.965	4	110.34	.000		.0166	.9847		

Notes:

9 Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered.

Lanjutan.....



Lanjutan.....

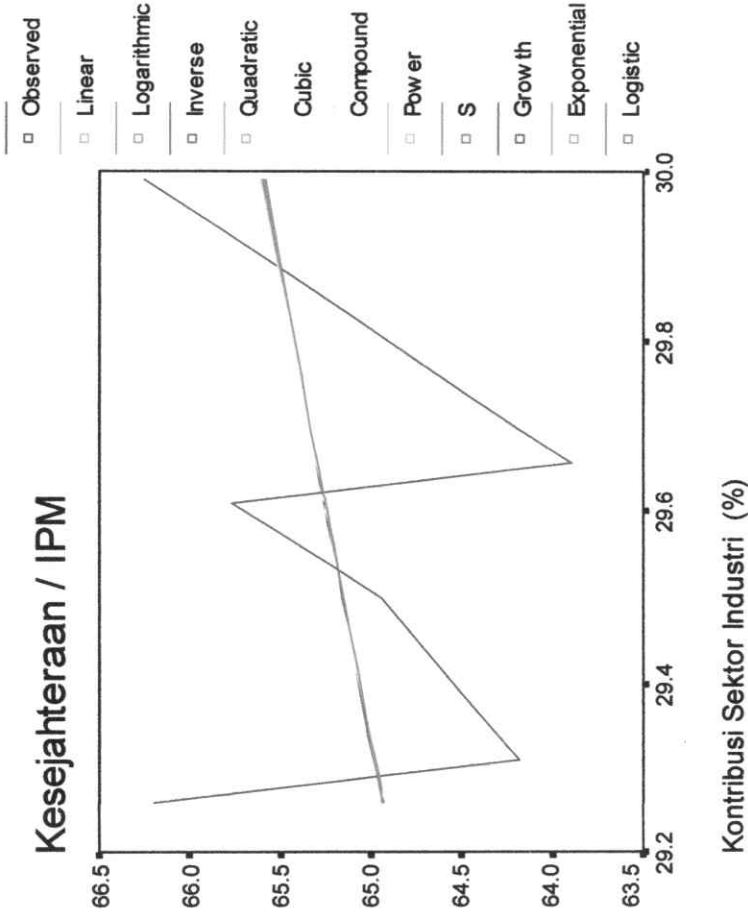
MODEL: MOD_5.

Independent: K_R_IDST

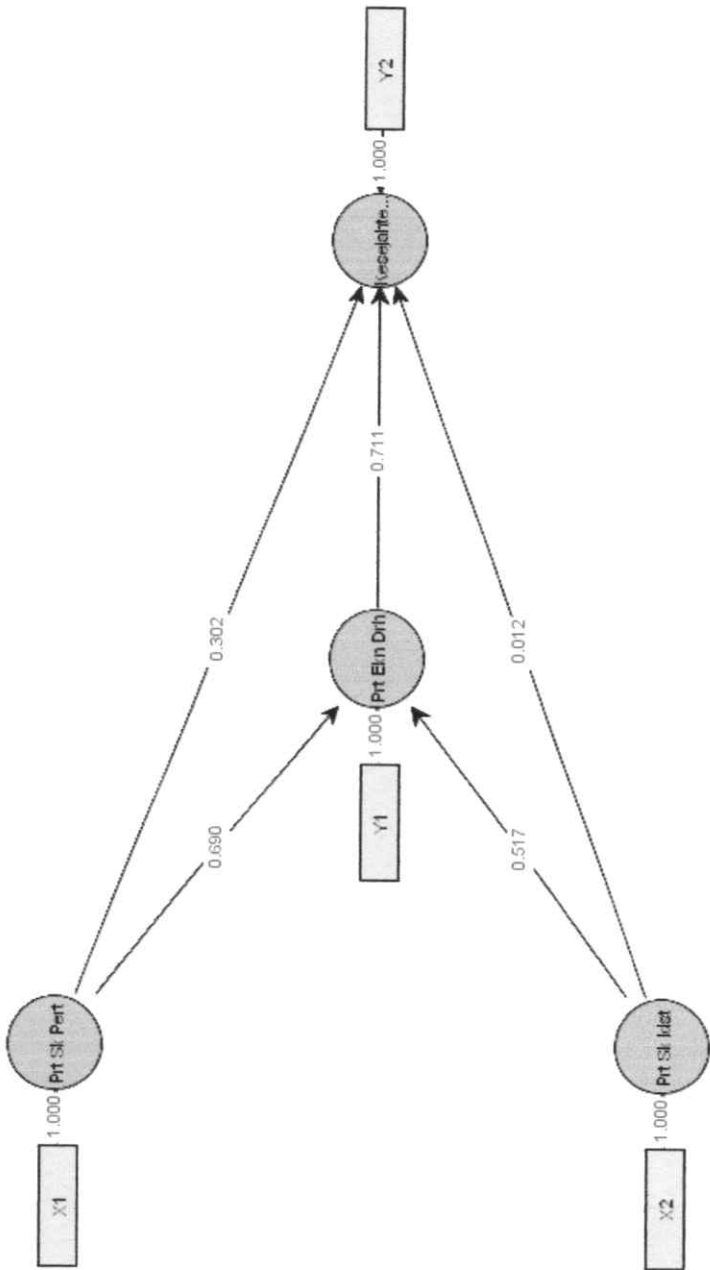
Dependent	Mth	Rsq	d.f.	F	Sigf	Upper bound	b0	b1	b2	b3
KSJHTR	LIN	.056	4	.24	.652	38.3093		.9102		
KSJHTR	LOG	.055	4	.23	.655	-25.243		26.7120		
KSJHTR	INV	.054	4	.23	.658	91.7321		-783.8300		
9 KSJHTR	QUA	.057	4	.24	.649	51.6659			.0155	
9 KSJHTR	CUB	.058	4	.25	.646	56.1185				.0004
KSJHTR	COM	.055	4	.23	.654	43.2167		1.0140		
KSJHTR	POW	.054	4	.23	.657	16.3559		.4084		
KSJHTR	S	.053	4	.23	.660	4.5830		-11.9840		
KSJHTR	GRO	.055	4	.23	.654	3.7662		.0139		
KSJHTR	EXP	.055	4	.23	.654	43.2167		.0139		
KSJHTR	LGS	.055	4	.23	.654	.0231		.9862		

Notes:
9 Tolerance limits reached; some dependent variables were not entered.

Lanjutan.....



Lampiran 4. Hasil Analisis PLS



Lanjutan.....

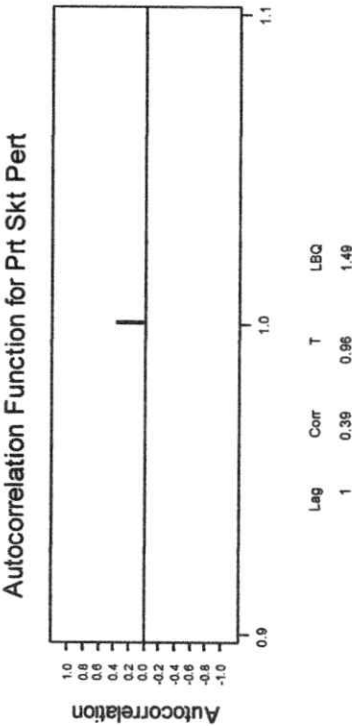
R-square

	R-square
Prt Ekn Drh	0.985
Kesejahteraan	0.985

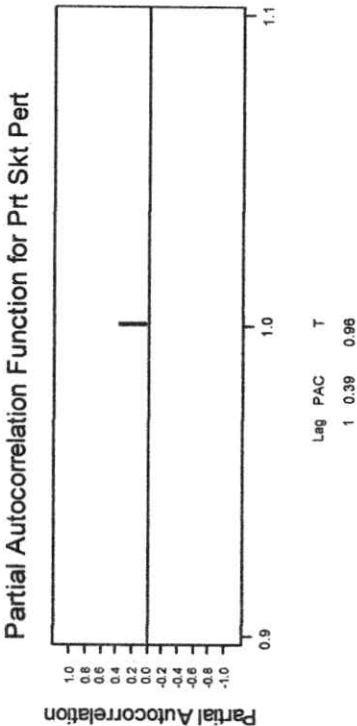
results for inner weights

	original sample estimate	mean of subsamples	Standard deviation	T- Statistic	p-value
Prt Sk Pert -> Keberhasilan Pemb Drh	0.690	0.696	0.040	17.238	0.0000
Prt Sk Idst -> Keberhasilan Pemb Drh	0.517	0.521	0.040	12.998	0.0000
Prt Sk Pert -> Kesejahteraan	0.302	0.328	0.078	3.896	0.0003
Prt Sk Idst -> Kesejahteraan	0.012	0.034	0.054	0.228	0.8206
Keberhasilan Pemb Drh -> Kesejahteraan	0.711	0.674	0.106	6.710	0.0000

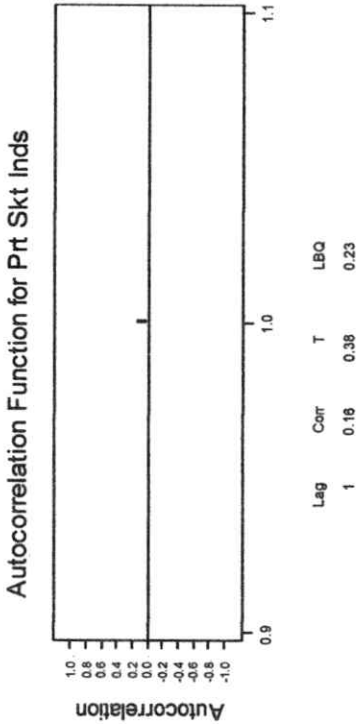
Lampiran 5 Hasil Pemeriksaan Komponen Musiman



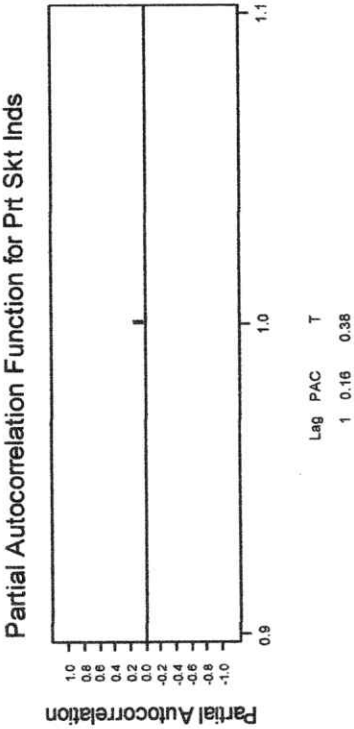
Lanjutan.....



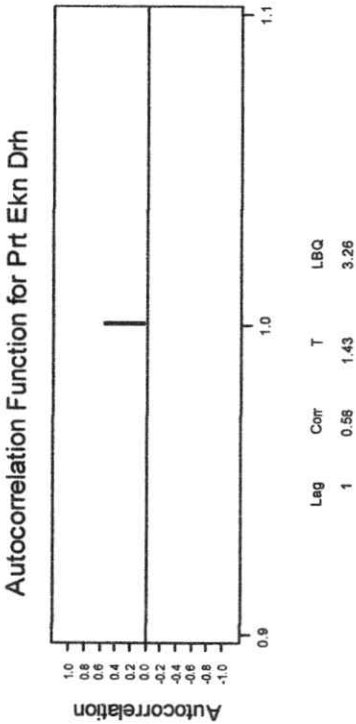
Lanjutan.....



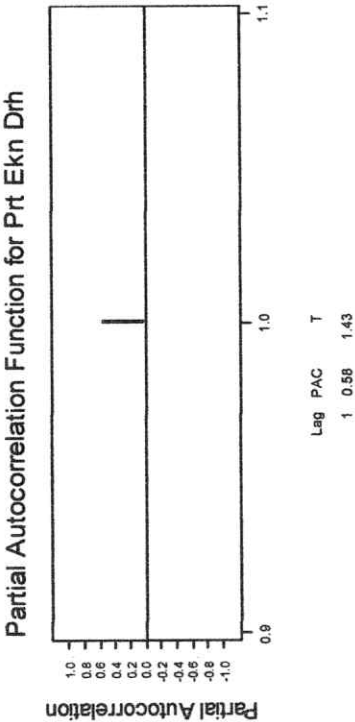
Lanjutan....



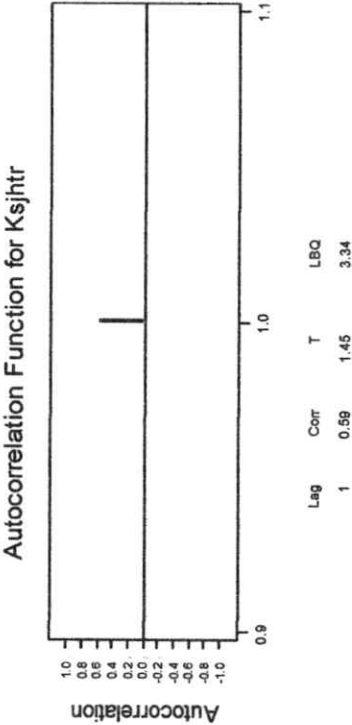
Lanjutan.....



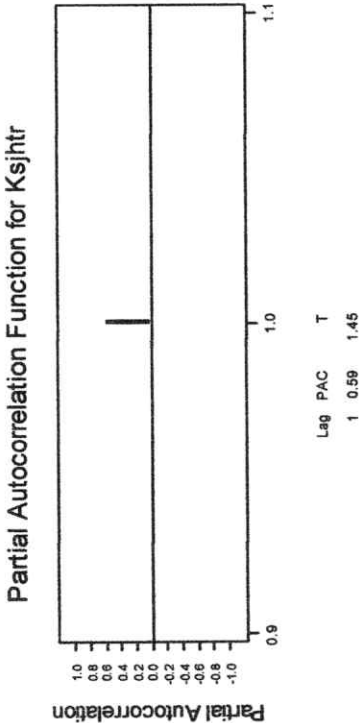
Lanjutan.....



Lanjutan.....



Lanjutan.....



Pemeriksaan komponen Musiman menggunakan metode *Autocorrelation* dan *Partial Autocorrelation* menunjukkan untuk semua variabel penelitian tidak ditemukan komponen musiman. Dengan demikian data hanya mengandung komponen trend, sehingga layak dilakukan analisis dengan metode *PLS*.